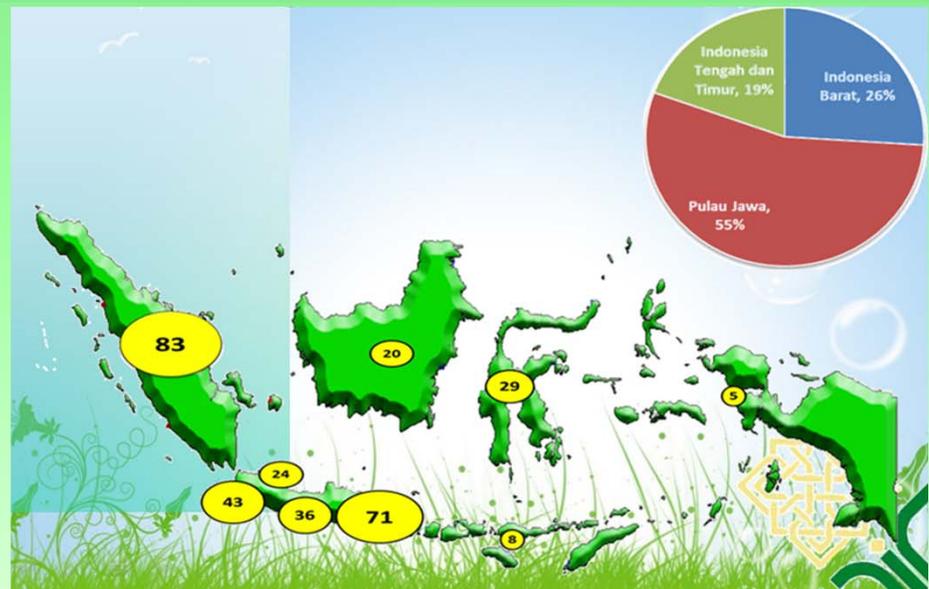


Des
2011

LAPORAN AKHIR

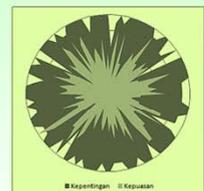
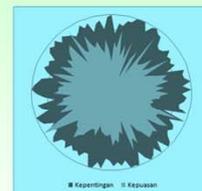
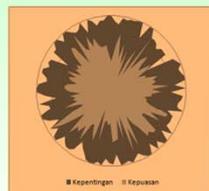
PENELITIAN EVALUASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM

Diajukan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia



Tim Peneliti :

1. Jarot Wahyudi
2. Ibnu Qizam
3. Arya Wirabhuana
4. Kifayah Ammar
5. Yandra Rahardian P
6. Taufiq Aji



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DESEMBER 2011





KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta Telp. 021- 3812344

Fax 021- 34833981 Website : www.pendis.depag.go.id

J A K A R T A

Nomor : **Dj.I/Dt.I.IV/5/PP.00.9/1893/2011**

Jakarta, 14 Oktober 2011

Lamp. : 1 (satu) exp.

Perihal : Permohonan Data dan Wawancara

Kepada Yang Terhormat

1. Rektor / Ketua PTAIN
2. Rektor / Ketua PTAIS
3. Dekan Fakultas Agama Islam pada PTU

di tempat

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

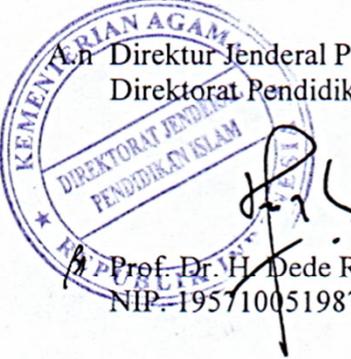
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Studi dan Pemetaan yang tengah dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) tentang “ Evaluasi Kebijakan Kementerian Agama dalam Pengembangan PTAI”, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu Pimpinan PTAIN, PTAIS, dan FAI pada PTU sebagaimana terlampir untuk dapat :

1. Diwawancarai oleh Tim Peneliti kami terkait evaluasi Kebijakan Kementerian Agama dalam rangka Pengembangan PTAI. (Tim peneliti dan jadwal wawancara terlampir).
2. Mengundang 5 orang dosen dan 5 orang mahasiswa untuk dapat mengisi kuesioner pengambilan data tentang penelitian dimaksud pada waktu yang telah ditentukan (terlampir)
3. Menyediakan data Indikator Kinerja Akademik institusi (Untuk UIN / IAIN / STAIN / PTAIS) dan Indikator Kinerja Akademik Fakultas (Untuk FAI pada PTU) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.


An Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A.
NIP. 195710051987031003

Tembusan :

Dirjen Pendidikan Islam (sebagai laporan)

**JADUAL RENCANA KUNJUNGAN INTERVIEW DAN PENGUMPULAN DATA
TIM PENELITI EVALUASI KEBIJAKAN KEMENAG DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN PTAI**

No	Institusi	Tanggal	Petugas (Peneliti)
1	UIN Alauddin - Makassar	20 Okt 2011	DR. Ibnu Qizam, M,Si
			Kifayah Amar, Ph.D
2	IAIN Sumatera Utara	20 Okt 2011	Drs. Jarot Wahyudi, S.H, M.A.
			Taufiq Aji, M.T.
3	STAIN Samarinda	20 Okt 2011	Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc
			Yandra Rahardian P, M.T.
4	FAI Univ Muhamadiyah Makassar	21 Okt 2011	DR. Ibnu Qizam, M,Si
			Kifayah Amar, Ph.D
5	FAI UISU - Medan	21 Okt 2011	Drs. Jarot Wahyudi, S.H, M.A.
			Taufiq Aji, M.T.
6	STAI Balikpapan	21 Okt 2011	Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc
			Yandra Rahardian P, M.T.
7	UIN Sunan Gunung Djati	27 Okt 2011	Drs. Jarot Wahyudi, S.H, M.A.
8	IAIN Sunan Ampel	27 Okt 2011	Kifayah Amar, Ph.D
9	IAIN Surakarta	27 Okt 2011	Yandra Rahardian P, M.T.
10	STAIN Salatiga	27 Okt 2011	Yandra Rahardian P, M.T.
11	IAIN Syeh Nurjati - Cirebon	28 Okt 2011	Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc
12	STAIN Kediri	28 Okt 2011	DR. Ibnu Qizam, M,Si
13	UNSIQ Wonosobo	28 Okt 2011	Taufiq Aji, M.T.
14	FAI Univ Islam Indonesia - Yogyakarta	1 Nov 2011	Yandra Rahardian P, M.T.
			Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc

Kontak Person

Nama	Telp	E-mail
1. Drs. Jarot Wahyudi, M.A.	085868060919	jarotuinusuka@yahoo.com
2. DR.Ibnu Qizam, M.Si	008122741718	q_zami@yahoo.com
3. Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc	08112632792	arya.wirabhuana@yahoo.com
4. Kifayah Amar, Ph.D	081330025655	amar_vie@yahoo.com
5. Taufiq Aji, M.T,	085743300980	ajiq15@yahoo.com
6. Yandra Rahardian P, M.T.	081328805055	yrahardian@yahoo.com

Lampiran Surat No : Dj.I/ Dt/I/IV/5/PP.00.9/1893/2011

**DAFTAR DATA INDIKATOR KINERJA AKADEMIK PERGURUAN TINGGI
YANG DIPERLUKAN
PADA KEGIATAN PENELITIAN EVALUASI KEBIJAKAN KEMENAG RI
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PTAI**

A. Informasi Umum

1. Nama Perguruan Tinggi / FAI PTAIS pada PTU
2. Tanggal Lahir Perguruan Tinggi / FAI PTAIS pada PTU
3. Website, email, dan Alamat serta No Telp PTAI / FAI PTAIS pada PTU
4. Nama Pimpinan Institusi dan No Telp

B. Data Indikator Kinerja Kelembagaan dan Akademik untuk 5 tahun terakhir

1. Daftar SK /Peraturan Institusi tentang kebijakan tentang aspek Kelenbaag dan akademik, Keuangan, Sarana dan Prasarana, serta SDM pada institusi anda
2. Perkembangan Jumlah Mhs Aktif tiap Fakultas dalam 5 tahun terakhir
3. Perkembangan Jumlah Peminat / Pendaftar dan jumlah mhs baru yang diterima dalam 5 tahun terakhir
4. Perkembangan IPK rata rata lulusan dalam 5 tahun terakhir
5. Perkembangan Waktu studi Rata rata daloam 5 tahun terakhir
6. Profil Pekerjaan Lulusan / Alumni dan masa tunggu sejak lulus sampai mendapatkan pekerjaan / berkatya .
7. Jumlah program studi dan status peringkat akreditasinya (BAN-PT) dalam 5 tahun terakhir
8. Sebaran Asal sekolah mahasiswa baru (SMA, SMK, MA, dll) dalam 5 tahun terakhir
9. Sebaran Asal propinsi mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir
10. Daftar kerjsama dalam negeri dan luar negeri yang dimiliki institusi
11. Perkembangan jumlah penelitian dan seminar tingkat Nasional dan Internasional yang pernah dilakukan oleh institusi dalam 5 tahun terakhir
12. Sebutkan Jumlah dan jenis SOP apa saja yang dimiliki oleh Institusi
13. Jelaskan Menaknisme Penjaminan Mutu pada Institusi
14. Jelaskan Muatan lokal yang menjadi “pembeda” instiusi dibandingkan institusi yang lain
15. Perkembangan jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dalam 5 tahun Terakhir
16. Perkembangan jumlah mahasiswa yang mengundurkan diri / drop out/ tidak selesai dalam 5 tahun terakhir

C. Data Indikator Kinerja Aspek Keuangan dalam 5 tahun terakhir

1. Perkembangan jumlah dana yang diperoleh oleh Istitusi (baik dari APBN, pribadi/yayasan, Bantuan lain, BLU/PNBP, SPP/DPP) dalam 5 tahun terakhir.
2. Perkembangan Alokasi pemanfaatan Dana operasional dalam 5 tahun terakhir (Belanja pegawai, Belanja Modal, Kegiatan akademik, Investasi, dll)
3. Salinan RENSTRA Institusi yang terakhir
4. Salinan DIPA dan RKA-K/L Institusi 3 tahun terakhir (2009, 2010, 2011) dan RBA untuk tiga tahun terakhir (bagi yang sudah mendapatkan status PPK BLU)
5. Salinan LAKIP / LPJ Rektor / Laporan Dewas institusi untuk tiga tahun terskhir

D. Data Indikator Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana dalam 5 tahun terakhir

1. Daftar luas gedung dan tanah yang dimiliki
2. Jumlah dan tipe peralatan pendidikan yang dimiliki
3. Perkembangan Jumlah Bandwidth dan komputer yang dimiliki
4. Jumlah buku dan fasilitas penunjang lain yang dimiliki
5. Rencana Pengembangan Fasilitas dan sarana / prasarana

E. Data Indikator Kinerja Aspek SDM dalam 5 tahun terakhir

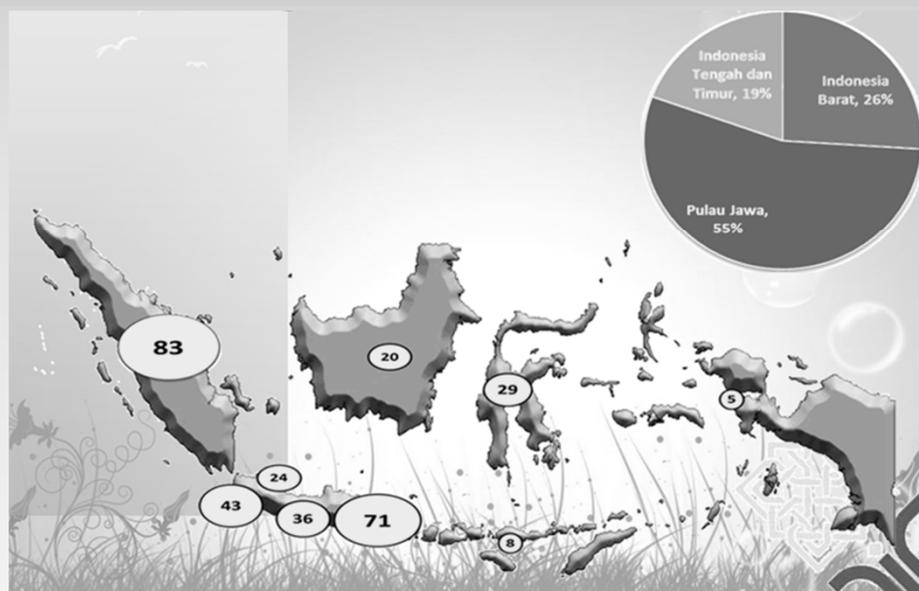
1. Perkembangan Rasio Dosen Tetap : Mahasiswa dalam 5 tahun terakhir
2. Data Jumlah Dosen dan Kualifikasi Pendidikan yang dimiliki
3. Data Jumlah Dosen dan Jabatan akademik yang dimiliki
4. Data jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan yang dimiliki
5. Data Jumlah Pegawai dan Pangkat yang dimiliki
6. Data Staff Ahli , Dosen Tamu, Visiting Professor yang ada selama 5 tahun terakhir

Des
2011

LAPORAN AKHIR

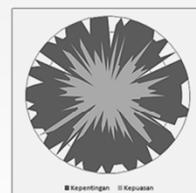
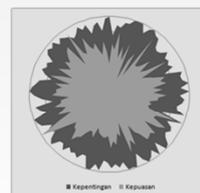
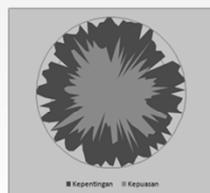
PENELITIAN EVALUASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM

Diajukan pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia



Tim Peneliti :

1. Jarot Wahyudi
2. Ibnu Qizam
3. Arya Wirabhuana
4. Kifayah Ammar
5. Yandra Rahardian P
6. Taufiq Aji



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DESEMBER 2011



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-NYA maka laporan penelitian Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Perguruan Tinggi Islam dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Secara garis besar, dalam laporan ini menyajikan beberapa hal pokok, yaitu;

- I. Pendahuluan**
- II. Kajian Pustaka Dan Literatur (*Context and Process Analysis*)**
- III. Review Kebijakan Kemenag Dalam Pengembangan PTAI (*Content Analysis*)**
- IV. Ukuran Sampel Dan Deskripsi Data Responden**
- V. Analisis Data (*Stakeholder Analysis*)**
- VI. Usulan Regulasi Dan Program Dalam Rangka Pengembangan PTAI**
- VII. Penutup : Kesimpulan dan Saran**

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi para pengambil keputusan di tingkat Kementerian Agama dalam Pengembangan Perguruan Tinggi Islam. Kami mohon maaf apabila dalam laporan ini masih terdapat kekurangan dan tentunya kami membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang memberikan masukan demi penyempurnaan laporan ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung untuk terselesaikannya laporan ini.

Jakarta, Desember 2011

Tertanda,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI
LAPORAN HASIL PENELITIAN
EVALUASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN PTAI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	viii
I. PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	02
B. Maksud, Tujuan, dan Lingkup Kegiatan	05
C. Hasil yang diharapkan	07
D. Definisi dan Batasan Pengertian	08
E. Metodologi	08
1. Tahap Awal (Persiapan)	09
2. Tahap Inventarisasi Data	10
3. Tahap Analisis	13
4. Metode Analisis Kebijakan	13
a. Konteks Kebijakan	13
b. Peranan Stakeholder	17
c. Proses Perumusan Kebijakan	26
d. Isi Kebijakan	27
II. KAJIAN PUSTAKA DAN LITERATUR (<i>CONTEXT AND PROCESS ANALYSIS</i>)	30
A. Studi Kebijakan	31
1. Studi Kebijakan	31
2. Evaluasi Kebijakan	32
3. Sifat Evaluasi	34
4. Fungsi Evaluasi	35
5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan	36
B. Sistem Pendidikan Agama Islam	41
1. Latar Belakang	41
2. Posisi Strategis Pendidikan Islam	42
3. Kerangka Dasar Pendidikan Islam	46
4. Landasan Hukum Pendidikan Islam	48

5. Peta Pendidikan Islam	52
6. Jenis, Jenjang, dan Jalur Pendidikan Islam	54
C. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam Saat ini	55
D. Perkembangan PTAI di Indonesia	56
III. REVIEW KEBIJAKAN KEMENAG DALAM PENGEMBANGAN PTAI (CONTENT ANALYSIS)	60
A. Pemetaan kebijakan KEMENAG dalam Pengembangan PTAI	61
B. Isu Strategis Dalam Pengembangan PTAI	65
C. Regulasi dan Program Pengembangan PTAI	68
D. Indikator Kinerja Kunci Pengembangan PTAI	70
E. Capaian Indikator Kinerja Pengembangan PTAI Saat ini	76
IV. UKURAN SAMPEL DAN DESKRIPSI DATA RESPONDEN	78
A. Penentuan Lokasi dan Ukuran Sampel	78
B. Profil PTAI Responden	83
1. UIN Alauddin, Makassar	83
2. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	86
3. IAIN Sunan Ampel, Surabaya	88
4. IAIN Surakarta	89
5. IAIN Syekh Nurjati, Cirebon	91
6. IAIN Sumatera Utara	92
7. STAIN Samarinda	94
8. STAIN Salatiga	96
9. STAI Balikpapan	97
10. STAIN Kediri	98
11. Univ Muhammadiyah Makassar	99
12. FAI Univ. Islam Indonesia	101
13. FAI Univ. Islam Sumatera Utara	103
14. Univ. Sains dan Al-Qur'an, Wonosobo	104
C. Jenis Data Hasil Survey	106
D. Kendala Pelaksanaan Survey	107
V. ANALISIS DATA (STAKEHOLDER ANALYSIS)	109
A. Deskripsi Data Responden	110
1. Deskripsi Data PTAI Responden	110
2. Kegiatan Strategis Pengembangan PTAI	114
3. LAKIP PTAI Responden	116
4. Isu Strategis Pengembangan PTAI berbasis deskripsi data	130

B. Analisis Kualitatif	149
1. Akademik dan Kelembagaan	132
2. Keuangan dan Anggaran	137
3. Sarana dan Prasarana	138
4. Sumber daya manusia	139
5. Analisis Stakeholder KEMENAG pusat	141
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan PTAI	146
C. Analisis Kuantitatif	149
1. Kuesioner	149
2. Karakteristik Responden	152
3. Pengumpulan Data	154
4. Hasil Pengolahan Data	156
a. Analisis Gap	156
b. Pendekatan <i>Importance Satisfaction</i>	165
5. Analisis	171
a. Aspek Kelembagaan dan Akademik	171
b. Aspek Keuangan dan Anggaran	172
c. Aspek Sarana dan Prasaran	172
d. Aspek Sumber daya Manusia	173
VI. USULAN REGULASI DAN PROGRAM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PTAI	174
1. Aspek Kelembagaan dan akademik	175
2. Aspek Sarana dan Prasarana	175
3. Aspek Keuangan	175
4. Aspek SDM	176
VII. PENUTUP : KESIMPULAN DAN SARAN	178
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Hasil Pemetaan (Clustering) dokumen peraturan dan regulasi	185
2. Rekapitulasi Hasil wawancara dengan stakeholder	217
3. Instrumen Riset dan Kuesioner	258
4. File Presentasi Laporan Akhir	291

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Kerangka Pikir Studi	4
Gambar 1.2 Tahapan Pelaksanaan Studi	10
Gambar 1.3 Generic and Specific Stakeholders	19
Gambar 1.4 Ruang lingkup Kebijakan	20
Gambar 1.5 Pengaruh Stakeholder terhadap Kebijakan	21
Gambar 1.6 Peta Kekuatan dan Interest	24
Gambar 1.7 Proses Analisis Stakeholder	25
Gambar 2.1 Analisis Kebijakan yang berorientasi pada masalah	32
Gambar 2.2 Posisi Pendidikan Islam dalam Bingkai Ideologi Negara	46
Gambar 2.3 Peta program dan lembaga pendidikan islam dalam struktur pendidikan nasional	54
Gambar 3.1 Porsi jumlah dokumen regulasi dan peraturan terhadap empat aspek pengembangan PTAI	64
Gambar 4.1 Sebaran PTAI di Indonesia	80
Gambar 4.2 Prosentase Sebaran PTAI di Indonesia	81
Gambar 4.3 Proporsi PTAI di Indonesia	81
Gambar 4.4 Proporsi Jumlah PTAI tiap Wilayah	82
Gambar 5.1. Perbandingan jumlah dosen pada PTAI sampel	112
Gambar 5.2. Perkembangan mahasiswa aktif tahun 2006 hingga 2011	112
Gambar 5.3 Tingkat pendidikan dosen PTAI	113
Gambar 5.4 Akreditasi prodi PTAIN	114
Gambar 5.5 Akreditasi prodi PTAIS	114
Gambar 5.6 Akreditasi PTAIS menurut wilayah	115
Gambar 5.7 Pemetaan Kegiatan Strategik Kemenag 2010 – 2014 untuk PTAI	115
Gambar 5.8 Pengembangan kualitas tenaga kependidikan	118
Gambar 5.9 Peningkatan kuantitas dan kualitas dosen	118
Gambar 5.10 Peningkatan kuantitas dan kualitas dosen dalam penelitian	119

Gambar 5.11 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	119
Gambar 5.12 Pengembangan kelembagaan	120
Gambar 5.13 Kerjasama kelembagaan dalam negeri	120
Gambar 5.14 Kerjasama kelembagaan luar negeri	121
Gambar 5.15 Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian	126
Gambar 5.16 Peningkatan publikasi penelitian	127
Gambar 5.17 Peningkatan fasilitas sarana & prasarana	127
Gambar 4.18 Peningkatan manajemen dan pengelolaan keuangan	128
Gambar 5.19 Peningkatan kerjasama dengan mitra luar negeri	128
Gambar 5.20 Proporsi Jumlah Responden Jawa dan Luar Jawa	154
Gambar 5.21 Gap Kepuasan-Kepentingan Masing-masing Responden	158
Gambar 5.22 Nilai Gap Tingkat Kepentingan vs Kepuasan	159
Gambar 5.23 Persentase Kumulatif Pemberian Skor oleh Responden	161
Gambar 5.24 Gap Tingkat Kepuasan dan Tingkat Kepentingan	162
Gambar 5.25 Gap Tingkat Kepuasan dan Tingkat Kepentingan di Jawa dan Luar Jawa	163
Gambar 5.26 Gap Tingkat Kepuasan dan Tingkat Kepentingan Dosen dan Mahasiswa	164
Gambar 5.27 Rating Aspek Kelembagaan	168
Gambar 5.28 Rating Aspek Anggaran	169
Gambar 5.28 I-S Rating Aspek Sarana Prasarana	170
Gambar 5.29 Rating Aspek SDM	171

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perspektif Penilaian Kinerja PTAI	12
Tabel 1.2	Persepektif ProsesPenyelenggaraan PTAI dari Perspektif Kelembagaan	27
Tabel 2.1	Jumlah Lembaga, Peserta Didik, dan Tenaga Pendidik Dalam Sub-sistem Pendidikan Islam Tahun 2008	54
Tabel 2.2	Jumlah Lembaga, Peserta Didik, dan Pendidik Sasaran Pembangunan Pendidikan Tinggi Islam di Satuan Pendidikan	56
Tabel 2.3	Jumlah Pendidik Menurut Status dan Kualifikasi Pendidikan	56
Tabel 2.4	Kegiatan yang berhasil dilakukan KEMENAG dalam sektor Pendidikan Tinggi Islam (LAKIP Ditjen Pendis 2010)	59
Tabel 3.1	Jumlah dan Jenis Regulasi Peraturan yang relevan dengan tema besar penelitian	63
Tabel 3.2	Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi Islam (diadopsi dari RENSTRA DITJEN PENDIS Tahun 2010 - 2014)	68
Tabel 3.3	Program Kerja Sektor Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010	69
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan PTAI 2010 – 2014	72
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Pengembangan PTAI	77
Tabel 4.1	Tabel rangkuman sebaran PTAI	80
Tabel 4.2	Sampel Pengambilan Data	83
Tabel 4.3	Jadwal dan Petugas Interview dan Penyebaran Kuesioner ke PTAI Responden	84
Tabel 5.1	Kenaikan bantuan beasiswa sebagai bagian program penguatan SDM di IAIN Sunan Ampel (2008-2009)	122
Tabel 5.2	Bantuan Penelitian bagi Dosen IAIN Sunan Ampel Tahun 2008-2009	124
Tabel 5.3	Pertanyaan Kuesioner	152
Tabel 5.4	Institusi Responden dan Petugas Pengumpul Data	154
Tabel 5.5	Rekap profil responden pengisi kuesioner	156
Tabel 5.6	Prioritas Perhatian bagi Aspek Kelembagaan dan Akademik Berdasarkan Gap	164
Tabel 5.7	Prioritas Perhatian bagi Anggaran Berdasarkan Gap	165
Tabel 5.8	Prioritas Perhatian bagi Aspek Sarana Prasarana Berdasarkan Gap	165
Tabel 5.9	Prioritas Perhatian bagi Aspek SDM Berdasarkan Gap	165

Tabel 5.10	Prioritas Perhatian bagi Aspek Kelembagaan dan Akademik Berdasarkan IS Rating	168
Tabel 5.11	Prioritas Perhatian bagi Aspek Anggaran Berdasarkan IS Rating	169
Tabel 5.12	Prioritas Perhatian bagi Aspek Sarana Prasarana Berdasarkan IS Rating	170
Tabel 5.13	Prioritas Perhatian bagi Aspek SDM Berdasarkan IS Rating	171



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian dunia menuntut adanya kompetensi dari sebuah perguruan tinggi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia. Ketidaksiapan menghadapi persaingan global yang bercirikan kompetisi dalam kualitas dan efisiensi dapat mengakibatkan turunnya kemampuan dalam berkompetisi. Perguruan tinggi harus dapat menjalankan peran yang signifikan menjadi pendorong kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat yang mampu menangkap potensi-potensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Perguruan Tinggi sebagai salah satu elemen dalam Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visi Indonesia 2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri dan berdaya saing tinggi. Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi nasional mempunyai tanggung jawab menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mampu memberikan tawaran solusi terhadap berbagai masalah kemanusiaan dan kebangsaan. Penyelenggaraan pendidikan harus ditingkatkan secara kontinyu dan merata, agar mampu menghasilkan lulusan dalam jumlah yang memadai untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Peningkatan akses tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas.

Penyelenggaraan PTAI yang berkualitas merupakan harapan bagi banyak pihak baik pemerintah, penyelenggara, maupun pengguna. Terlebih lagi apabila pendidikan tinggi yang berkualitas tersebut dapat diakses oleh

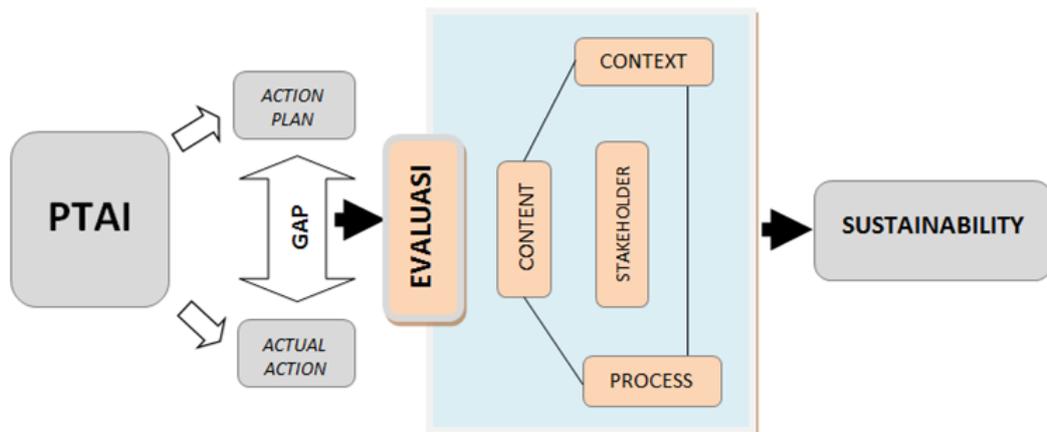


masyarakat dengan mudah. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui adanya proses harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PTAI. Perkembangan jumlah PTAI yang telah mencapai sebanyak 500 dengan empat klasifikasi, yaitu Enam (6) Universitas Islam Negeri (UIN), Dua belas (14) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tiga puluh dua (31) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Empat ratus enam puluh satu (461) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) harus mempunyai kapasitas dalam melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas. PTAI harus menghindarkan praktek-praktek yang dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar di kemudian hari, antara lain penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau meninggalkan fungsi sebagai institusi pendidikan yang dapat menyebabkan menurunnya pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi. Pada akhirnya kondisi di atas menyebabkan penurunan penyerapan mahasiswa.

Pendidikan tentu tidak mungkin dapat dilaksanakan seluruhnya oleh pemerintah, sebab jangkauan tangan pemerintah sangat terbatas. Keberadaan PTAI dalam kontribusi pengembangan akses pendidikan menjadi sangat penting. Namun kuantitas PTAI sebanyak 500 belum diimbangi dengan kualitas yang merata. Masih terdapat disparitas kualitas antar PTAI. Salah satunya adalah perbedaan kualitas pendidikan di Jawa dengan luar Jawa. Akses dana yang masih belum memenuhi prinsip keadilan. Keadaan tersebut menuntut PTAI harus berkompetisi antar lembaga pendidikan. Dari berbagai permasalahan yang telah disebut, maka perlu adanya suatu studi evaluasi untuk mencari penyebab dan solusi dari permasalahan yang ada di PTAI. Evaluasi yang dilakukan merupakan perwujudan proses perbaikan agar PTAI dapat berkembang secara berkelanjutan (*Continuous improvement*).



Kegiatan evaluasi telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan berbagai program. Prinsip *quality assurance* harus ditekankan pada proses evaluasi disetiap PTAI. Dengan adanya evaluasi penyelenggaraan PTAI diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa PTAI yang ada mempunyai daya saing baik masa sekarang maupun yang akan datang. Hal tersebut menjadi landasan dalam studi ini yang akan melakukan kajian evaluasi kebijakan Kementerian Agama dalam rangka pengembangan PTAI.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Studi

Secara konseptual, evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan (Ali, 2011). Hal ini penting dilakukan karena suatu perencanaan program atau kebijakan yang baik belum tentu diimplementasikan dengan baik dan akibatnya dapat menghasilkan hasil yang optimal. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan PTAI perlu dievaluasi antara perencanaan (action plan) dan implementasinya (actual action). Kegiatan evaluasi tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai model diantaranya model pengukuran, model persesuaian, model sistem dan terakhir adalah model iluminasi, dimana masing-masing model memiliki karakteristik tersendiri (Ali, 2011). Berdasarkan pertimbangan pada paparan di



atas, maka riset evaluasi ini akan menggunakan model sistem yang secara diagramatis terilustrasi pada Gambar 1.1. diatas.

Hasil evaluasi sebagaimana tergambar di atas, akan dijadikan dasar analisis kebijakan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (PTAI). Evaluasi PTAI akan dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Hasil evaluasi akan dijadikan dasar analisis kebijakan Kementrian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (PTAI). Evaluasi PTAI akan dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek *context, content, process* dan *stakeholder*.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP KEGIATAN

Tujuan dari studi adalah untuk memperoleh suatu masukan dan dokumen kebijakan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan PTAI untuk dapat menciptakan PTAI yang kuat secara kelembagaan dan berkualitas secara berkesinambungan. Selain itu, diharapkan pula dengan penelitian ini **dapat menghasilkan** rekomendasi untuk perbaiki berbagai peraturan peraturan dan sistem penyelenggaraan PTAI yang lebih modern sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi dan tuntutan yang ada. Secara rinci, tujuan penelitian ini dapat disebutkan dalam *pointers* dibawah ini :

1. Melakukan identifikasi Kebijakan KEMENAG dibidang pengembangan PTAI
2. Mengevaluasi Kebijakan Pengembangan PTAI (Memadai, gap, dan dampak)
3. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan PTAI ke depan
4. Melakukan pendampingan untuk perbaikan Kebijakan KEMENAG dalam Rangka Pengembangan PTAI



Ruang lingkup kegiatan studi yang dilaksanakan meliputi:

1. Persiapan kajian
 - a. Koordinasi tugas
Mengalokasikan tugas dan melakukan koordinasi dengan institusi yang terkait dengan kajian.
 - b. Koordinasi tenaga ahli
Menyiapkan dan mengkoordinasikan para tenaga ahli yang dilibatkan dalam kegiatan kajian.
 - c. Persiapan perlengkapan, instrumen dan personil pendukung
Menyiapkan berbagai perlengkapan, instrumen dan personil yang dibutuhkan dalam kajian.
2. Melakukan identifikasi dan analisis regulasi dalam penyelenggaraan PTAI
 - a. Mengidentifikasi regulasi-regulasi yang terkait dengan pendidikan tinggi dari Kementerian Agama dan kementerian Pendidikan Nasional
 - b. Melakukan kajian regulasi
Kajian regulasi dilakukan terkait dengan perijinan, persaingan, road map penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, dan baku mutu pendidikan.
 - c. Disseminasi kajian regulasi
Mendiseminasikan hasil kajian regulasi untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder terutama institusi terkait
3. Melakukan pemetaan penyelenggaraan PTAI di Indonesia.
Kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. Menyusun indikator kinerja
Indikator kinerja diterjemahkan menjadi sebuah kuesioner kinerja. Sumber informasi penyusunan indikator diperoleh dari:



- *Key stakeholders* penyelenggaraan PTAI.
- Regulasi terkait penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- *Best practices* penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

b. Melakukan *assessment* kinerja

Assesment dilakukan dengan menggunakan indikator yang diperoleh pada tahapan sebelumnya sebanyak dua kali. Tahap pertama adalah *self assessment* melalui *focus group discussion* (FGD) yang dipandu dengan menggunakan kuesioner kinerja. Sedangkan tahapan kedua adalah *assessment* menyeluruh dengan menggunakan acuan pada tahap pertama.

c. Disseminasi hasil pemetaan

Mendiseminasikan hasil pemetaan untuk memvalidasi dan mendapatkan masukan dari para stakeholder dan ahli.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Sasaran dan Target dari kegiatan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk Mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan operasional PTAI dan Merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan PTAI kedepan. Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa *research question* yang coba dijawab dalam penelitian ini :

1. Apa saja Kebijakan KEMENAG dalam rangka Pengembangan PTAI
2. Bagaimana rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan PTAI
3. Apakah kebijakan KEMENAG tentang Pengembangan PTAI sudah memadai untuk memnuhi tujuan Kebijakan Pendidikan Nasional
4. Seberapa besar “gap” antara harapan dari kebijakan KEMENAG tentang pengembangan PTAI dengan realita kondisi PTAI saat ini
5. Seberapa besar dampak yang dirasakan oleh “stakeholder” terhadap implementasi kebijakan KEMENAG dalam Pengembangan PTAI.



D. DEFINISI DAN BATASAN PENGERTIAN

Kebijakan Publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga tujuan organisasi / institusi dapat dicapai dengan baik. Ciri Ciri Utama Kebijakan Publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diterjemahkan dalam regulasi dan program yang diharapkan dapat mengatasi masalah Publik. Cochran dan Malone mengemukakan: *“Public policy is the study of goverments decision and action designed to deal with matter of public concern.”*

Dari pengertian diatas, maka Keputusan Menteri, Keputusan Direktorat Jenderal, Keputusan Direktur pada kementerian Tertentu pada dasarnya merupakan *public policy*. Dye mendefinsikan kebijakn piblik sebagai apa yang dilakukan oleh pemeintah, bagaimana melakukannya, mengapa perlu dikerjakan, dan apa perbedaan yang dibuat. Dye berpandangan lebih luas dalam merumuskan pengertian kebijakan, yaitu sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever goverments choose to do or not to do*).

Kegiatan studi dilaksanakan di PTAI seluruh Indonesia. Oleh karena keterbatasan waktu studi, sedangkan studi harus mampu mewakili potret PTAI Indonesia, maka diambil beberapa PTAI yang berlokasi di Jawa dan Luar Jawa agar mampu mewakili potret PTAI di Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu survey akan dilaksanakan di 14 PTAI (2 UIN, 4 IAIN, 3 STAIN, dan 5 PTAIS).

E. METODOLOGI

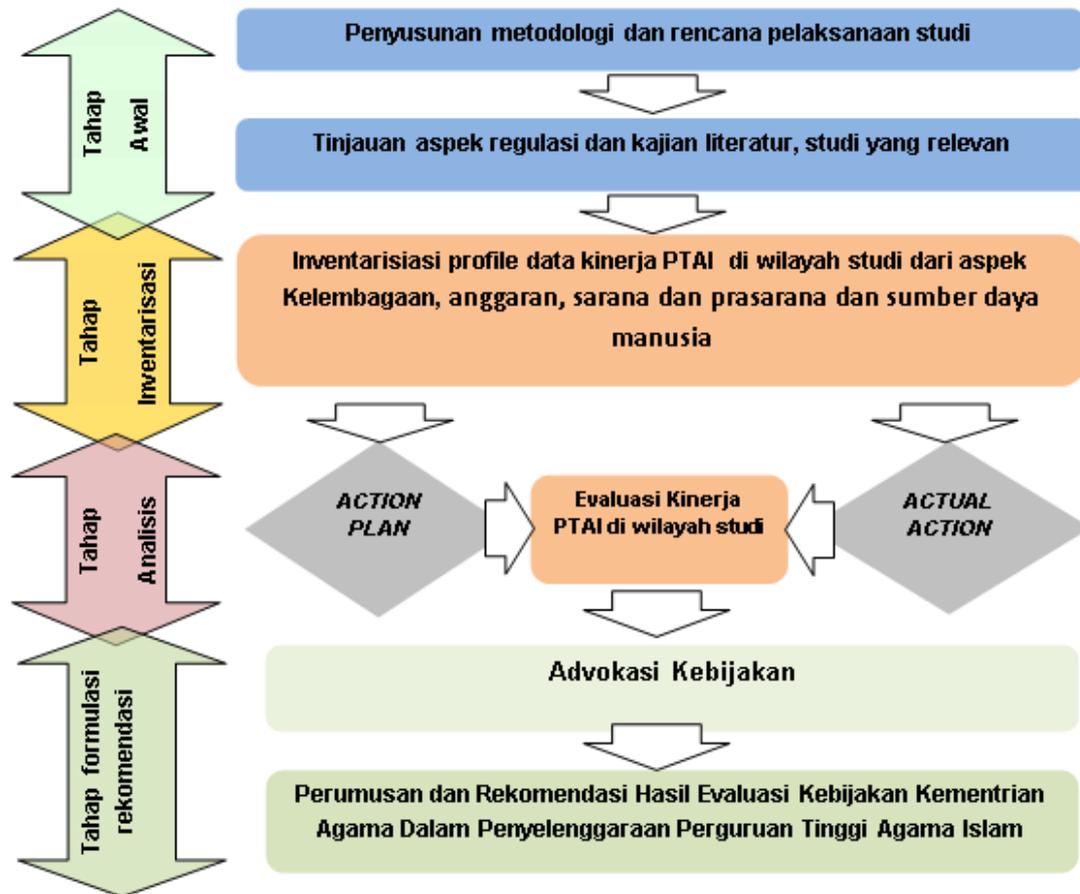
Tahapan pelaksanaan kegiatan studi, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 2. Meliputi : Tahap awal (persiapan), Tahap inventarisasi data, Tahap analisis, dan Tahap penyusunan konsep dan rekomendasi kebijakan



1. Tahap Awal (Persiapan)

Kegiatan pertama kali yang akan dilakukan tim studi dalam tahap awal (persiapan) ini adalah menyusun metodologi dan rencana pelaksanaan studi. Kegiatan yang lain adalah melakukan review/kajian terhadap kebijakan/regulasi terkait dengan penyelenggaraan PTAI dan kajian literatur dan/atau studi yang pernah dilakukan yang memiliki relevansi dengan sektor pendidikan. Penyusunan metodologi dan rencana pelaksanaan studi diperlukan guna tim studi untuk memformulasikan arah dan strategi pelaksanaan pekerjaan (studi). Metodologi studi berisikan kerangka pendekatan dan metode analisis yang akan diaplikasikan oleh tim ahli untuk melaksanakan pekerjaan studi ini. Rencana pelaksanaan studi memuat hal-hal penting terkait dengan jadwal pelaksanaan dan mekanisme penyajian hasil studi (pelaporan). Dalam rencana pelaksanaan studi, masing-masing tim ahli yang terlibat bertugas dan bertanggung jawab terhadap substansi pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Terkait dengan review regulasi atau kebijakan terkait studi ini, tim studi akan mengacu pada kerangka legislasi atau peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Kajian literatur dan studi terdahulu akan menjadi bagian dari kegiatan pada tahap persiapan untuk memperdalam pengetahuan dan informasi yang terkait dengan kajian mengenai kebijakan perguruan tinggi. Literatur atau referensi yang diacu dalam studi ini akan digali dari berbagai sumber.



Gambar 1.2. Tahapan Pelaksanaan Studi

2. Tahap Inventarisasi data

Kegiatan inventarisasi data bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pengembangan dan kinerja PTAI di beberapa lokasi studi. Proses pengumpulan data dalam studi ini, dilakukan melalui tahapan berikut ini

1. Data Primer

Pada tahap ini dilakukan pengamatan langsung di perusahaan dengan cara sebagai berikut:

- **Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh kondisi penyelenggaraan PTAI di wilayah studi.



- **Kuesioner**

Dengan cara membuat daftar pertanyaan (kuesioner Servqual) dan menyebarkannya kepada responden (PTAI) di wilayah studi.

- **Focus Group Discussion.**

Fokus group adalah upaya penilaian permasalahan dan solusinya dalam PTAI secara kualitatif.

2. Data Sekunder

Pada tahap ini akan dipelajari dan dianalisis dokumen terkait penyelenggaraan PTAI (renstra, regulasi, catatan-catatan/laporan kinerja, tata kerja dan struktur organisasi, perencanaan tenaga kerja, keuangan dan lain-lain) yang berada pada dua level:

- **Level Nasional**

Berupa dokumen terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama yang terkait penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga diperlukan data pendukung berupa surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama baik setingkat Menteri, Sekretaris Jenderal, maupun Direktur Jenderal.

- **Level Lokal Perguruan Tinggi**

Data diperlukan terkait dokumen dan pelaksanaan:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian
2. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.



3. Tahap Analisis

Tahap analisis dalam studi ini akan dikaji dengan mempertimbangkan secara seimbang mengenai perspektif-perspektif sebagai berikut :

1. Kelembagaan
2. Anggaran,
3. sarana dan prasarana dan
4. sumber daya manusia

Dalam studi ini, perspektif tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan sasaran strategik, indikator dan target kinerja PTAI dengan format sebagai berikut

Tabel 1.1. Perspektif Penilaian Kinerja PTAI

Perspektif	Sasaran	Indikator	Target	Inisiatif Strategik
Kelembagaan dan Akademik				
Anggaran				
Sarana dan Prasarana				
Sumber daya manusia				

Secara rinci, metode analisis kebijakan dalam penelitian ini diuraikan dalam sub bagian dibawah ini.



4. Tahap Penyusunan Konsep dan Rekomendasi Kebijakan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pelaksanaan pekerjaan (studi) ini. Dalam tahap ini, akan dirumuskan kerangka konsep Kebijakan Kementerian Agama. Perumusan ini akan dilakukan melalui proses lokarkarya.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pelaksanaan pekerjaan (studi) ini. Dalam tahap ini, akan dirumuskan kerangka konsep Kebijakan Kementerian Agama.

5. Metode Analisis Kebijakan

Tahap analisis dalam studi ini akan dikaji dengan mempertimbangkan secara seimbang mengenai aspek sebagai berikut : context, content, process, dan stakeholder.

a. Konteks Kebijakan

Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh dua variabel fundamental, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of policy). Konteks Kebijakan, yaitu lingkungan yang bisa berupa waktu, kultural, dan sosial dimana keputusan diambil.

Konteks kebijakan terdiri dari:

- Situational berkaitan dengan perubahan kepemimpinan, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, peristiwa-peristiwa penting, dan lain-lain.
- Struktural berkaitan dengan alokasi sumberdaya yang digunakan untuk melakukan intervensi, karakteristik lembaga dan penguasa,



- Kultural berkaitan dengan sikap/nilai-nilai yang berlaku yang berkaitan dengan situasi tradisi, modal, teknologi, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, dan lain-lain.

Dalam kaitannya Konteks Kebijakan, analisis yang dilakukan biasanya terkait dengan aktivitas-aktivitas antara lain:

- Analisis terhadap peluang-peluang dan hambatan-hambatan kontekstual,
- Menganalisis proses formal dan informal yang membentuk keputusan;
- Mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam pembuatan kebijakan (stakeholder)
- Menilai sumber daya kelompok-kelompok politik
- Memahami kepentingan, posisi dan komitmen kelompok-kelompok yang ada.

Berdasarkan *preliminary studies* yang telah dilakukan, teknik-teknik dalam analisis konteks kebijakan pada umumnya mencakup :

- Analisis berbagai aktor politik dalam lingkungan kebijakan yang ada (Analisis Stakeholders);
- Melakukan asesmen terhadap kekuasaan, posisi, dan kepentingan semua aktor;
- Menganalisis derajat dukungan setiap aktor;
- Membuat ilustrasi tekanan-tekanan yang mendukung atau menentang perubahan;
- Memahami jaringan-jaringan dan orang/lembaga yang berpengaruh terhadap kebijakan.

Secara detail teknik-teknik yang akan digunakan dalam riset kebijakan ini meliputi :



(i) Stakeholder Analysis

Cara ini disebut analisis stakeholder karena merupakan cara untuk mengumpulkan data yang bersumber dari pengakuan di antara para pimpinan, pembuat kebijakan, dan para peneliti yang terkait dengan stakeholder (bisa individu, kelompok dan organisasi) yang mempunyai kepentingan atau berpotensi untuk mempengaruhi tindakan atau tujuan organisasi atau arah kebijakan. Menurut Start and Hovland (2004), cara ini bisa digunakan untuk menentukan siapa yang perlu diketahui tentang riset kebijakan ini dan apa posisi dan kepentingannya. Hal-hal yang perlu dipetakan antara lain:

- Sifat kepentingan stakeholder
- Sejauhmana kepentingan stakeholder sinkron atau tumpang tindih
- Kepentingan stakeholder terhadap kebijakan yang diambil
- Pengaruh stakeholder terhadap kebijakan yang diambil

Kepentingan-kepentingan stakeholder yang relevan kemudian akan diidentifikasi ke dalam sebuah tabel; dan dikategorisasi dan dipisahkan antara utama dan tidak utama. Dalam kategori-kategori, juga dibedakan berbagai kelompok: misalnya, menurut kelompok jenis kelamin, usia, pendapatan dll. Cara ini diharapkan mampu mengungkap kepentingan yang tersembunyi atau dampaknya terhadap kepentingan mereka tersebut. Pada tabel tersebut, kita juga menunjukkan prioritas yang sebaiknya diberikan kepada stakeholder (1=sangat prioritas; dan 2= rendah).

Di samping itu, stakeholder juga akan dinilai menurut tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder. Kepentingan merupakan relevansi stakeholder atas kebijakan yang diambil; sementara pengaruh adalah kekuasaan yang dimiliki stakeholder atas



keberhasilan kebijakan. Jadi, kombinasi kedua variabel dalam setiap stakeholder bisa digambarkan secara grafis, x =kepentingan; dan y =pengaruh.

Stakeholder yang dimaksud antara lain adalah: Sekjen, Dirjen, Diktis, Biro Hukum, Biro Ortala, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Menpan, Menkeu, Kasubdit, dan Rektor 14 PTAI (2 UIN, 4 IAIN, 3 STAIN, 5 PTAIS, Wakil Masyarakat, Mahasiswa (S1, S2, S3).

(ii) Force – Field Analysis

Analisis ini ingin melihat berbagai kekuatan yang mempengaruhi isu tertentu. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat tekanan-tekanan yang mendukung atau menentang suatu kebijakan. Data akan diperoleh melalui wawancara, review literature dan FGD. Cara ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu kebijakan bisa dilaksanakan atau tidak (feasible atau tidak).

Langkah-langkah untuk analisis Force-field

- Membuat grafik; yang di sisi tengahnya dinyatakan rencana/kebijakan yang diusulkan
- Pada masing-masing sisi, ditulis apa saja faktor pendukung dan penentang;
- Pada setiap faktor pendukung dan penentang, diberikan skor 1=lemah; dan 5=kuat.

(iii) Policy Network Mapping

Langkah ini dimaksudkan untuk melihat siapa saja yang betul-betul terlibat dan bisa mempengaruhi kebijakan. Pemetaan ini bisa



membantu kita dalam memetakan siapa saja yang berpengaruh secara politik munculnya suatu kebijakan.

Elemen-elemennya antara lain:

- Apa saja poin-poin yang bisa memungkinkan suatu kebijakan dapat disetujui dan diimplementasi?
- Siapa aktor yang bertanggungjawab dalam setiap tahap perumusan kebijakan?
- Bagaimana staf bisa mendapatkan akses ke para aktor tersebut?
- Dengan cara seperti apa para staf ini mempengaruhi proses ini; apakah mereka memiliki ketrampilan tertentu atau kontak tertentu yang dapat membantu dalam proses ini?

(iv) Influence Mapping

Cara ini dikenal sebagai Stakeholder Influence Mapping, Power Mapping atau Arena of Influence. Cara ini mengidentifikasi individu dan kelompok dengan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan kunci. Cara ini akan membantu menyelidiki posisi dan motif setiap aktor dan saluran yang biasanya digunakan dalam berkomunikasi dengan orang-orang kunci. Cara ini dilakukan dalam rangka membuat diferensiasi antara pembuat keputusan dan orang-orang yang bisa mempengaruhi mereka.

b. Pemangku Kepentingan Kebijakan

Organisasi perguruan tinggi di Indonesia mempunyai tugas pokok menegakkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok tersebut didorong dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun institusi perguruan tinggi bersangkutan. Kebijakan perguruan tinggi berfungsi sebagai instrumen strategis yang menjadi



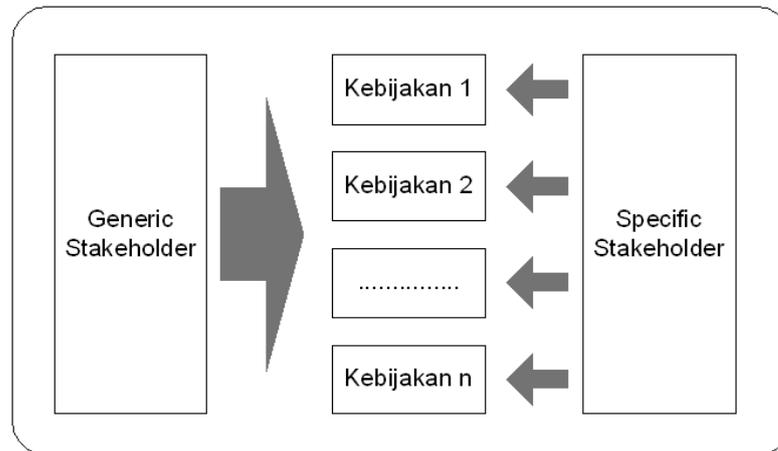
penghubung antara visi pemerintah dengan pelaksanaan operasional. Tentu hal tersebut, baik operasional maupun kebijakannya, akan berkaitan dengan para pihak yang disebut sebagai stakeholder. Hal tersebut ditegaskan oleh Olsen (2005) bahwa institusi pendidikan tinggi merupakan organisasi yang bergantung pada faktor eksternal. Berkaitan dengan pentingnya stakeholder, Stephen Covey di dalam Voge (2009) mengatakan bahwa stakeholder merupakan elemen paling penting di dalam sebuah organisasi. Namun demikian, pada pendidikan tinggi di Indonesia ternyata stake-holders belum menjadi bagian signifikan dari pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi (HELTS-Dikti, 2004). Untuk itulah, memahami secara tepat siapa sebenarnya yang dimaksud dengan stakeholder, menjadi penting. Namun demikian menyajikan daftar dan mengelompokkan stakeholder tidaklah mencukupi, melainkan harus terdapat pemahaman terhadap tipologi stakeholder (Voge, 2009).

Peranan Dan Pengaruh Stakeholder

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenag berkaitan dengan pendidikan tinggi bukanlah merupakan kebijakan yang berjumlah tunggal pada tingkatan implementatif. Beberapa kebijakan dikeluarkan sekaligus untuk saling mendukung dan mendorong terlaksananya suatu misi tertentu. Beberapa stakeholder (secara personal) ada kemungkinan hanya tertarik dengan salah satu atau beberapa bagian kebijakan. Sementara itu, ada beberapa stakeholder yang berkepentingan terhadap seluruh kebijakan yang ada. Untuk itu stakeholder dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu generic dan specific. Stakeholder yang mempunyai kepentingan terhadap seluruh kebijakan atau kebijakan secara umum pada Kementerian Agama dalam lingkup pengelolaan Pendidikan Tinggi, dalam penelitian ini disebut sebagai stakeholder generik. Sementara itu

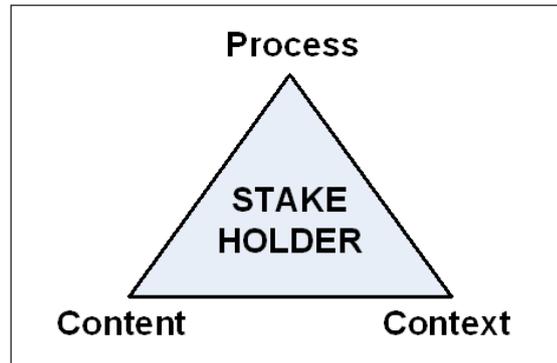


stakeholder yang hanya memiliki “interest” terhadap salah satu atau beberapa kebijakan digolongkan ke dalam stakeholder spesifik. Berikut diberikan gambaran ilustrasi kedua macam stakeholder tersebut.



Gambar 1.3. Generic and Specific Stakeholders

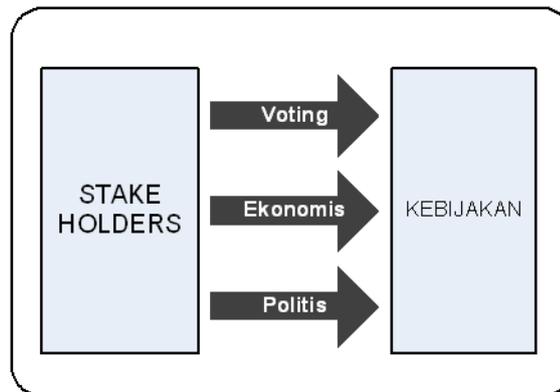
Stakeholder dapat didefinisikan sebagai, setiap individu, kelompok, atau institusi yang mempunyai ketertarikan atau “interest” terhadap kebijakan atau yang akan terdampak oleh kebijakan dimaksud. Menurut Prof Muhadjir Darwin, stakeholder adalah seseorang yang membuat, melaksanakan, dan menerima akibat dari kebijakan yang dibuat. Menurut Mitchell et.al. (1997) yang dimaksud dengan stakeholder adalah individu maupun kelompok yang mempengaruhi (affect) atau terpengaruhi (affected) oleh kebijakan, strategi, dan kinerja organisasi. Khusus untuk kebijakan, maka yang dimaksud dengan stakeholder adalah yang mempengaruhi atau terpengaruhi oleh kebijakan yang telah dibuat. Di dalam kebijakan, stakeholder mempunyai peran besar sebagai penentu ketiga aspek kebijakan yang meliputi proses, konten, dan konteks, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.4. Ruang lingkup Kebijakan

Terkait stakeholder, Neave (2002) menjelaskan bahwa terdapat dua isu penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, bahwa jumlah aktor dan kelompok yang dipertimbangkan sebagai stakeholder semakin berkembang. Kedua, bahwa institusi perlu menaruh perhatian kepada nilai-nilai dan apa yang dipercayai oleh stakeholder. Isu tersebut penting untuk dipertimbangkan oleh karena stakeholder memiliki peranan sangat besar bagi kesuksesan organisasi. Pada sebuah organisasi, stakeholder setidaknya memainkan lima peranan penting (Voge, 2009):

- a. Mitra, berfungsi mendukung kegiatan dalam bentuk pendanaan, staf, maupun arahan.
- b. Sponsor, berfungsi sebagai pendana utama
- c. Advokasi, berfungsi sebagai entitas yang walaupun tidak mempunyai kuasa mempengaruhi, tetapi mampu membantu untuk mempertahankan komitmen sponsor.
- d. Agen Perubahan, yang berperan secara langsung pada operasional.
- e. Target, merupakan individu ataupun kelompok yang menjadi sasaran kegiatan organisasi.



Gambar 1.5. Pengaruh Stakeholder terhadap Kebijakan

Oleh karena peranan stakeholder yang sedemikian penting, maka stakeholder dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Menurut Freeman, para stakeholder memiliki fondasi yang berbeda di dalam cara untuk memberikan pengaruh atau influence. Terdapat tiga ranah utama yaitu voting, ekonomis, dan politik (Freeman 1984). Pengaruh voting bermakna sebagai hubungan yang didasarkan pada pengaruh oleh karena kedudukan formal. Istilah tersebut tidak hanya ditujukan pada para stakeholder yang mempunyai hak untuk voting, namun meluas kepada para stakeholder yang mempunyai otoritas formal dalam pengambilan keputusan.

Voting merupakan bentuk pengaruh yang dijalankan secara formal oleh karena mempunyai aturan main secara formal dibakukan. Stakeholder yang menyediakan atau meminta imbalan dalam bentuk sumberdaya dapat mempunyai pengaruh secara ekonomis. Aturan hukum telah memberikan aturan main secara jelas tentang hubungan-hubungan dengan stakeholder yang menyangkut sumberdaya. Namun demikian biasanya institusi mempunyai perjanjian-perjanjian dengan para aktor, yang dalam pelaksanaannya dapat memunculkan pengaruh-pengaruh secara ekonomis. Pengaruh secara politik merupakan ruang bagi para



aktor untuk menggunakan partisipasi dan posisinya dalam rangka bernegosiasi untuk mempengaruhi keputusan institusi (Burrows 1999). Pengaruh ini dapat bekerja baik secara formal maupun secara informal melalui mekanisme lobi.

Analisis Stakeholder

Sedemikian besar peranan dan pengaruh stakeholder terhadap keberhasilan kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan suatu analisis untuk memahami karakteristik stakeholder terhadap sebuah kebijakan. Diperlukan suatu analisis stakeholder yang mampu menjelaskan keterkaitan antara stakeholder dengan kebijakan.

Majchrzak (1984) menegaskan bahwa untuk melakukan analisis stakeholder, maka langkah pertama adalah mengidentifikasi siapa saja yang menjadi key stakeholder. Berkaitan dengan kebijakan perguruan tinggi, maka stakeholder dapat berasal dari tiga lingkup utama yaitu negara, masyarakat sipil dan institusi pendidikan tinggi (Björkquist, 2009). Untuk lingkup Indonesia, maka yang dimaksud dengan para stakeholder adalah sebagai berikut:

- a. Unsur negara: parlemen, kementerian, BAN-PT, agensi pemerintah, pemerintah daerah
- b. Unsur masyarakat sipil: media, orang tua wali, masyarakat luas, LSM pemerhati pendidikan
- c. Unsur institusi: PTAI, Staf dan Dosen PTAI, Mahasiswa

Namun demikian, untuk akurasi perlu dilakukan identifikasi secara mendalam tentang siapa sesungguhnya para stakeholder tersebut. Maka dilakukan langkah-langkah identifikasi stakeholder sebagai berikut:

1. Membuat daftar calon stakeholder



2. Melengkapi daftar calon stakeholder berdasarkan studi kepustakaan dokumen kebijakan
3. Memeriksa daftar stakeholder kepada aktor kebijakan
4. Berdasarkan umpan balik dari aktor kebijakan, masukkan stakeholder yang belum terdaftar dan hilangkan calon stakeholder yang tidak relevan terhadap kebijakan.
5. Melakukan klasifikasi stakeholder

Form Identifikasi Stakeholder

No	Stakeholder	Kategori			Pengaruh			Lokasi		Keterlibatan
		Politik	Institusi Pendidikan	Publik	Politik	Voting	Ekonomi	Internal	Eksternal	
1										
2										
3										
4										
5										

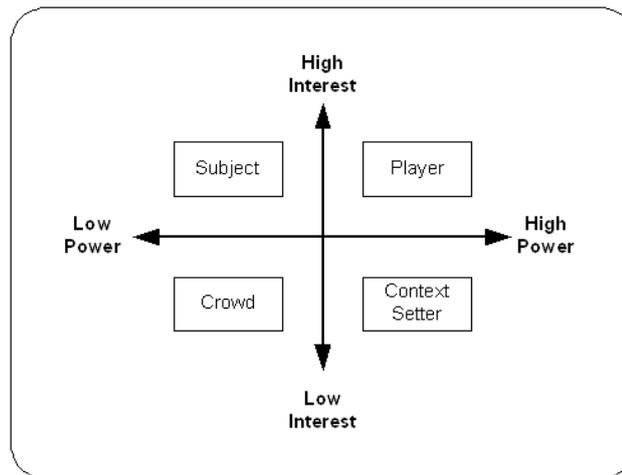
Untuk melakukan analisis, setelah stakeholder diidentifikasi secara jelas maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan stakeholder berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.

Bryson (2004) menyarankan untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan minat (interest) dan kekuatan (power) yang dimiliki ke dalam empat kelompok, yaitu:

1. Subjects, stakeholder yang memiliki kekuatan rendah tetapi mempunyai minat yang tinggi.
2. Players, stakeholder yang memiliki kekuatan dan minat yang tinggi.
3. Crowd, merupakan stakeholder kebanyakan, mempunyai minat dan kekuatan yang rendah.
4. Context setter, stakeholder yang mempunyai kekuatan tinggi tetapi minatnya rendah.



Pengelompokkan tersebut dapat dilakukan berdasarkan tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing unsur stakeholder. Lebih jelasnya, posisi masing-masing stakeholder diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 1.6. Peta Kekuatan dan Interest

Berdasarkan pengelompokan stakeholder seperti ditampakkan pada bagan tersebut, kemudian dilakukan analisis untuk melihat peranan dan pengaruh masing-masing unsur stakeholder terhadap kebijakan.

Selain dengan menggunakan instrumen di atas, analisis stakeholder dapat dilakukan dengan menggunakan analisis pengaruh (influence mapping). Instrumen ini berguna untuk mengetahui seberapa besar power, proximity, dan urgency yang dimiliki masing-masing stakeholder terhadap kebijakan.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis pengaruh dapat dirumuskan ke dalam tiga tahapan



1. Merumuskan stakeholder

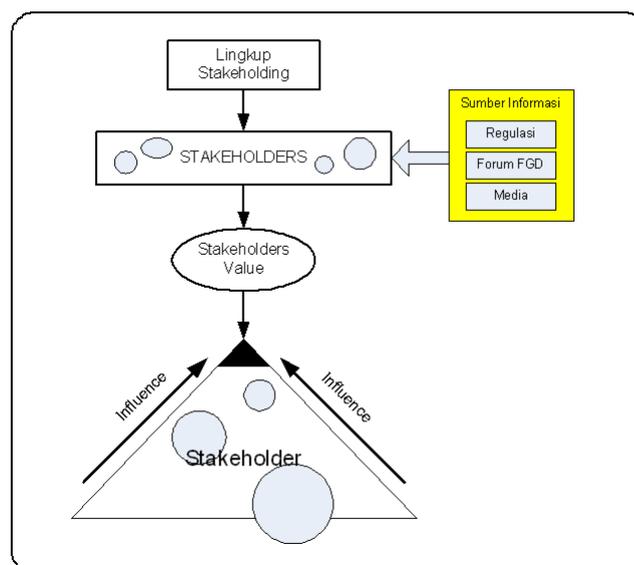
Peneliti merumuskan lingkup stakeholding dan siapa saja yang dimaksud dengan stakeholder. Data rumusan diperoleh dari analisis undang-undang, konten media, dan Focus Group Discussion.

2. Menentukan stakeholder value

Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai dan apa yang dipercayai oleh para stakeholder kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan. Identifikasi dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion bersama ahli terkait. Hasil temuan diskusi dianalisis secara logik dengan menggunakan teknik Analisis Deskriptif.

3. Kekuatan, Proximity, dan Urgency

Peneliti bersama dengan para stakeholder melakukan analisis untuk menentukan ukuran-ukuran Kekuatan, Proximity, dan Urgency. Hasil ukuran-ukuran ini kemudian digambarkan menjadi sebuah Stakeholder Influence Map untuk melihat seberapa besar pengaruh atau influence masing-masing stakeholder bagi pelaksanaan kebijakan.



Gambar 1.7. Proses Analisis Stakeholder



c. Proses Perumusan Kebijakan

Suatu kebijakan itu tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi memerlukan proses yang tidak sederhana. Anderson (1979) menetapkan proses kebijakan melalui lima proses, yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Dalam penelitian ini, analisis proses penyelenggaraan PTAI dilakukan perspektif kelembagaan dengan mengadaptasi proses kebijakan dari Anderson (1979) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (problem formulation)

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (formulation)

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

3. Penentuan kebijakan (adaPTAIon)

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

4. Implementasi (implementation)

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

5. Evaluasi (evaluation)

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?



Berdasarkan kelima proses tersebut dibuat sebuah alat bantu analisis menggunakan tabel sebagai berikut

Tabel 1.2. Persepektif Proses Penyelenggaraan PTAI dari Perspektif Kelembagaan

Proses	Perspektif Kelembagaan	
	Masalah	Inisiatif Strategik
Formulasi Masalah		
Formulasi Kebijakan	Diisi berdasarkan kondisi aktual masing-masing PTAI	
Penentuan Kebijakan		
Implementasi		
Evaluasi		

d. Isi Kebijakan

Menurut Grindle (1980), *Content of policy* adalah usaha untuk melihat apakah hakekat dan tujuan utama yang hendak dicapai oleh sebuah kebijakan, apakah kebijakan yang diambil dalam proses pengambilan keputusan merupakan suatu pilihan yang tepat, *feasible*, dan dapat dilaksanakan.

Seperti yang diketahui, tipe analisis kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

1. Tipe analisis akademis

Tipe analisis ini berfokus pada hubungan antara faktor determinan utama dengan isi kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan hakikat, karakteristik dan profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu maupun segi substansi.

2. Tipe analisis terapan

Tipe analisis ini lebih memfokuskan diri pada hubungan isi kebijakan dengan dampak kebijakan serta lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bertujuan untuk menemukan alternatif lebih baik dan bisa menggantikan kebijakan yang sedang dianalisis.



Pada analisis kebijakan dari perspektif isi (*content*) akan digunakan analisis deskriptif khususnya analisis isi (*content analysis*) yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan.

Holsti (1969) mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) sebagai sebuah metode untuk membuat kesimpulan secara obyektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakter dari suatu *obyek*. *Content analysis* merupakan suatu proses yang mengekstraksi informasi dari suatu teks dan membuatnya jelas melalui tema atau kata kunci yang sesuai dengan masalah penelitian.

Untuk penelitian yang bertujuan mengevaluasi kebijakan-kebijakan PTAI, *content analysis* dilakukan melalui beberapa tahapan:

- Analisis pada dokumen kebijakan yang menghasilkan beberapa tema besar atau *keyword* yang merepresentasikan aspek kelembagaan, anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia
- Identifikasi *current condition* pada PTAI berdasarkan tema besar (*big theme*) atau *keyword* dari dokumen-dokumen yang dianalisis (bisa melalui interview / questionnaire / dokumen / report yang dimiliki masing-masing PTAI)
- Mencari kesamaan *condition* dari beberapa PTAI yang diobservasi dan dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi PTAI di Indonesia
- Evaluasi kebijakan PTAI dapat diidentifikasi dari *current condition* di PTAI dengan *ideal condition* PT berdasarkan model HELTS (?) atau *actual plan*?



Dalam penelitian ini, lingkup Kebijakan yang dimaksud meliputi :

1. Pengembangan kelembagaan dan akademik
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana
3. Pengembangan Sistem Keuangan dan Anggaran
4. Pengembangan SDM



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN LITERATUR

(CONTEXT AND PROCESS ANALYSIS)

A. STUDI KEBIJAKAN

1. Studi Kebijakan

Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Weimer and Vining (1998) menyampaikan bahwa :

....." The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision".....

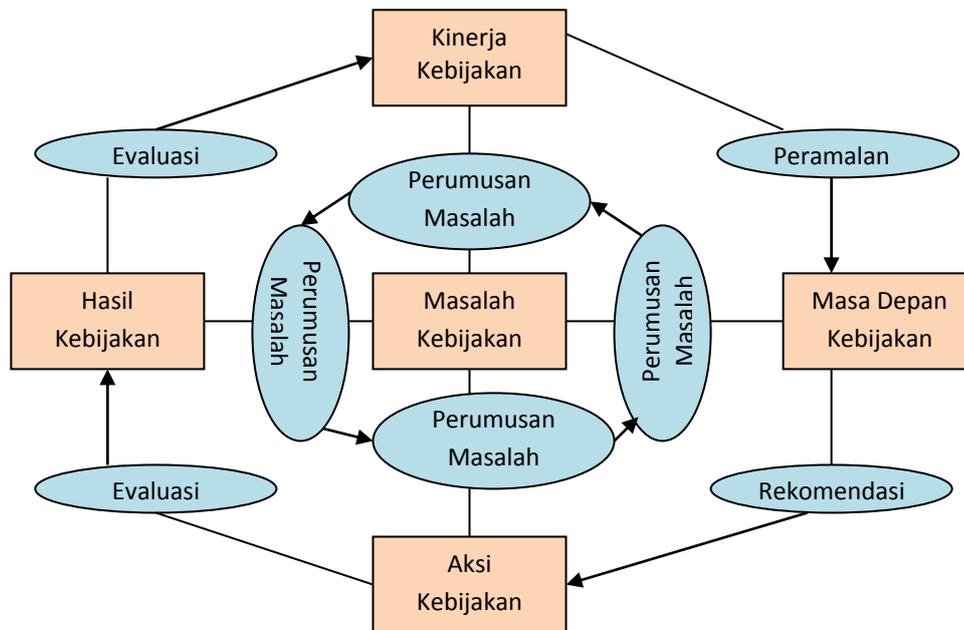
Jadi, analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.



2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu dari prosedur dalam analisis kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan publik pada hakikatnya menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu definisi (perumusan masalah), prediksi (peramalan), preskripsi (rekomendasi), dan evaluasi yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari yang berfungsi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah atau pengatasan masalah. Ke lima prosedur tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1. Analisis Kebijakan yang berorientasi pada masalah
(Diadopsi dari Dunn, 2000)

Mengenai pengertian Evaluasi Vackmias, seperti dikutip Howlett and Ramesh (1995) mendefinisikan evaluasi kebijaksanaan sebagai suatu pengkajian secara sistematis, empiris terhadap akibat-akibat dari suatu kebijaksanaan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kebijaksanaan tersebut. Sedangkan Dunn (1998) menyamakan evaluasi dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka



(rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dengan demikian Evaluasi kebijakan, tidak lain adalah mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, dan mengukur seberapa jauh telah terjadi penyimpangan dan ketidakpastian.

Evaluasi dapat dibedakan menjadi:

- **Pra Evaluasi**, yakni evaluasi yang dilakukan pada saat program belum berjalan/beroperasi pada tahap perencanaan. Evaluasi pada periode ini biasanya difokuskan pada masalah-masalah persiapan dari suatu kegiatan. Dapat pula evaluasi itu didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya yang secara substansial memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Atau dapat pula merupakan sebuah studi kelayakan (*feasibility*) dari sebuah program untuk dilaksanakan. Evaluasi pada periode ini biasanya meliputi aspek keuangan dan analisis ekonomis dari suatu kegiatan (*cost and benefit analysis*).
- **Evaluasi** pada saat program tengah berjalan, yang dikenal dengan *on going evaluation* atau *in operation evaluation*, atau oleh Bintoro (1988) disebut juga dengan *mid term evaluation*. Evaluasi pada periode ini biasanya difokuskan pada penilaian dari setiap tahap kegiatan yang sudah dilaksanakan, walaupun belum bisa dilakukan penilaian terhadap keseluruhan proses program. Dalam prakteknya, evaluasi seperti ini berbentuk seperti laporan triwulan, semester, atau tahunan (untuk kegiatan jangka menengah). Pada saat program atau kegiatan tengah berjalan analisis evaluasi bersumber pada hasil pemantauan yang dilaksanakan pada tahapan-tahapan kegiatan secara berkelanjutan dan



akan memberikan umpan balik untuk perencana dan pelaksana pembangunan.

- **Evaluasi** setelah program selesai atau setelah program berakhir. Evaluasi ini biasa disebut *ex post evaluation*. Pada evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap seluruh tahapan program yang dikaitkan dengan tingkat keberhasilannya, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rumusan sasaran atau tujuan program.

3. Sifat Evaluasi

Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (Apa yang terjadi?), proses (Bagaimana terjadinya?), atau penyebab (Mengapa terjadi?) tetapi nilai (Berapa nilainya?). Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya :

1. Fokus nilai, evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai terhadap manfaat atau kegunaan dari suatu kegiatan, program atau kebijakan. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijaksanaan. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta-Nilai, hasil evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti-bukti (fakta) tetapi juga terhadap nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh



masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi masa kini dan masa lalu, evaluasi mempersoalkan hasil sekarang dan masa lalu. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-preinis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

4. Fungsi Evaluasi

Di dalam analisis kebijakan, evaluasi memiliki beberapa arti penting. Menurut Dunn (1998) fungsi utama dari evaluasi dalam analisis kebijakan adalah:

1. Hal yang paling penting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah dicapai yang berkaitan



seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. Nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar pemilihan tujuan dan sasaran tersebut dapat diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target serta dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan sasaran dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai dari berbagai kepentingan kelompok maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas seperti aspek teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

5. Pendekatan Evaluasi

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan. Aspek pertama adalah penggunaan berbagai metoda untuk memantau hasil kebijakan publik dan aspek kedua adalah aplikasi serangkaian nilai yang digunakan untuk menentukan kegunaan hasil kebijakan publik terhadap beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya kedua aspek tersebut menunjukkan adanya fakta dan premis nilai dalam setiap tuntutan evaluatif. Namun banyak aktivitas yang dikatakan sebagai evaluasi dalam analisis kebijakan, tetapi sebenarnya bukan evaluasi karena tidak



memperhatikan tuntutan evaluatif dan hanya sebagai tuntutan faktual. Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan, maka menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan decision theory evaluation (DTE).

1. Evaluasi Semu (psuedo evaluation)

Merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu atau kelompok masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari pendekatan ini adalah bahwa ukuran manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi Formal (formal evaluation)

Merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari pendekatan ini adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal digunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik yaitu untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya



adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan.

Salah satu tipe utama evaluasi formal adalah evaluasi sumatif yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan sasaran formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif diciptakan untuk menilai produk-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantap. Lalu selain evaluasi sumatif ada juga evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran formal. Jadi perbedaan keduanya adalah persolan derajat.

Evaluasi formal dapat bersifat sumatif atau formatif, tetapi juga dapat meliputi kontrol langsung maupun tidak langsung terhadap masukan kebijakan dan proses-proses. Dalam evaluasi langsung evaluator dapat memanipulasi secara langsung tingkat pengeluaran, campuran program, atau karakteristik kelompok sasaran. Artinya evaluasi dapat mempunyai satu atau lebih karakteristik eksperimentasi sosial sebagai pendekatan terhadap monitoring. Sedangkan dalam kasus evaluasi tidak langsung, masukan dan proses kebijakan tidak dapat secara langsung dimanipulasi. Masukan dan proses tersebut harus dianalisis secara retrospektif berdasarkan pada aksi-aksi yang telah dilakukan.



Tipe tipe Evaluasi Formal.

KONTROL TERHADAP AKSI KEBIJAKAN	ORIENTASI TERHADAP PROSES KEBIJAKAN	
	Formatif	Sumatif
Langsung	Evaluasi perkembangan	Evaluasi eksperimental
Tidak langsung	Evaluasi proses retrospektif	Evaluasi hasil retrospektif

Kemudian terdapat beberapa variasi dari evaluasi formal yaitu:

a. Evaluasi perkembangan

Evaluasi perkembangan menunjuk pada kegiatan kegiatan/aktivitas evaluasi yang secara eksplisit diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari hari staf program. Evaluasi perkembangan berguna untuk mengalihkan staf dari kelemahan yang baru dimulai atau kegagalan yang tidak diharapkan dari program dan untuk meyakinkan layak tidaknya operasi yang dilakukan mereka yang bertanggung jawab terhadap operasinya. Evaluasi perkembangan, karena bersifat formatif dan meliputi kontrol secara langsung, dapat digunakan untuk mengadaptasi secara langsung pengalaman baru yang diperoleh melalui manipulasi yang sistematis terhadap variabel masukan dan proses.

b. Evaluasi Proses retrospektif

Evaluasi proses retrospektif, yang cenderung dipusatkan pada masalah masalah dan kendala kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan dan program, tidak memperkenankan dilakukannya manipulasi langsung terhadap masukan (misalnya pengeluaran) dan proses (misalnya sistem pelayanan alternatif). Evaluasi proses retrospektif mensyaratkan adanya sistem pelaporan internal yang mantap yang memungkinkan pemunculan yang berkelanjutan informasi yang berhubungan dengan program. Evaluasi proses retrospektif mensyaratkan sistem informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sering sulit untuk diciptakan.



c. Evaluasi eksperimental

Evaluasi eksperimental harus memenuhi persyaratan yang agak berat sebelum rancangan tersebut dapat diterapkan: (1) serangkaian variabel variabel "treatment" yang dimanipulasi secara langsung dan terdefiniskan secara jelas dan yang dirumuskan secara operasional; (2) strategi evaluasi yang memungkinkan dirumuskannya kesimpulan yang dapat digeneralisasikan secara maksimum menyangkut kinerja terhadap kelompok target atau sasaran yang sejenis (validitas eksternal); (3) strategi evaluasi yang dapat mengurangi kesalahan sekecil mungkin dalam menginterpretasikan kinerja kebijakan sebagai hasil masukan dan proses kebijakan yang dimanipulasi (validitas internal); (4) sistem pemantauan yang menghasilkan data yang reliable tentang hubungan timbal balik antar kondisi awal yang kompleks, kejadian kejadian yang tidak tampak, masukan, proses, keluaran dan efek samping dan efek ganda. Karena persyaratan metodologis yang diharapkan ini jarang terpenuhi evaluasi eksperimental biasanya tidak mencapai tingkat eksperimen murni, dan ditujukan sebagai "eksperimental semu".

d. Evaluasi hasil retrospektif

Evaluasi hasil retrospektif juga meliputi pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan--masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi. Paling jauh adalah kontrol secara tidak langsung atau kontrol statistik yaitu evaluator berusaha mengisolasi pengaruh dari banyak faktor lainnya dengan menggunakan metode kuantitatif.



B. SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan nasional disusun dengan tujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya **integrasi**, sinkronisasi, sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, **antarfungsi pemerintah** maupun antara pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Pendidikan Islam merupakan integrasi dari kerangka pembangunan dalam fungsi pendidikan dan fungsi agama.

Dalam RPJP 2005-2025 yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, kedudukan pembangunan fungsi pendidikan dan agama tak terpisahkan dalam kerangka pembangunan nasional di bawah payung pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Rencana strategik pembangunan Pendidikan Islam periode 2004-2009 telah berupaya meletakkan dasar bagi arah pembangunan Pendidikan Islam yang mengintegrasikan kedua fungsi tersebut. Perumusan Rencana strategik Pendidikan Islam 2010-2014 melanjutkan pendekatan integratif tersebut sehingga memberikan kontribusi dan arti penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pendidikan Islam diselenggarakan untuk: (a) memenuhi tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial dalam **melindungi hak-hak anak untuk memeluk agamanya meliputi**



pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama, serta (b) memberikan layanan pendidikan untuk **meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 43 ayat (1,2).

Secara substansi, Pendidikan Islam merupakan subsistem dalam sistem pendidikan nasional yang diatur melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan pendidikan yang memuat substansi dan pendekatan nilai-nilai agama adalah pendidikan umum dengan kekhasan Islam, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (pasal 12, 17, dan 30). Oleh karena itu, istilah Pendidikan Islam yang dipergunakan dalam Renstra ini merujuk kepada (i) madrasah dan perguruan tinggi Islam sebagai lembaga pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, (ii) pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan, dan (iii) pendidikan keagamaan Islam

2. Posisi Strategis Pendidikan Islam

Posisi strategis Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mengalami perubahan mendasar melalui proses perjalanan sejarah yang panjang, di mulai dari eksistensi dan kontribusi lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak pra-kemerdekaan, yaitu berupa pondok pesantren dan madrasah. Eksistensi dan kontribusi pondok pesantren dalam dunia pendidikan di Tanah Air bahkan sudah di mulai jauh sebelum sistem pendidikan klasikal modern diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19. Belakangan, sistem pendidikan klasikal modern ini diadaptasi oleh para pemuka muslim Indonesia dalam bentuk kelembagaan madrasah (Islamic Schools) yang memasukkan muatan pendidikan umum selain pendidikan keagamaan dalam kurikulum pembelajarannya.



Setelah Indonesia merdeka, pembangunan Pendidikan Islam masih berkuat pada pengembangan sistem pendidikan dan kelembagaannya. Perkembangan yang menggembirakan pada masa Orde Lama adalah pendidikan agama Islam telah dilaksanakan di sekolah negeri melalui edaran Ki Hajar Dewantara serta Penetapan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor: 1285/K.7 dan 1142/BHG.A tanggal 12 Desember 1946 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bersama Nomor: 17678/Kab dan K/9180 tanggal 16 Juli 1951. Selanjutnya Tap MPR No II/MPRS/1966 secara tegas telah menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran di sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Akan tetapi dalam kenyataannya masih ada beberapa satuan pendidikan yang tidak melaksanakan.

Dalam dua dekade terakhir, telah terjadi reformasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang ditandai oleh adanya tiga perubahan mendasar. Pertama, terbitnya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meletakkan madrasah sebagai pendidikan umum berciri khas Islam. Sementara itu dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Kedua, terbitnya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang memperjelas posisi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Ketiga, ketentuan tentang pendirian PTAIN yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden, sebagaimana pendirian perguruan tinggi umum lainnya.

Dalam pembangunan pendidikan nasional, Pendidikan Islam berpegang teguh kepada landasan ideologi pembangunan bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa ideologi negara Indonesia berpijak kepada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegasan peran Pendidikan Islam dalam rangka mengisi pembangunan dinyatakan dalam pasal 31 amandemen



keempat UUD 45 ayat iii dan iv yang menyatakan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang; Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Selanjutnya, ditegaskan dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : (a) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Mengacu kepada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 60 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 43, Pendidikan Islam menjalankan amanah untuk melindungi hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran sekaligus menjalankan kewajiban Negara dalam pembinaan dan pengamalan ajaran agama.

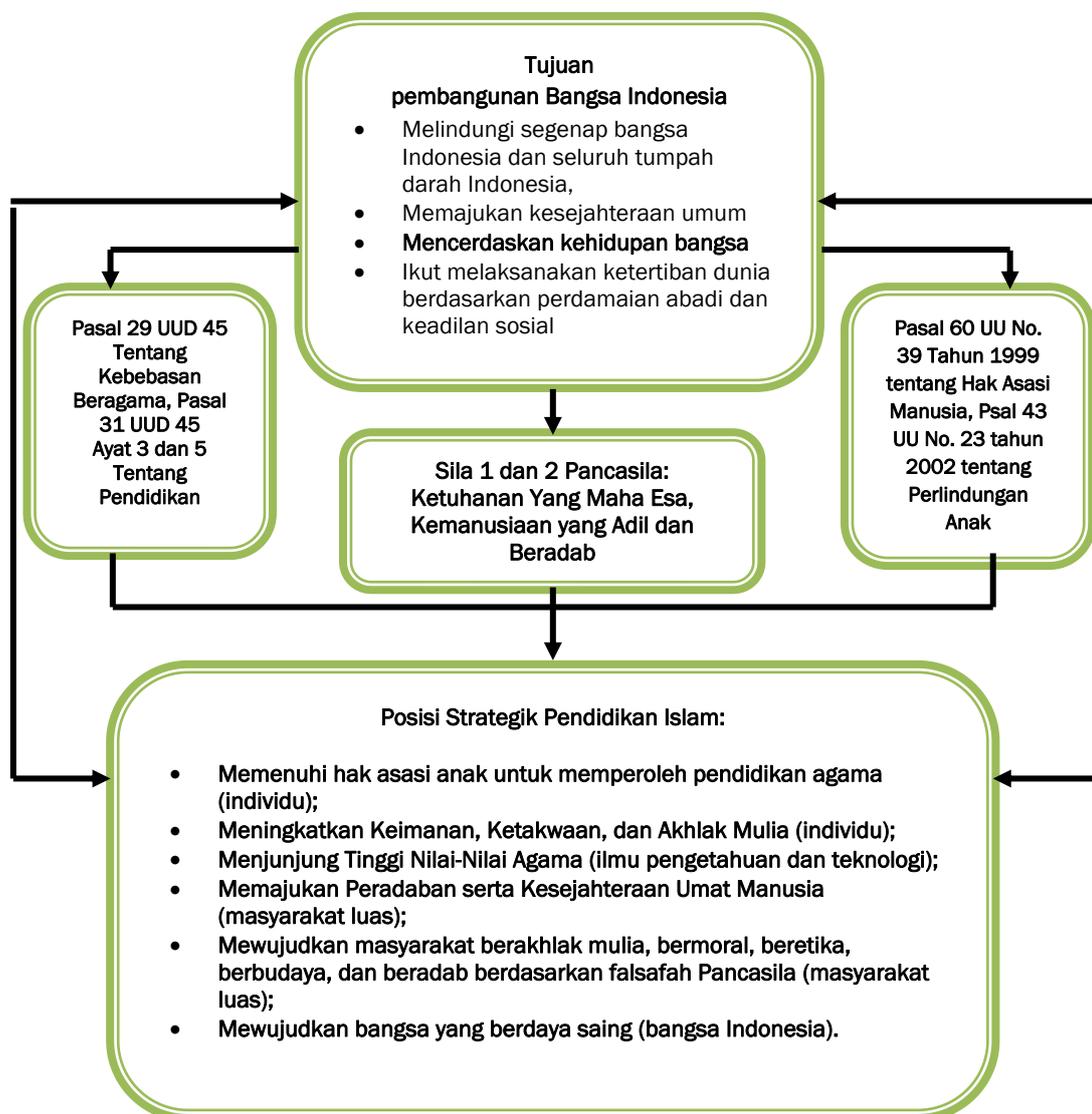
Keberadaan Pendidikan Islam juga dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama pembangunan nasional jangka panjang Indonesia, yaitu (a) sebagai wahana untuk melaksanakan tugas negara, masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi hak asasi anak untuk memperoleh pendidikan agama, (b) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dan (c) mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Dalam dimensi pemenuhan hak anak, Pendidikan Islam berperan sebagai pelaksana tugas negara dalam melindungi terwujudnya pemenuhan salah satu hak asasi manusia melalui penyediaan layanan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama Islam. Dalam dimensi perwujudan masyarakat



berakhlak mulia, Pendidikan Islam berperan sebagai penyedia layanan pendidikan yang relevan dan sebagai instrumen dalam pembangunan kondisi mental-spiritual masyarakat. Pada dimensi penyedia landasan daya saing bangsa, Pendidikan Islam memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk menjawab tantangan global terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang unggul baik di bidang ilmu pengetahuan maupun karakter tangguh dalam sikap dan perilaku beragama.

Pendidikan Islam dalam bingkai ideologi negara dan misi jangka panjang pembangunan Indonesia menempati enam posisi strategis yang diharapkan mampu mewarnai dinamika pembangunan bangsa Indonesia (gambar 1.1). Keenam posisi strategis tersebut mewarnai pada empat aspek pembangunan pendidikan dan agama pada peserta didik, ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat secara luas, dan bangsa Indonesia. Pemenuhan hak asasi anak dan peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia merupakan kata kunci yang dimiliki oleh Pendidikan Islam dalam aspek pembangunan individu. Sedangkan memajukan nilai-nilai agama menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pembangunan masyarakat secara luas, dua posisi strategis Pendidikan Islam dipertegas dengan memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, dan mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Sedangkan pada pembangunan bangsa Indonesia, Pendidikan Islam diharapkan mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.



Gambar 2.2.

Posisi Pendidikan Islam dalam Bingkai Ideologi Negara

3. Kerangka Dasar Pendidikan Islam

Ada tujuh kerangka dasar yang melandasi implementasi pendidikan Islam di Indonesia. *Al-mabadi' al-sab'ah* atau tujuh kerangka dasar pembangunan Pendidikan Islam yang mendasari implementasi pembangunan Pendidikan Islam terdiri dari:

(i) Nilai-nilai agama dan budaya luhur sebagai spirit:

Pendidikan Islam mengintegrasikan nilai Islam dan budaya luhur dalam proses pembelajaran.



(ii) Berbasis partisipasi masyarakat:

Pendidikan Islam diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat guna memenuhi kebutuhan aspirasi warganya, oleh sebab itu dilaksanakan atas dasar partisipasi masyarakat.

(iii) Berorientasi pada kemandirian yang tinggi:

Pendidikan Islam berpijak kepada prinsip kemandirian yang tinggi di tingkat satuan pendidikan karena bertumpu kepada partisipasi masyarakat.

(iv) Bersifat majemuk dari aspek jalur, jenjang, dan jenis:

Pendidikan Islam bersifat majemuk dari berbagai aspek sehingga memberikan warna tersendiri dalam sistem pendidikan nasional.

(v) Nilai-nilai demokratis, keadilan, dan kesetaraan:

Pendidikan Islam menunjung tinggi nilai-nilai demokratis, berkeadilan, dan berkesetaraan sehingga memberikan pemihakan yang tinggi kepada kelompok masyarakat marjinal.

(vi) Perhatian Pemerintah tanpa Mengurangi Ciri Khas:

Dengan jelasnya kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, perhatian pemerintah semakin dipertegas secara hukum dan peraturan perundangan, sehingga baik pemerintah Pusat maupun daerah mempunyai kewajiban yang sama dalam memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam dengan tetap mempertahankan ciri khas dan kemandiriannya.

(vii) Berwawasan kebangsaan Indonesia:

Pelaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia memiliki nilai wawasan kebangsaan Indonesia yang selaras dengan muatan pendidikannya hingga proses tata kelolanya.



4. Landasan Hukum Pendidikan Islam

Kebijakan pembangunan Pendidikan Islam berpijak kepada dasar-dasar hukum yang terkait dengan pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang agama, agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan warga negara yang kritis (*critical mass*) dalam rangka mendorong kerukunan umat beragama, memperkuat konsolidasi demokrasi, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan. Peran ini dicapai dalam koridor amanat hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berikut disampaikan dasar hukum pokok yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan Islam mengawal perannya dalam sistem berbangsa dan bernegara.

- (i) UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang menyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang;
- (ii) UUD 1945 Pasal 28 E amandemen ke 2 pasal 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- (iii) UUD 1945 Pasal 29 Tentang Agama, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan dan hak asasi manusia dalam menjalankan agamanya;



- (iv) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12 yang berisi bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai hak asasi manusia
- (v) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 13 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi;
- (vi) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 55 yang menyatakan Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali;
- (vii) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat (1) yang menegaskan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- (viii) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) yang menyatakan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- (ix) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 43 ayat (1,2), yang menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama Islam;
- (x) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 48-54 yang menegaskan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar, memberikan kesempatan seluas-luasnya, yang diarahkan



kepada pengembangan sikap dan kemampuan anak, penghormatan hak asasi, pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai nasional;

- (xi) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- (xii) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 yang menegaskan Pengakuan yang sama antara MI dengan SD, MTs dengan SMP, MA dengan SMA, dan MAK dengan SMK
- (xiii) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat (1-4), yang menyatakan bahwa (i) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (ii) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (iii) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; (iv) Pendidikan keagamaan berbentuk Pendidikan Diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis;
- (xiv) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
- (xv) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur status, standar kualifikasi dan



kompetensi, upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen sebagai komponen utama pendidikan, serta kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendanainya;

- (xvi) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang memberikan landasan dalam penyelenggaraan negara atas dasar azas kepastian hukum, tertib, berpihak kepada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
- (xvii) PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 2-7, yang menegaskan bahwa Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program kesetaraan diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama;
- (xviii) PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 12, yang menyatakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan, serta Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (xix) PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 14-26; yang mempertegas bentuk Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan Pendidikan Diniyah dan pesantren, dalam jalur formal, nonformal, dan informal, dan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (xx) PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang



- menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan menteri agama;
- (xxi) PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan menteri agama;
 - (xxii) PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 2 yang menyatakan bahwa Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - (xxiii) PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 9 ayat 1 Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal tanpa memungut biaya.

5. Peta Pendidikan Islam

Pembangunan Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional secara jelas didudukkan dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal 17 dan 18 UU 20 Tahun 2003 tentang pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara jelas mengatur bentuk pendidikan dasar dan menengah, yakni SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat untuk pendidikan dasar, serta SMA, SMK, MA, MAK dan bentuk lain yang sederajat untuk pendidikan menengah. Landasan hukum yang diacu juga memuat komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kesepakatan antar negara di bidang pembangunan pendidikan. Tujuan pembangunan millenium di bidang pendidikan merupakan salah satu



kesepakatan antar negara yang harus dijalankan pemerintah Indonesia dalam pembangunan pendidikan.

Pada aspek program dan kelembagaan, Pendidikan Islam diselenggarakan mulai dari pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, hingga jenjang pendidikan tinggi pada jalur formal maupun non-formal. Sementara ditinjau dari jenisnya, Pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu: *pertama*, pendidikan agama Islam, yakni jenis pendidikan yang diselenggarakan dengan fokus pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan; *kedua*, pendidikan umum dengan kekhasan Islam yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal; *ketiga*, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan nonformal.

Ketiga jenis pendidikan di atas dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama. Dilihat dari sistem pendidikan nasional yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional, jenjang, jenis dan jalur pendidikan Islam beserta kelembagaannya dapat disejajarkan dalam tabel berikut :

LAPORAN HASIL PENELITIAN : EVALUASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA
DALAM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM



Jenis Je Jenja ng	Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan			Pendidikan Umum Berciri Islam		Pendidikan Keagamaan Islam				
	Formal	Non - Formal	Non -Formal Tanpa Jenjang	Formal	Non -Formal	Diniyah			Pondok Pesantren	
						Formal	Non -Formal Berjenjang	Non -Formal Tanpa Jenjang	Formal	Non -Formal
Tinggi	MK PAI PT		MP PAI pada kursus-kursus	PT Islam		PTKI	DT 'Aly	Majelis Taklim, Pendidikan Alquran, dll.	Ma'had Aly	Ma'had Takhasusus
Menengah	MP PAI SMA/LB. SMK	MP PAI Paket C		MA, MA Kej.	Paket C	PDMA	DT Ulya		Muadalah	Pengajian Kitab Ulya
Dasar	MP PAI SD/LB. SMP/LB	MP PAI Paket A, Paket B		ML MTs	Paket A, Paket B, Wajar Dikdas Salafiyah Ula dan Wustha	PDD, PDMP	DT Awaliyah, DT Wustha			Pengajian Kitab Ibtidai & Tsanawi
PAUD	MP PAI TK	MP PAI		RA/BA			TKQ			
Jumlah Satuan Pendidikan	241.488	N.A.	N.A.	58.965	N.A.	N.A.	47.405.		16.015.	
Jumlah Peserta didik	33.829.895 (tidak termasuk TK)	N.A.	N.A.	9.052.410	N.A.	N.A.	4.242.056.		3.190.394.	

Gambar 2.3. Peta program dan lembaga pendidikan islam dalam struktur pendidikan nasional

6. Jenis, Jenjang, dan Jalur Pendidikan Islam

Pendidikan Islam melingkupi tiga jenis pendidikan, yaitu pendidikan keagamaan Islam, pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, dan pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh berbagai satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Ketiga jenis pendidikan tersebut berada dalam yurisdiksi pengelolaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dengan sasaran layanan yang sangat luas. Data mengenai sasaran layanan Pendidikan Islam disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Lembaga, Peserta Didik, dan Tenaga Pendidik
Dalam Sub-sistem Pendidikan Islam Tahun 2008

No.	Jenis Pendidikan Islam	Lembaga	Peserta Didik	Pendidik
1.	Pendidikan Keagamaan Islam	360.450	26.307.475	1.642.333
2.	Madrasah	58.228	6.874.503	650.754
3.	Pendidikan Tinggi Islam	591	579.742	35.997
4.	Pendidikan Agama Islam di Satuan Pendidikan	246.996	36.317.116	168.184
Jumlah		666.265	70.078.836	2.497.268

Sumber: Data EMIS TP 2007-2008, Data Dit. PAIS Tahun 2008, Data Dit. Diktis TA 2007-2008



C. PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM SAAT INI

Perumusan kebijakan Pendidikan Tinggi Islam saat ini masih dilakukan dengan kurang mempertimbangkan hasil penelitian dan pengembangan. Berbagai kegiatan seperti pencitraan Pendidikan Tinggi Islam dan peningkatan mutu lulusan lembaga Pendidikan Tinggi Islam masih dilaksanakan dengan tanpa menggunakan basis hasil penelitian dan studi yang baik. Begitu juga dengan perumusan dan evaluasi kebijakan lain di bidang perluasan akses dan manajemen dan tata kelola Pendidikan Tinggi Islam. Di sisi lain, kurangnya anggaran pendukung bagi unit yang menangani penelitian tentang kebijakan Pendidikan Islam menegaskan kelemahan sistem pendukung perumusan kebijakan Pendidikan Islam. Di samping itu, efektivitas penelitian yang dilakukan masih belum sempat dievaluasi secara kritis tentang kegunaannya dalam pengembangan kebijakan Pendidikan Islam

Perumusan kebijakan Pendidikan Tinggi Islam masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan jika berpijak kepada hasil penelitian yang baik. Peluang lain untuk terus mengembangkan kebijakan Pendidikan Tinggi Islam dapat dilakukan dengan menegaskan arah kebijakan yang menuju kepada :

- (i) keutuhan antar program pendidikan Islam di madrasah dengan PTU dan PTAI,
- (ii) kesinambungan dan terintegrasikannya *dirasah islamiyah* dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi.
- (iii) keselarasan dan kontekstualitas materi keislaman dengan kehidupan nyata,
- (iv) keterpaduan antara *al uluum al-diiniyyah* dengan *al-uluum al-dunyawiyah*, dan
- (v) memelihara dan menghargai tradisi keilmuan Islam di lembaga pendidikan keagamaan yang ada, seraya memberikan bimbingan ke arah



kemampuan manajerial dan profesional bagi para pengelola dan penyelenggara pendidikan.

D. PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Pendidikan Tinggi Islam (PTAI) yang tersebar di Indonesia di kelompokkan ke dalam Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Tugas utama PTAI adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan variasi jenis yang merefleksikan kondisi mutu dan tingkat perkembangannya. Oleh sebab itu, penggambaran kondisi PTAI lebih tepat dilakukan dengan menggunakan kategorisasi jenis tersebut, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan PTAIS.

Tabel 2.2.

Jumlah Lembaga, Peserta Didik, dan Pendidik
Sasaran Pembangunan Pendidikan Tinggi Islam di Satuan Pendidikan

No.	Jenis PTAI	Jumlah		
		Lembaga	Peserta Didik	Pendidik
1.	UIN	6	71.402	4.972
2.	IAIN	13	52.027	4.429
3.	STAIN	33	52.149	3.961
4.	PTAIS	539	394.489	22.407
Jumlah		591	570.067	35.769

Sumber : Data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun Akademik 2007-2008

Adapun jumlah pendidik menurut status dan kualifikasi pendidikan pada PTAI sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.

Jumlah Pendidik Menurut Status dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jenis PTAI	Status Ketenagaan			Kualifikasi Pendidikan			
		Tetap	Tidak Tetap	Jumlah	S-1	S-2	S-3	Jumlah
1.	UIN	2.698	2.274	4.972	1.216	3.206	550	4.972
2.	IAIN	2.956	1.473	4.429	1.505	2.623	301	4.429
3.	STAIN	2.461	1.500	3.961	1.458	2.357	146	3.961
4.	PTAIS	9.539	12.868	22.407	10.803	9.960	1.644	22.407
Jumlah		17.654	18.115	35.769	14.982	18.146	2.641	35.769

Sumber : Data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam TA 2007-2008



Kekuatan utama yang dimiliki oleh Pendidikan Tinggi Islam terletak pada: Eksistensi Pendidikan Tinggi Islam, terutama UIN yang telah diakui masyarakat, civitas akademika IAIN yang memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman, bersifat demokratis, semakin meningkatnya gelar master dan doktor bagi para tenaga pengajar. Kelemahan yang dimiliki oleh Pendidikan Tinggi Islam, khususnya STAIN adalah *raw Input* peserta didik kurang selektif. Untuk UIN dan IAIN, belum terintegrasinya program studi S1, S2 dan S3 dalam satu fakultas, daya dukung riset belum memberikan manfaat seluas-luasnya pada pengembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat, belum maksimalnya konsorsium keilmuan mata kuliah sejenis, lemahnya penguasaan bahasa asing di kalangan dosen dan mahasiswa, lemahnya publikasi karya ilmiah dan penelitian di tingkat internasional, dan manajemen perencanaan dan keuangan yang kurang visioner, transparan dan akuntabel. Juga kerjasama jaringan yang belum optimal, lemahnya kerjasama luar negeri, dan lemahnya teknologi IT. Kelemahan yang sama juga dirasakan oleh Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTAIS), dengan indikasi bahwa sebagian besar PTAIS belum terakreditasi BAN PT, pengelolaan lembaganya yang konvensional, penyelenggaraan kegiatan pembelajarannya yang tidak dikelola dengan baik, serta sumberdaya yang sangat terbatas, terutama sumberdaya keuangan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian di lingkungan Pendidikan Tinggi Islam (PTAI), khususnya UIN adalah revitalisasi beberapa prodi agama, agar tetap eksis dan sejajar dengan prodi umum lainnya. Untuk itu, diperlukan jaminan mengenai keberlangsungan prodi agama, sehingga tidak terjadi penutupan prodi agama di tengah gencarnya pembukaan prodi umum. Lebih daripada itu, dalam upaya untuk meningkatkan daya saing PTAI dengan perguruan umum, maka diperlukan ciri khas yang tetap konsisten dipertahankan yaitu integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu eksakta,



sosial, dan humaniora, sehingga berbagai ilmu umum tersebut tidak kehilangan ruhnya sebagai suatu ilmu yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama.

Juga untuk memantapkan jati diri PTAI, maka diperlukan suatu strategi agar ilmu-ilmu keislaman tetap menjadi keunggulan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan menjawab berbagai tantangan zaman. Untuk itu, agar ilmu-ilmu keislaman semakin dinamis, maka diperlukan kajian Islam secara multidisipliner. Lebih daripada itu, diperlukan penataan kelembagaan, agar mampu menjawab berbagai persoalan kemoderenan yang bermuara pada keunggulan teknologi informasi. Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar PTAI, diperlukan pemetaan keunggulan PTAI, sehingga masing-masing PTAI mempunyai ciri khas sendiri. Ciri khas tersebut lebih berorientasi pada pengembangan spesialisasi keilmuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya.

Untuk menjaga terkendalinya mutu PTAS, maka diperlukan pembatasan berdirinya lembaga baru. Jika memang sangat dibutuhkan, maka pendirian PTAS harus didasarkan pada letak geografis, demografis, dan analisis kebutuhan, sehingga lulusannya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi dakwah islamiyah dan kebutuhan pasar kerja di daerah tersebut. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja Kopertais, agar mampu memberikan layanan, pembinaan, dan pengawasan kepada PTAS secara lebih intensif, berkelanjutan, dan bertanggungjawab. Pada aspek manajemen dan tata kelola, kewajiban PTAIN dalam melaksanakan BLU (Badan Layanan Umum) menjadi salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian. Mulai pada aspek tata kelola program, SDM, asset, dan keuangan, hingga pada aspek akuntabilitas dan pengawasan BLU di PTAIN.



Berikut adalah beberapa program dan realisasinya yang berhasil dilaksanakan oleh Kementerian Agama di sektor Pendidikan Tinggi Agama Islam yang diambil dari dokumen LAKIP Ditjen Pendis tahun 2010 :

Tabel 2.4.

Kegiatan yang berhasil dilakukan KEMENAG dalam sektor Pendidikan Tinggi Islam
(LAKIP Ditjen Pendis 2010)

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Realisasi
1	Pengembangan program pengabdian masyarakat berbasis program	39 PTAI	Kegiatan	21 PTAIN dan 18 PTAIS
2	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi agama islam termasuk pasca bencana	45	Lembaga	45 PTAIS
3	Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan berprestasi	4100	Orang	Di 200 PTAIS
4	a. Bantuan beasiswa S1 santri berprestasi lulusan MAN Insan Cendekia b. Mahasiswa berprestasi	127 336	Orang Orang	127 336
5	Bantuan beasiswa S1 santri berprestasi lulusan pondok pesantren	2000	Orang	Di 33 PTAIS
6	Pengembangan perpustakaan PTA	4	Paket	4 lokasi PTAIS
7	Peningkatan mutu penelitian	1	Paket	1
8	Pembangunan sarana prasarana pendidikan (pendamping rusunama, pembangunan ma'had al jamiyah, perpustakaan)	1	Paket	4 lokasi PTAIS
9	Penyelenggaraan <i>Annuual Conference of Islamic Studies</i>	1	Kegiatan	Di IAIN Banjarmasin
10	Beasiswa program studi ilmu agama murni	1	Paket	693 orang di 21 PTAIN
11	Pengembangan system seleksi mahasiswa baru PTAIN	1	Paket	52 PTAIN
12	Pengembangan badan layanan umum (BLU) / badan hukum pendidikan (BHP)	1	Paket	Direvisi menjadi Task Force pengembangan Kopertis PTAIS
13	Akreditasi program studi di lingkungan PTAI	1	Paket	1
14	Penguatan prodi Saintek UIN	1	Paket	1
15	Bantuan pembangunan asrama mahasiswa di Mesir	1	Paket	Empat belas milyar rupiah
16	Peningkatan kompetensi dosen (short course)	100	Orang	100
17	Bantuan peningkatan kualifikasi dosen program S2/S3	1250	Orang	1653
18	Tunjangan profesi dosen non PNS	400	Orang	338
19	Beasiswa dosen dan tenaga kependidikan program S2 dan S3 luar negeri	20	Orang	S2 = 4 S3 = 38
20	Percepatan sertifikasi dosen	4000	Orang	3905
21	Beasiswa dosen program S2 dan S3 dalam negeri	1231	Orang	S2 = 511 S3 = 687
22	Pengembangan kapasitas LTPK	1	Paket	1



BAB III

REVIEW KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN PTAI (CONTENT ANALYSIS)

A. PEMETAAN KEBIJAKAN KEMENAG DALAM PENGEMBANGAN PTAI

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Menurut Grindle (1980), *Content of policy* adalah usaha untuk melihat apakah hakekat dan tujuan utama yang hendak dicapai oleh sebuah kebijakan, apakah kebijakan yang diambil dalam proses pengambilan keputusan merupakan suatu pilihan yang tepat, *feasible*, dan dapat dilaksanakan. Lebih jauh, Holsti (1969) mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) sebagai suatu proses yang mengekstraksi informasi dari suatu teks dan membuatnya jelas melalui tema atau kata kunci yang sesuai dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mengevaluasi kebijakan-kebijakan PTAI, untuk itu dilakukan *content analysis* dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Analisis pada dokumen kebijakan yang menghasilkan beberapa tema besar atau *keyword* yang merepresentasikan aspek kelembagaan dan akademik, anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia
2. Identifikasi *current condition* pada PTAI berdasarkan tema besar (*big theme*) atau *keyword* dari dokumen-dokumen yang dianalisis (bisa melalui interview / questionnaire / dokumen / report yang dimiliki masing-masing PTAI)
3. Mencari kesamaan *condition* dari beberapa PTAI yang diobservasi dan dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi PTAI di Indonesia
4. Evaluasi kebijakan PTAI dapat diidentifikasi dari *current condition* di PTAI.



Sebagai langkah awal telah dilakukan studi terhadap dokumen kebijakan dan peraturan yang ada di Kementerian Agama. Peraturan dan dokumen kebijakan yang telah di analisis berjumlah 471 buah yang terdiri dari :

1. Undang – Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden
4. Keputusan Presiden
5. Keputusan Menteri Agama
6. Peraturan Menteri Agama
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
9. Peraturan Menteri Keuangan
10. Keputusan Menteri Keuangan
11. Penraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
12. Lain – Lain (Keputusan Kepala BKN dll)

Hal itu belum termasuk Dokumen Kebijakan yang Khusus terkait dengan hal hal yang bersifat strategis yang ada di Kemeneterian Agama yang secara khusus terkait dengan Kebijakan Pendidikan Tinggi Agama Islam yaitu :

1. Rencana Strategis Dikertorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2010 – 2014
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Direktorat Kenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis).
3. Surat Edaran Dirjen dan Irjen.
4. Beberapa dokumen lainnya.

Dari ke 471 dokumen regulasi dan peraturan yang telah diteliti, maka dokumen – dokumen tersebut dikelompokkan dalam dokumen yang terkait dengan tema penelitian ini dan dokumen yang tidak terkait. Setelah dilakukan

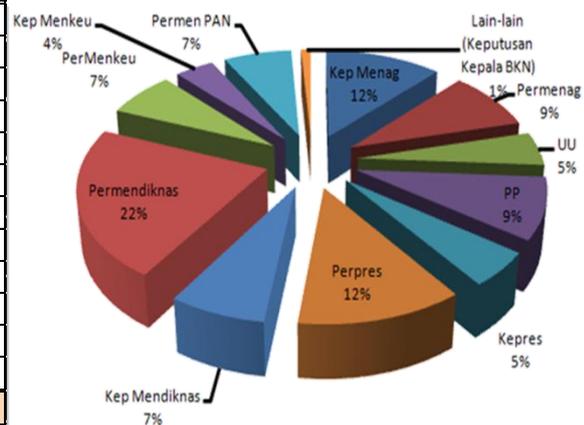


desk evaluation terhadap dokumen – dokumen tersebut, maka dijumpai ada 100 dokumen regulasi dan peraturan yang dikategorikan relevan dan sisanya dianggap tidak terkait dengan tema besar penelitian ini.

Dari *short list* seratus dokumen regulasi dan peraturan yang telah di analisis, maka berikut ini adalah jenis dan jumlah dokumen yang dianggap relevan dan terkait dengan penelitian ini :

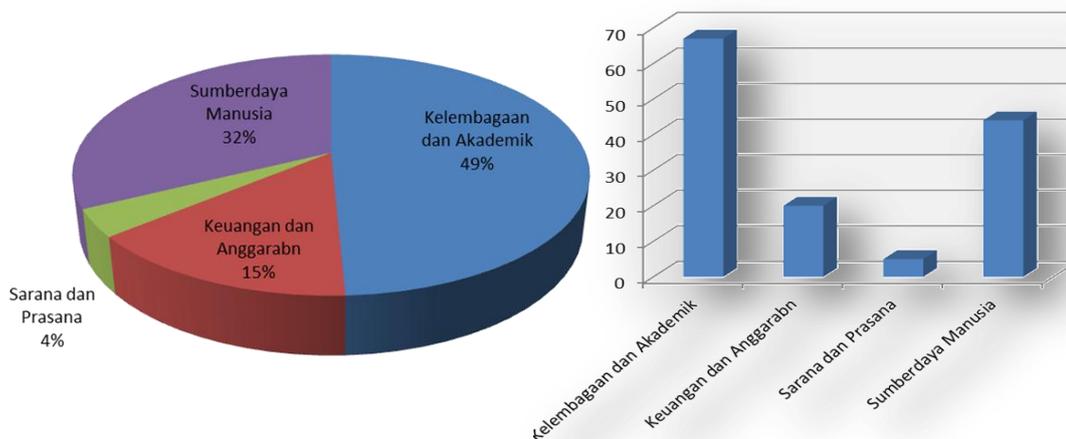
Tabel 3.1.
Jumlah dan Jenis Regulasi Peraturan yang relevan dengan tema besar penelitian

No.	Jenis Regulasi dan Peraturan	Jumlah
1	Keputusan Menteri Agama	12
2	Peraturan Menteri Agama	9
3	Undang Undang	5
4	Peraturan Pemerintah	9
5	Keputusan Presiden	5
6	Peraturan Presiden	12
7	Keputusan MENDIKNAS	7
8	Peraturan MENDIKNAS	22
9	Peraturan MENKEU	7
10	Keputusan MENKEU	4
11	Peraturan MENPAN	7
12	Lain-lain (Keputusan Kepala BKN)	1
JUMLAH Peraturan / Regulasi		100



Dari seratus dokumen tersebut, selanjutnya di kelompokkan dalam aspek utama yang menjadi domain kebijakan yang diteliti yaitu aspek Kelembagaan dan Akademik, Sarana dan Prasarana, Keuangan dan Anggaran, serta Sumber daya Manusia.

Dari gambar dibawah dapat disimpulkan bahwa dari 100 dokumen maka 49 persen (49 %) diantaranya berkenaan dengan aspek kelembagaan dan akademik, sementara itu 32 % yang relevan dengan aspek sumber daya manusia, 15 % terkait dengan hal keuangan dan anggaran, dan hanya 4 % bersinggungan dengan aspek sarana prasarana.



Gambar 3.1.

Porsi jumlah dokumen regulasi dan peraturan terhadap empat aspek pengembangan PTAI.

Dari kenyataan itu, nampak jelas bahwa bahwa aspek Kelembagaan dan akademik memiliki porsi yang sangat besar dalam jenis atau tema kebijakan yang dibuat namun sangat sedikit kebijakan (regulasi dan peraturan) yang “berbicara” tentang sarana prasarana maupun anggaran/keuangan pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

Lebih jauh hal tersebut secara langsung atau tidak menggambarkan bobot “keberpihakan” perhatian terhadap empat aspek utama dalam pengembangan PTAI. Hal yang menjadi hipotesis selanjutnya adalah bahwa jika didapatkan suatu alasan yang logis dan rasional bahwa dukungan aspek sarana prasarana serta keuangan akan membawa dampak pada peningkatan aspek kelembagaan dan akademik, maka perhatian otoritas pengambil keputusan terhadap aspek – aspek “minoritas” harus segera ditingkatkan. Secara rinci, hasil pemetaan dan pengelompokan regulasi dan peraturan yang terkait dengan pengembangan PTAI dalam konteks empat aspek terdapat dalam **Lampiran. 1** laporan penelitian ini.



Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa kendati sejumlah 471 buah kebijakan telah dipelajari dan dilakukan analisis terhadapnya, namun hampir seluruh kebijakan yang kami amati hanya mengatur tentang kegiatan operasional teknis dan administrasi Perguruan Tinggi. Belum dijumpai suatu dokumen kebijakan yang khusus berbicara tentang kebijakan strategis pengembangan Perguruan Tinggi khususnya PTAI yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.

Pada sub bagian selanjutnya pada Bab ini akan diuraikan kebijakan mana yang benar benar dilakukan dan tidak serta capaian yang telah dan ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sebagai sumber data untuk analisis ini digunakan dua dokumen utama yaitu Rencana Strategis Ditjen Pendis dan LAKIP Ditjen Pendis.

B. ISU STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN PTAI

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian di lingkungan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI), khususnya UIN adalah revitalisasi beberapa prodi agama, agar tetap eksis serta kebijakan yang jelas tentang pembukaan Prodi Umum. Untuk itu, diperlukan jaminan mengenai keberlangsungan prodi agama, sehingga tidak terjadi penutupan prodi agama maupun stagnasi perkembangan prodi umum. Lebih daripada itu, dalam upaya untuk meningkatkan daya saing PTAI dengan perguruan tinggi umum, maka diperlukan ciri khas yang tetap konsisten dipertahankan yaitu integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu eksakta, sosial, dan humaniora, sehingga berbagai ilmu umum tersebut tidak kehilangan ruhnya sebagai suatu ilmu yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama.

Juga untuk memantapkan jati diri PTAI, maka diperlukan suatu strategi agar ilmu-ilmu keislaman tetap menjadi keunggulan, sehingga mampu



menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan menjawab berbagai tantangan zaman. Untuk itu, agar ilmu-ilmu keislaman semakin dinamis, maka diperlukan kajian Islam secara multidisipliner. Lebih daripada itu, diperlukan penataan kelembagaan, agar mampu menjawab berbagai persoalan kemoderenan yang bermuara pada keunggulan teknologi informasi. Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar PTAI, diperlukan pemetaan keunggulan PTAI, sehingga masing-masing PTAI mempunyai ciri khas sendiri. Ciri khas tersebut lebih berorientasi pada pengembangan spesialisasi keilmuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya.

Untuk menjaga terkendalinya mutu PTAIS, maka diperlukan pembatasan berdirinya lembaga baru. Jika memang sangat dibutuhkan, maka pendirian PTAIS harus didasarkan pada letak geografis, demografis, dan analisis kebutuhan, sehingga lulusannya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi dakwah islamiyah dan kebutuhan pasar kerja di daerah tersebut. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja Kopertais, agar mampu memberikan layanan, pembinaan, dan pengawasan kepada PTAIS secara lebih intensif, berkelanjutan, dan bertanggungjawab. Pada aspek manajemen dan tata kelola, kewajiban PTAIN dalam melaksanakan BLU (Badan Layanan Usaha) menjadi salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian. Mulai pada aspek tata kelola program, SDM, asset, dan keuangan, hingga pada aspek akuntabilitas dan pengawasan BLU di PTAIN.

Isu strategis yang berkaitan dengan manajemen dan tata kelola Pendidikan Tinggi Islam terletak pada bagaimana penanggungjawab penyelenggara Pendidikan Tinggi Islam dapat menyusun standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pengelolaan Pendidikan Tinggi Islam. Selain itu, persoalan lain yang menyangkut manajemen dan tata kelola adalah belum optimalnya perumusan kebijakan yang didasarkan kepada hasil riset dan



pengembangan serta akuntabilitas program, keuangan, SDM, dan asset yang belum menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik secara optimal. Lahirnya beberapa peraturan dan perundang – undangan tentang Pendidikan Tinggi seperti PP No. 17 dan PP No. 66 Tahun 2010 serta RUU Perguruan Tinggi sudah seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh pengelola Perguruan Tinggi dalam melakukan kegiatan pengelolaan institusinya.

Pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan Tinggi Islam masih menemui kelemahan dalam aspek tata laksana program. Masih sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program antara satu unit dengan unit yang lain merupakan kelemahan yang harus segera diatasi dengan mempertegas struktur pelaksana program dalam satu aturan yang jelas. Di samping itu, masih kurangnya alokasi dana dan sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan program juga perlu diperhatikan dengan pemerataan SDM yang baik di segala unit kerja maupun kebijakan keberpihakan anggaran yang lebih jelas. Begitu juga pada aspek evaluasi program, belum adanya sistem evaluasi yang baik terhadap efektivitas program, berimplikasi secara langsung terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan dan program yang dijalankan. Aspek pengelolaan keuangan dan asset pada penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Islam juga masih belum optimal dalam menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pada aspek akuntabilitas pelaksanaan program, kelemahan yang masih sering dihadapi adalah belum efektifnya sistem pengendalian dini yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan Tinggi Islam. Selain itu, pelaksanaan pengawasan baik pada aspek keuangan maupun kinerja juga belum memberikan implikasi yang positif terhadap akuntabilitas pelaksanaan program. Juga kurangnya dukungan anggaran terhadap pengawasan pelaksanaan pembangunan Pendidikan Tinggi Islam juga menjadi salah satu



faktor munculnya kelemahan dimaksud, sehingga diharapkan pada lima tahun ke depan akuntabilitas pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal.

C. REGULASI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PTAI

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang disajikan pada Bab I, tujuan jangka panjang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan itu akan dicapai melalui peranannya dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang *tafaqquh fi al-din* dan *Tafaqquh fi al-ilmu*.

Tabel 3.2.

Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi Islam
(diadopsi dari RENSTRA DITJEN PENDIS Tahun 2010 - 2014)

No	Komponen Kompetensi	Jenjang Pendidikan	Jenis Pendidikan		
			Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan	Pendidikan Umum dengan Kekhasan Islam	Pendidikan Keagamaan Islam
1.	Keilmuan dan ketrampilan	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Memahami ajaran Islam dalam konteks spesialisasi keilmuan atau program studi Memahami tentang kewajiban berperilaku baik sejalan dengan nilai-nilai keragaman budaya di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> menganalisis khazanah pemikiran Islam klasik sampai kontemporer menganalisis teks, baik ayat al-Quran maupun hadits, tentang sistem kehidupan sosial Mengembangkan pengkajian keislaman dengan pendekatan interdisipliner 	<ul style="list-style-type: none"> menganalisis khazanah pemikiran Islam klasik sampai kontemporer menganalisis teks, baik ayat al-Quran maupun hadits dengan pendekatan ilmu-ilmu keislaman (kaidah tafsir dan <i>ushululiyah</i>) mengembangkan pemahaman terhadap teks berbasis ilmu-ilmu keislaman
2.	Karakter dan Perilaku	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Menghayati dan mengamalkan karakter dan kepribadian muslim sesuai dengan ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari pemahaman, penghayatan dan pengamalan ibadah Menghayati keragaman agama dan budaya sebagai basis sikap dan perilaku sehari-hari Berperilaku baik terhadap sesama sebagai anggota masyarakat dan warga Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Menghayati dan mengamalkan karakter dan kepribadian muslim sesuai dengan ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari pemahaman, penghayatan dan pengamalan ibadah Menghayati keragaman agama dan budaya sebagai basis sikap dan perilaku sehari-hari Berperilaku baik terhadap sesama sebagai anggota masyarakat dan warga Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Menghayati dan mengamalkan karakter dan kepribadian muslim sesuai dengan ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari pemahaman, penghayatan dan pengamalan ibadah Menghayati keragaman agama dan budaya sebagai basis sikap dan perilaku sehari-hari Berperilaku baik terhadap sesama sebagai anggota masyarakat dan warga Negara Mengamalkan sikap



No	Komponen Kompetensi	Jenjang Pendidikan	Jenis Pendidikan		
			Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan	Pendidikan Umum dengan Kekhasan Islam	Pendidikan Keagamaan Islam
			<ul style="list-style-type: none"> Mengamalkan sikap inklusif dan kebhinekaan dalam perilaku kehidupan beragama Memiliki sikap moderat dalam memaknai perbedaan pemikiran perilaku keberagamaan di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengamalkan sikap inklusif dan kebhinekaan dalam perilaku kehidupan beragama Memiliki sikap moderat dalam memaknai perbedaan pemikiran perilaku keberagamaan di masyarakat Memiliki integritas dan keteladanan sebagai kader intelektual muslim 	<ul style="list-style-type: none"> inklusif dan kebhinekaan dalam perilaku kehidupan beragama Memiliki sikap moderat dalam memaknai perbedaan pemikiran perilaku keberagamaan di masyarakat Memiliki integritas dan keteladanan sebagai kader ulama dan pendidik umat.

Tujuan dan arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam tersebut di atas menjadi rujukan bagi arah pembangunan seluruh jenjang dan jenis yang ada dalam sub-sistem Pendidikan Tinggi Islam agar dampaknya memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan jangka panjang Pendidikan Islam.

Sementara itu, dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam KEMENAG RI tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa untuk Sektor Pendidikan Tinggi Islam, selama tahun 2010 telah dialokasikan sejumlah program yaitu :

Tabel 3.3.

Program Kerja Sektor Pendidikan Tinggi Islam
Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010

Aspek Kelembagaan dan Akademik	Aspek Keuangan
<p><u>Akademik</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Mutu Akademik Pengembangan penelitian, pengabdian masyarakat, dan penerbitan ilmiah Akreditasi <p><u>Kelembagaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pendirian dan pengembangan program studi dan perguruan tinggi agama islam baru. Pengembangan Kerjasama Perintisan perguruan tinggi unggulan dan bertaraf internasional Pembinaan Manajemen 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu pengelolaan keuangan dan barang miik negara



Aspek Kelembagaan dan Akademik	Aspek Keuangan
5. Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Islam 6. Peningkatan dan Pengembangan Koordinasi 7. Penyusunan dan Penataan Regulasi 8. Sosialisasi dan Pencitraan	
Aspek Sarana dan Prasarana	Aspek Sumber Daya Manusia
1. Pengembangan Sarana dan Prasarana 2. Peningkatan dan pengembangan sistem manajemen berbasis teknologi informasi	1. Peningkatan Sumber daya Manusia 2. Beasiswa bagi mahasiswa miskin dan berprestasi

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI PENGEMBANGAN PTAI

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Islam (PTAI) ditujukan untuk (1) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia; (2) Membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.



Berdasarkan lingkungan strategik Pendidikan Tinggi Agama Islam maka arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu **menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman**, dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance*, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).

Universitas Islam Negeri adalah perguruan tinggi Islam yang memiliki tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan *wider mandate* di bidang ilmu umum yang mendukung terhadap program pendidikan tinggi bidang ilmu agama. Karena itu pembangunan UIN ditujukan untuk mengemban amanat dalam mengintegrasikan bidang ilmu agama Islam dengan bidang ilmu umum. Setelah memperhatikan kondisi saat ini dan lingkungan strategisnya, maka arah pembangunan UIN difokuskan kepada **revitalisasi prodi agama, peningkatan mutu pendidikan dan mutu layanan akademik**.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) adalah perguruan tinggi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman dengan pendekatan multidisipliner. Dengan memperhatikan kondisinya saat ini dan pengaruh lingkungan strategis yang mempengaruhinya, maka arah pembangunan IAIN lima tahun kedepan diarahkan untuk meningkatkan **keunggulan mutu ilmu-ilmu keislaman, pengembangan kelembagaan IAIN dan peningkatan mutu layanan akademik**.



Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) adalah perguruan tinggi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Berdasarkan kondisi saat ini dan lingkungan strategisnya, maka pembangunan lima tahun mendatang STAIN diarahkan untuk meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten/kota akan akses pendidikan tinggi Islam dan ahli agama.

Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dapat berupa Institut Agama Islam (IAI), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Universitas. PTAIS merupakan pendidikan tinggi Islam atas prakarsa masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Karena kondisinya yang sangat bervariasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dan kurang terkendalinya penyelenggaraannya, maka pembangunan PTAIS untuk lima tahun kedepan diarahkan kepada pengendalian dan pembinaan, peningkatan mutu pendidikan dan mutu layanan akademik, serta implementasi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Untuk menuju tercapainya arah pembangunan pendidikan tinggi agama Islam, maka fokus area, sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2014 dan indikator capaian kinerjanya diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.

Indikator Kinerja Kunci Pembangunan PTAI 2010 - 2014

SATKER	Fokus kinerja kunci	Sasaran Pembangunan	Indikator Capaian kinerja kunci
UIN	Revitalisasi prodi agama,	Terjaminnya eksistensi dan perimbangan prodi agama sebagai bagian tak terpisahkan dari UIN	<ul style="list-style-type: none"> - Tiap UIN minimal memiliki 10 prodi agama dengan jumlah mahasiswa minimal 30 orang per prodi - Tersedia 10 % alokasi bantuan pendidikan dari jumlah DIPA untuk mendukung prodi agama.
	peningkatan mutu	Meningkatnya daya saing	- Semua UIN telah memiliki kurikulum integratif



SATKER	Fokus kinerja kunci	Sasaran Pembangunan	Indikator Capaian kinerja kunci
	pendidikan	UIN dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu Keislaman, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan teknologi baik dalam tingkatan loka, regional maupun global.	(Prodi agama dan umum) <ul style="list-style-type: none"> - Semua prodi di UIN terakreditasi, 65 % diantaranya nilai B - Mahasiswa UIN harus mencapai skor Toefl (English) dan ToafI (Arabic) 450 untuk S1, 475 untuk S2 dan 500 untuk S3. - Setiap fakultas memiliki perpustakaan - Semua perpustakaan UIN telah menjadi <i>on line digital library</i> dan memiliki minimal 3 pustakawan tingkat ahli. - Semua prodi sudah mempunyai laboratorium pembelajaran dan memiliki minimal 2 tenaga laboran sesuai bidangnya. - 70% alumni UIN telah mendapatkan pekerjaan sebelum satu tahun - Masing-masing UIN mempunyai program <i>double degree</i> antar fakultas yang relevan - Masing-masing UIN mempunyai program <i>twin program degree</i> dengan PT dalam dan luar negeri. - UIN memiliki 5 program studi bertaraf internasional untuk program S 1, S2 dan S3.
		Menjadikan UIN sebagai pusat penelitian keunggulan dalam integrasi antara ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap UIN memiliki tiga jurnal terakreditasi nasional dan satu jurnal internasional - 75% dosen di masing-masing UIN menerbitkan 2 buah artikel pertahun pada jurnal terakreditasi - Tiap UIN pertahun melaksanakan 250 judul penelitian - UIN bekerjasama dengan 12 institusi perguruan tinggi luar negeri
		Meningkatnya profesionalitas dalam pelayanan dan kemandirian dalam pengelolaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Semua UIN meraih kualifikasi wajar tanpa syarat. - Semua UIN mempunyai Renstra yang sesuai dengan Renstra Pendidikan Islam. - UIN mampu menyediakan 30% anggaran operasional pendidikan di lembaganya - Semua UIN terakreditasi secara kelembagaan.* - Semua UIN memenuhi Standar ISO 9001:2008 - UIN membangun jejaring minimal 10 institusi perguruan tinggi luar negeri.
IAIN	meningkatkan keunggulan mutu ilmu-ilmu keislaman	Berkembangnya IAIN sebagai pusat keunggulan dalam kajian keislaman dengan pendekatan multidisipliner	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program studi unggulan pada setiap IAIN minimal 5 prodi. - Seluruh dosen dan mahasiswa memiliki akses internet dan e-jurnal. - 50% dosen di tiap IAIN menerbitkan 2 karya ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional setiap tahun - Setiap IAIN per-tahun melaksanakan minimal



SATKER	Fokus kinerja kunci	Sasaran Pembangunan	Indikator Capaian kinerja kunci
			<ul style="list-style-type: none"> 120 judul penelitian. - Setiap IAIN memiliki minimal 5 jurnal ilmiah terakreditasi. - Setiap IAIN mempunyai dua program studi bertaraf internasional. - Setiap IAIN mempunyai program double degree
		Terwujudnya lulusan yang bermutu dan mampu bersaing dalam bidang keilmuan dan pasar kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Semua IAIN memiliki kurikulum yang kontekstual berbasis KTSPT dan atau life skill. - Masing-masing prodi di IAIN mempunyai laboratorium prodi. - Setiap fakultas memiliki perpustakaan. - Seluruh program studi di IAIN terakreditasi; 60% terakreditasi minimal B.* - Semua perpustakaan IAIN telah menjadi <i>on line digital library</i> dan memiliki minimal 3 pustakawan tingkat ahli. - Mahasiswa yang lulus IAIN harus mencapai toefl (Inggris) dan toafl (Arab) skor 450 untuk S1, 475 untuk S2 dan 500 untuk S3. - 90 % mahasiswa bisa menyelesaikan masa studinya selama 4-5 tahun - Dalam 12 bulan, 65 % alumni IAIN terserap dunia kerja - 20 % lulusan S1 IAIN melanjutkan ke pasca sarjana
		Adanya pemihakan IAIN sebagai lembaga pendidikan kepada kaum marginal	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh IAIN mampu menampung 60 ribu mahasiswa baru. - Seluruh IAIN mampu menampung minimal 20% mahasiswa dari keluarga kurang mampu* - Seluruh IAIN memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.*
	peningkatan mutu layanan akademik	Meningkatnya profesionalitas dalam pelayanan dan kemandirian dalam pengelolaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Semua IAIN meraih kualifikasi wajar tanpa syarat. - Semua IAIN mempunyai Renstra yang sesuai dengan Renstra Pendidikan Islam. - IAIN mampu menyediakan 30% anggaran operasional pendidikan di lembaganya - Semua IAIN terakreditasi secara kelembagaan minimal B.* - 50 % IAIN memenuhi Standar ISO 9001:2008 - IAIN membangun jejaring minimal 5 institusi perguruan tinggi luar negeri.
STAIN	penataan kelembagaan	Meningkatnya Akses kpd mahasiswa di daerah khususnya dari keluarga yang kurang mampu.	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian mahasiswa miskin berpotensi akademik tinggi mendapat akses masuk.* - Terserapnya mahasiswa dari daerah sekitar yang membutuhkan pendidikan tinggi



SATKER	Fokus kinerja kunci	Sasaran Pembangunan	Indikator Capaian kinerja kunci
	peningkatan mutu pendidikan	Meningkatnya keunggulan spesialisasi dalam bidang ilmu-ilmu keislaman	<ul style="list-style-type: none"> - Semua STAIN memiliki kurikulum yang aplikatif berbasis KTSPT. - 50% dosen di tiap STAIN menerbitkan 2 karya ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional setiap tahun - 75% dosen di setiap STAIN menulis minimal 1 pertahun pada jurnal terakreditasi. - Setiap STAIN memiliki minimal 3 jurnal ilmiah terakreditasi. - Masing-masing STAIN per-tahun melaksanakan penelitian 75 judul. - Semua perpustakaan STAIN telah menjadi <i>on line digital library</i> (minimal otomasi penuh) dan memiliki minimal 1 pustakawan tingkat ahli. - Pemetaan keunggulan berbasis prodi untuk proses merger menjadi Institut atau universitas sebagai program <i>pilot project of multy campuses</i>. - Semua program studi di STAIN terakreditasi 60 % terakreditasi B.* - 90 % mahasiswa bisa menyelesaikan masa studinya rata-rata 4-5 tahun - Dalam 12 bulan, 75% alumni STAIN terserap dunia kerja semua
		Terwujudnya lulusan yang mampu bersaing dalam bidang keilmuan dan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Masing-masing prodi di STAIN mempunyai lab prodi. - Mahasiswa yang lulus STAIN harus mencapai toefl (Inggris) dan toafl (Arab) skor 450 - 80 % mahasiswa bisa menyelesaikan masa studinya selama 4-5 tahun - Dalam 12 bulan, 75 % alumni STAIN terserap dunia kerja - 10 % lulusan S1 STAIN melanjutkan ke pasca sarjana - 5% lulusan S1 STAIN mampu membuka usaha mandiri.
	peningkatan mutu layanan akademik	Meningkatnya profesionalitas dalam pelayanan dan kemandirian dalam pengelolaan.	<ul style="list-style-type: none"> - 50% SAKIP STAIN meraih kualifikasi wajar.* - Semua STAIN mempunyai Renstra yang sesuai dengan Renstra Pendidikan Islam. - Semua STAIN memenuhi Standar ISO 9001:2008 - 50% STAIN terakreditasi secara kelembagaan. - STAIN membangun jejaring minimal 2 institusi perguruan tinggi luar negeri.
PTAIS (IAI, STAI, STI, FAI)	Pengendalian mutu pendidikan	Terkendalnya jumlah lembaga PTAIS yang didasarkan analisis	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian PTAIS didasarkan pada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan rasio demografis dan geografis tertentu (terkendali).



SATKER	Fokus kinerja kunci	Sasaran Pembangunan	Indikator Capaian kinerja kunci
		kebutuhan dengan mempertimbangkan rasio demografis dan geografis.	<ul style="list-style-type: none"> - Semua prodi di PTAIS telah terakreditasi 50 terakreditasi B.* - Tersedia pedoman standar evaluasi program studi. - Regulasi tentang standarisasi nama kelembagaan PTAIS. - Pemetaan keunggulan berbasis prodi untuk proses merger menjadi Institut atau universitas sebagai program <i>pilot project of multy campuses</i>.
	peningkatan mutu pendidikan	Meningkatnya mutu lulus yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Semua kurikulum program studi PTAIS berbasis KTSP dan atau <i>life skill</i>. - Semua PTAIS memiliki lembaga penjaminan mutu. - 30 % PTAIS terakreditasi institusi.* - 20 % PTAIS memenuhi Standar ISO 9001:2008 - Setiap PTAIS melaksanakan penelitian minimal 10 judul pertahun.
	mutu layanan akademik	Terwujudnya standar pelayanan administrasi dan akademik serta Kopertais	<ul style="list-style-type: none"> - Semua PTAIS memiliki pedoman standar pelayanan administrasi dan akademik. - 13 Kopertais mempunyai pedoman standar pelayanan administrasi dan akademik kepada PTAIS berbasis Online sistem (ICT). - Jaringan kerjasama kelembagaan Kopertais, PTAIS, Departemen Agama, serta lembaga lain dalam dan luar negeri. - Semua PTAIS dan Kopertais mengelola keuangan berbasis SAP dan atau SAKIP.

E. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SAAT INI

Berdasarkan Rencana strategis Pengembangan Pendidikan Islam sebagaimana disampaikan dalam sub bab sebelumnya, maka berikut ini disampaikan indikator kinerja yang berhasil dicapai dalam konteks Pengembangan PTAI:

Tabel 3.5.

Capaian Indikator Kinerja Pengembangan PTAI

No.	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2010
A.	Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan	
	Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)	
	1. APK	1.96
	2. APM	2.26
	3. Jumlah Mahasiswa	550.694 mahasiswa yang terdiri dari 201.341 mahasiswa pada PTAIN, dan 394.353 mahasiswa pada PTAIS



B.	Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing	
	Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)	
	1. Akreditasi prodi pada PTAIN	65.48% (569 prodi yang terakreditasi dari jumlah prodi sebanyak 869)
	2. Akreditasi prodi pada PTAIS	50% (619 prodi yang terakreditasi dari jumlah prodi sebanyak 1238)
	3. Akreditasi prodi umum	63.11% (65 prodi yang terakreditasi dari jumlah prodi sebanyak 103)
C.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Akuntabilitas, dan Kinerja	
	Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)	
	1. PTAI menerapkan pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU)	12 PTAI
	2. PTAIN yang memenuhi standar ISO 9001 : 2008	3 PTAI (UIN Malang, UIN Yogya, dan Fak. Tarbiyah)



BAB IV

UKURAN SAMPEL DAN DESKRIPSI DATA RESPONDEN

A. PENENTUAN LOKASI DAN JUMLAH SAMPEL

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan PTAI dalam lingkup nasional, sehingga secara ideal harus melibatkan data pada seluruh PTAI yang ada. Namun demikian dikarenakan keterbatasan waktu, maka data dikumpulkan pada lokasi-lokasi (PTAI) yang dianggap mampu mewakili kondisi PTAI di Indonesia. Dengan demikian, menjadi sesuatu yang penting untuk mengetahui sebaran PTAI di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah sebaran penduduk yang belum merata, tentunya hal tersebut berkorelasi dengan sebaran PTAI yang belum merata pula. Untuk itu dalam rangka melakukan pengelompokan wilayah sebaran PTAI diambil pertimbangan sebagai berikut:

1. Wilayah luar Jawa dirangkum berdasarkan pulau-pulau besar: Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua.
2. Wilayah dalam Jawa dibagi sesuai dengan propinsi: Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan DIY, dan Jawa Timur.

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, bahwa PTAI secara umum dapat dikategorikan menjadi : (1) Universitas Islam Negeri, (2) Institut Agama Islam Negeri, (3) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan (4) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum.

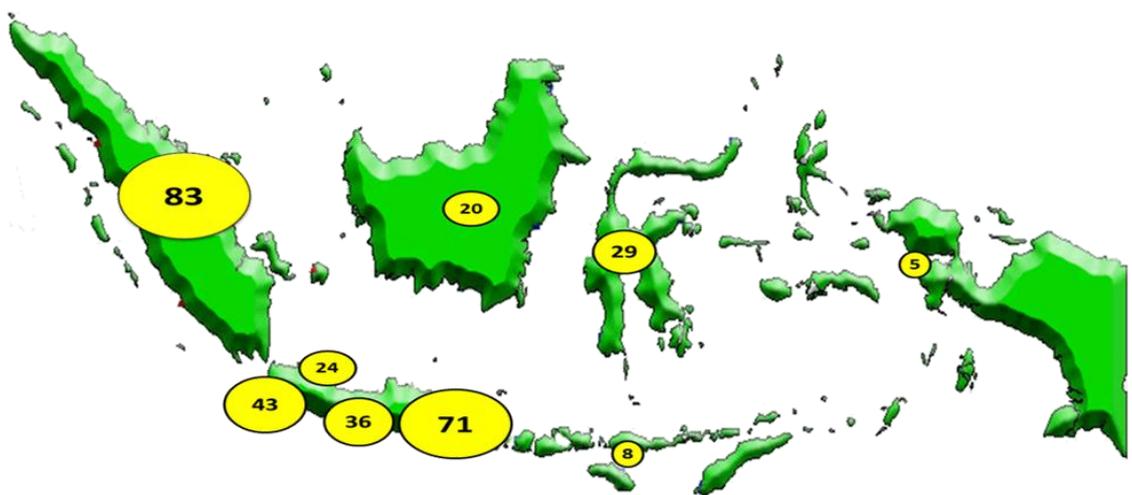


Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan data dari Kementerian Agama, dapat disusun Tabel rangkuman sebaran PTAI sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tabel rangkuman sebaran PTAI

Wilayah	Sub Wilayah	Keterangan Wilayah	PTAIS & FAI	STAIN	IAIN	UIN
Indonesia Barat	Sumatera	Propinsi di seluruh Pulau Sumatra	67	9	6	1
Pulau Jawa	Jawa Barat	Propinsi Jawa Barat, Banten	40	1	1	1
	Jakarta	Jakarta	23	0	0	1
	Jawa Tengah	Jawa Tengah dan DIY	29	4	2	1
	Jawa Timur	Jawa Timur	64	6		1
Indonesia Tengah & Timur	Nusa Tenggara	NTB, NTT dan Bali	7	0	1	0
	Kalimantan	Propinsi di seluruh Pulau Kalimantan	16	3	1	0
	Sulawesi	Propinsi di seluruh Pulau Sulawesi	21	5	2	1
	Papua	Papua dan Maluku	1	3	1	0
Jumlah			268	31	14	6
Total Jumlah PTAI			319			

Supaya dapat terlihat dengan lebih jelas sebaran masing-masing PTAI, data pada Tabel 4.1. diatas ditransformasikan ke dalam peta sebaran PTAI sebagai berikut:



Gambar 4.1.
Sebaran PTAI di Indonesia

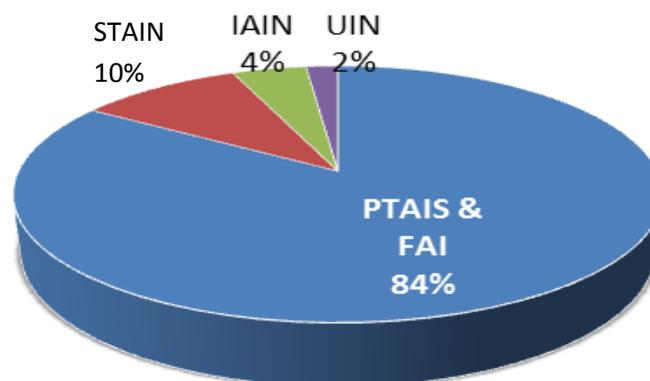


Berdasarkan peta sebaran di atas, secara sekilas tampak bahwa PTAI kebanyakan mungumpul di wilayah Pulau Jawa, disusul Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia Tengah dan Timur, sebagaimana dirangkum pada grafik berikut:



Gambar 4.2.
Prosentase Sebaran PTAI di Indonesia

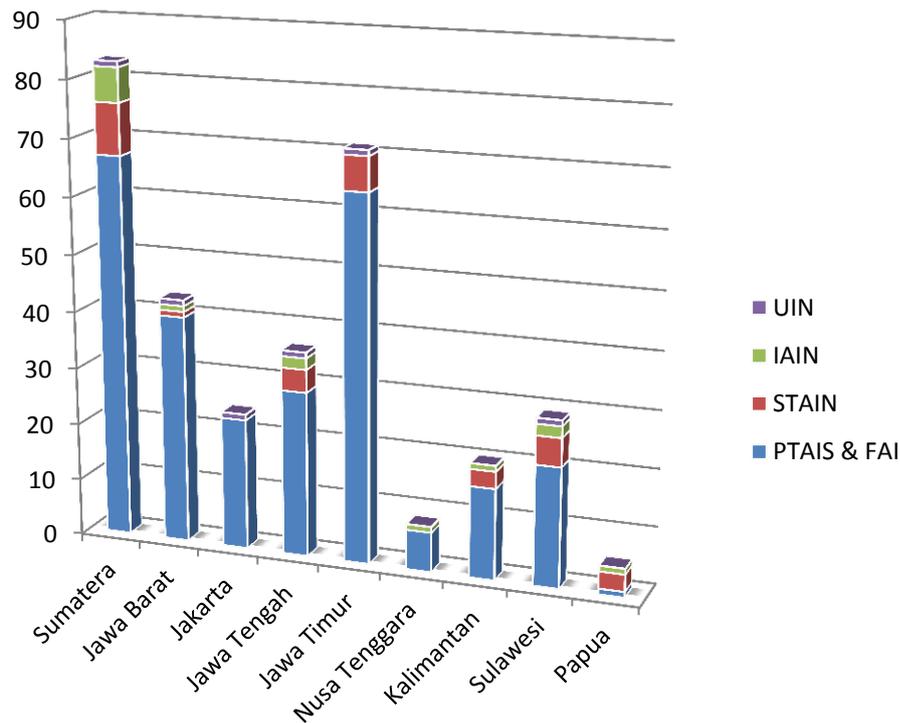
Peta sebaran di atas baru menggambarkan sebaran wilayah keberadaan PTAI. Sebagaimana diketahui bahwa PTAI terdiri dari UIN, IAIN, STAIN, dan PTAIS. Apabila data pada tabel di atas diplot menurut proporsi jenis PTAI, akan tampak bahwa sebenarnya jumlah PTAIS justru mendominasi sebagaimana digambarkan grafik berikut:



Gambar 4.3.
Proporsi PTAI di Indonesia



Untuk lebih memahami kaitan antara jenis PTAI dan sebaran wilayahnya, maka data pada tabel di atas perlu diplot pada sebuah grafik kolom bertumpuk. Hasil plot pada grafik dapat terlihat sebagaimana Gambar 4.4. berikut:



Gambar 4.4.
Proporsi Jumlah PTAI tiap Wilayah

Data sebaran PTAI di atas kemudian dilengkapi dengan wawancara ahli berkompeten yang mengerti kondisi PTAI di Indonesia. Berdasarkan wawancara didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa pada UIN dan IAIN yang berjumlah 6% atas keseluruhan PTAI, terdapat kondisi institusi dengan kecenderungan pola yang sama atau dapat dikatakan homogen.
2. Bahwa terdapat sejumlah besar PTAS dan FAI dengan kondisi yang relatif tidak seragam satu sama lain dengan disparitas mencolok terhadap PTAIN.



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka peneliti mengambil keputusan terkait lokasi PTAI sebagai sampel pengambilan data adalah sebagai berikut (Tabel 4.2.):

Tabel 4.2.
Sampel Pengambilan Data

No	JENIS PTAI	Jumlah	Nama Institusi	Lokasi
1	UIN	2	UIN Alauddin	Makassar, Sulawesi Selatan
			UIN Sunan Gunung Djati	Bandung, Jawa Barat
2	IAIN	4	IAIN Surabaya	Surabaya
			IAIN Surakarta	Solo, Jateng
			IAIN Cirebon	Jawa Barat
			IAIN Sumatera Utara	Medan, Sumut
3	STAIN	3	STAIN Samarinda	Samarinda, Kaltim
			STAIN Salatiga	Jawa Tengah
			STAIN Kediri	Jawa Timur
4	PTAIS & FAI	5	STAI Balikpapan	Balikpapan, Kaltim
			Univ Muhammadiyah Makasar	Makassar, Sulawesi Selatan
			FAI Univ Islam Indonesia	Yogyakarta
			FAI Univ Islam Sumatera Utara	Medan, Sumut
			UNSIQ	Wonosobo

Jumlah Sampel berdasarkan sebaran Daerah :

1. Jawa Barat dan DKI : 2 Institusi
2. Jawa Tengah dan DIY : 4 Institusi
3. Jawa Timur : 2 Institusi
4. Sumatera : 2 Institusi
5. Kalimantan : 2 Institusi
6. Sulawesi dan Indonesia Timur : 2 Institusi

Adapun Jadwal dan petugas yang dikirim ke setiap PTAI untuk melakukan Interview dan Menyebarkan kuesioner adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3.

Jadwal dan Petugas Interview dan Penyebaran Kuesioner ke PTAI Responden

No	Institusi	Tanggal	Waktu Setempat	Petugas (Interviewer)
1	UIN Alauddin - Makassar	20 Okt 2011	13.00 - 16.00	DR. Ibnu Qizam, M,Si
				Kifayah Amar, Ph.D
2	IAIN Sumatera Utara	20 Okt 2011	14.00 - 17.00	Drs. Jarot Wahyudi, S.H, M.A.
				Taufiq Aji, M.T.
3	STAIN Samarinda	20 Okt 2011	13.00 - 16.00	Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc
				Yandra Rahardian P, M.T.
4	FAI Univ Muhamadiyah Makassar	21 Okt 2011	09.00 - 11.30	DR. Ibnu Qizam, M,Si
				Kifayah Amar, Ph.D
5	FAI UISU - Medan	21 Okt 2011	09.00 - 11.30	Drs. Jarot Wahyudi, S.H, M.A.
				Taufiq Aji, M.T.
6	STAI Balikpapan	21 Okt 2011	09.00 - 11.30	Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc
				Yandra Rahardian P, M.T.
7	UIN Sunan Gunung Djati	27 Okt 2011	09.00 - 12.00	Drs. Jarot Wahyudi, S.H, M.A.
8	IAIN Sunan Ampel	27 Okt 2011	09.00 - 12.00	Kifayah Amar, Ph.D
9	IAIN Surakarta	27 Okt 2011	09.00 - 11.30	Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc
10	STAIN Salatiga	27 Okt 2011	14.00 - 16.30	Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc
11	IAIN Syeh Nurjati - Cirebon	28 Okt 2011	09.00 - 11.30	Yandra Rahardian P, M.T.
12	STAIN Kediri	28 Okt 2011	09.00 - 11.30	DR. Ibnu Qizam, M,Si
13	UNSIQ Wonosobo	28 Okt 2011	09.00 - 11.30	Taufiq Aji, M.T.
14	FAI Univ Islam Indonesia - Yogyakarta	1 Nov 2011	09.00 - 11.30	Yandra Rahardian P, M.T.

B. PROFIL PTAI RESPONDEN

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan salah satu Perguruan Tinggi Islam di Makasar. UIN Alauddin Makassar pada awalnya merupakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar yang berstatus sebagai Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perubahan ini berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penergian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penergian Fakultas Tarbiyah UMI



menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian Menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.

Pada tahun 1965, tiga fakultas yang telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin berubah status menjadi mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965 yang kemudian berubah menjadi IAIN Alauddin. Nama ini diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Pemberian nama Alauddin dicetuskan oleh para pendiri IAIN Alauddin. Pada Fase ini, IAIN Alauddin berkembang menjadi lima (5) buah Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba, yang selanjutnya dengan Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang



kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri.

Pada tahun 2005 IAIN Alauddin berubah menjadi UIN Alauddin Makassar dengan visi menjadi pusat keunggulan akademik dan intelektual yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan nilai-nilai akhlak mulia, kapasitas, potensi, dan kepribadian muslim Indonesia yang lebih berperadaban. Sedangkan misinya adalah untuk:

1. Memperkokoh tekad untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan intelektual yang komprehensif yang membuahkan masyarakat yang kosmopolitan dan berperadaban
2. Menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia serta dasar-dasar spritual, keimanan dan ketaqwaan.
3. Mengintegrasikan kembali ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mengembangkan potensi dan kapasitas mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai landasan yang kokoh untuk menjadi cerdas, dinamis, kreatif, mandiri dan inovatif.
5. Memperkuat pengembangan dan pengelolaan sumber daya fisik, fiskal dan manusia melalui kerjasama dan interkoneksi.

Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakultas menjadi 7 (tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu:



- a. Fakultas Syari'ah dan Hukum
- b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- c. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- d. Fakultas Adab dan Humaniora
- e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- f. Fakultas Sains dan Teknologi
- g. Fakultas Ilmu Kesehatan.
- h. Program Pascasarjana(PPs)

2. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati merupakan kelanjutan dan pengembangan dari IAIN SGD Bandung, dimana IAIN SGD Bandung didirikan pada tanggal 8 Agustus 1968 M (10 Muharram 1388 H) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968. Selanjutnya, berdasar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968 secara resmi berdiri untuk pertama kalinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan SK Menteri Agama tersebut, panitia membuka 4 Fakultas: (1) Syari'ah, (2) Tarbiyah, (3) Ushuluddin di Bandung, dan (4) Tarbiyah di Garut. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah di Bandung. Fakultas Syari'ah dan Fakultas lainnya yang ada di Bandung berlokasi di Jl. Lengkong Kecil No. 5.

Pada tahun 1973, IAIN SDG Bandung pindah ke Jalan Tangkuban Perahu No. 14 Pada tahun 1974 IAIN SGD pindah lagi ke Jalan Cipadung (sekarang Jl. A.H. Nasution No. 105). Pada tahun 1970, dalam rangka rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas Syari'ah di Sukabumi yang semula berinduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta digabungkan pada Fakultas Induk di Bandung. Sedangkan untuk Fakultas Tarbiyah Cirebon



yang semula berafiliasi ke IAIN Syarif Hidayatullah, tanggal 5 Maret 1976 menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada perkembangan berikutnya, pada tahun 1993, didirikan dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab. Pada tahun 1997, pengembangan diarahkan dalam bentuk penyelenggaraan Program Pascasarjana, yang dimulai dengan membuka Program S.2 Pascasarjana. Pada tahun 1997, terjadi perubahan kebijakan penataan sistem rayonisasi untuk IAIN. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula menjadi cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Cirebon; demikian juga Fakultas Syari'ah Serang yang semula merupakan cabang Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung statusnya menjadi STAIN Serang.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005, tanggal 10 Oktober 2005, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1426 H, IAIN berubah statusnya menjadi UIN sunan Gunung Djati Bandung dengan visi menjadikan UIN sebagai perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif yang mampu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum berlandaskan pradigma wahyu memandu ilmu. Sedangkan misinya adalah

1. Menyiapkan generasi *ulul Albab* yang mampu memadukan dizikir dan fikir
2. Memiliki kecerdasan spritual, emosional dan intelektual,
3. Menemukan, mengembangkan dan menerapkan ilmu, teknologi, sosial, budaya dan seni.



3. IAIN Sunan Ampel, Surabaya

IAIN Sunan Ampel dibentuk melalui Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah. Yayasan ini merupakan pihak yang menyusun rencana kerja persiapan pendirian IAIN Sunan Ampel yang terdiri dari Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang dan sarana dan prasarana pendukungnya. Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No. 17/1961, untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1964, Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964. Berdasarkan keberadaan 3 (tiga) fakultas tersebut, Menteri Agama menerbitkan SK Nomor 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya, seperti dijelaskan di atas.

Dalam rentang waktu antara 1966-1970, IAIN Sunan Ampel telah IAIN Sunan Ampel ternyata mampu berkembang dengan pesat dengan memiliki 18 (delapan belas) fakultas yang tersebar di 3 (tiga) propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Namun dalam perkembangannya 5 (lima) dari 18 (delapan belas) fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan ke fakultas lain yang terakreditasi dan berdekatan lokasinya. Selanjutnya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Samarinda dilepas dan diserahkan pengelolaannya ke IAIN Antasari Banjarmasin. Disamping itu, fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya dan statusnya berubah menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, IAIN Sunan Ampel memiliki 12 (dua belas) fakultas yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan 1 (satu) fakultas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kini, IAIN Sunan Ampel terkonsentrasi hanya pada 5 (lima) fakultas induk yang semuanya berlokasi di kampus Surabaya.



Visi IAIN Sunan Ampel adalah menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner yang unggul dan kompetitif. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, sosial dan humaniora yang memiliki keunggulan dan daya saing
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman, sosial dan humaniora yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis religiusitas
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi akademik dan profesional

4. IAIN Surakarta

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang dahulu dikenal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta adalah sebuah perguruan tinggi negeri Islam di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Gagasan pendirian sekolah ini dimunculkan oleh H. Munawwir Syadzali, MA. IAIN pada mulanya hanya menampung alumni dari Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), sebuah madrasah yang menekankan ilmu-ilmu keislaman dengan menggunakan pengantar bahasa Arab dan Inggris.

Pendirian IAIN ini dimulai dengan cara mencangkokkan ke IAIN Walisongo Semarang melalui relokasi Fakultas Ushuluddin, Kudus dan Fakultas Syari'ah, Pekalongan ke Surakarta. Keputusan ini memberikan efek yang positif. Namun pada tahun 1997, terjadi perubahan seiring adanya kebijakan bahwa seluruh fakultas IAIN, khususnya yang berada di luar kampus induknya diubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) tidak terkecuali dua fakultas yang baru beberapa tahun



pindah ke Surakarta, sehingga keduanya digabungkan menjadi satu dengan nama STAIN Surakarta.

Jurusan yang dimiliki oleh STAIN Surakarta ada 6 buah, yaitu Jurusan Syari'ah (Hukum Islam) dengan memiliki program studi Al Akhwal Asy Syakhshiyah (Hukum Keluarga), dan Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis), Ushuludin memiliki program studi Aqidah dan Filsafat serta Tafsir Hadis, Jurusan Tarbiyah memiliki program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Dakwah dan Komunikasi memiliki program studi Komunikasi Penyiaran Islam dan Bimbingan Konseling Islam, Jurusan Ekonomika dan Bisnis Islam memiliki program studi Akuntansi Syari'ah, Perbankan Islam, dan Manajemen Syari'ah, serta Jurusan Sastra memiliki program studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris.

Kemudian pada Tahun 2011, berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011, STAIN Surakarta berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan ilmu pengetahuan Agama Islam serta dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam dengan visi Institut, yaitu Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul dan mandiri, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta pembinaan akhlak karimah. Adapun misi institutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu dan amal, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.
2. Melahirkan lulusan yang unggul, berakhlak karimah, memiliki kemandirian dan daya saing tinggi.



3. Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

5. IAIN Syekh Nurjati, Cirebon

STAIN Cirebon berdiri pada awal mulanya sebagai bagian dari Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Tinggi yang kemudian diberi nama Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UNISHA). Lembaga ini dibawah binaan Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Syarif Hidayatullah. Pada tanggal 12 Agustus 1965, salah satu dari tiga fakultas di lingkungan UNISHA, yaitu Fakultas Agama dinegerikan dan diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN “Al-Jamiah” Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon. Sedangkan dua fakultas lainnya, yakni Fakultas Hukum dan Ekonomi menjadi cabang dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Atas dasar tersebut, maka pada tanggal 12 Agustus 1965 bertaransformasi sebagai IAIN Cirebon. Dalam perkembangan berikutnya, IAIN sempat membuka Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tahun 1967, namun karena kebijakan pemerintah menghendaki adanya rasionalisasi, pada tahun 1974 fakultas tersebut ditutup kembali. Kemudian sejalan dengan kebijakan itu pula, pada tanggal 15 Maret 1976 Fakultas Tarbiyah IAIN Cirebon dialihkan pembinaannya ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sampai akhirnya beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tahun 1997, sesuai dengan keputusan Presiden Nomor : 11/1997 tanggal 21 Maret 1997.

Pada tahun 2009, STAIN Cirebon berubah IAIN Syekh Nurjati Cirebon berdasarkan izin Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2009 yang



dikeluarkan pada tanggal 10 November 2009. Pergantian nama tersebut dilakukan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan dapat mengabdikan ilmu dan kemampuannya bagi masyarakat, bangsa dan agama dengan menjadikan visi dan misi IAIN Syekh Nurjati sebagai landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. IAIN Syekh Nurjati pada saat ini memiliki 5 Jurusan yakni Jurusan Tarbiyah, Syariah, Dakwah, Ushuluddin dan Adab dengan visi menjadi salah satu penyelenggara pendidikan tinggi terkemuka di bidang ketarbiyahan yang ditandai out putnya yang berakhlak karimah, memiliki kemampuan akademik dan sikap ilmiah yang tinggi, unggul dalam etos kerja dan keterampilan keguruan, serta profesional di bidang kerjanya.

Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Membentuk tim pengajar yang kompak dan berketeladanan dalam wawasan pendidikan Islam, penguasaan bidang keilmuannya serta komitmen dalam profesinya.
2. Menanamkan kepada mahasiswa; sikap ilmiah, sikap profesional, serta kepribadian guru berdasarkan semangat pendidikan Islam.
3. Mengembangkan ilmu pendidikan Islam dan umum, serta keterampilan keguruan yang Islami.

6. IAIN Sumatera Utara

IAIN Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 1973 di Medan, dilatar belakangi dan didukung oleh beberapa faktor pertimbangan objektif. Pertama, Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Negeri pada saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara, walaupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta memang sudah ada.



Kedua, pertumbuhan pesantren, madrasah dan perguruan-perguruan agama yang sederajat dengan SLTA di daerah Sumatera Utara tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang sudah tentu memerlukan adanya pendidikan lanjutan yang sesuai, yakni adanya Perguruan Tinggi Agama Islam yang berstatus Negeri. IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973 terdiri dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin yang kemudian pada tahun 1987 bertambah dengan adanya Fakultas Dakwah.

Saat ini IAIN Sumatera Utara telah mempunyai 5 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah dengan visi sebagai pusat keunggulan (center of excellence) bagi pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu-ilmu ke Islamian pada tingkat nasional dan regional untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan dan kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dengan standart metodologi keilmuan modern
2. Melaksanakan manajemen kelembagaan, kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan tingkat akuntabilitas dan reliabilitas yang tinggi
3. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan mutu yang integral (keilmuan-keislaman-moralitas-keterampilan) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya pada Tahun Akademik 1994/1995 dibuka pula Program Pascasarjana (PPS) setingkat strata dua (S2) Program Studi Dirasah Islamiyah. Untuk mendukung dan mengembangkan misi IAIN Sumatera Utara, baik ke dalam maupun keluar, Pimpinan IAIN Sumatera Utara membentuk berbagai Lembaga Non-Struktural. Saat ini



terdapat 10 Lembaga Non-Struktural yang aktif melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Sumatera Utara.

7. STAIN Samarinda

STAIN Samarinda merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Agama Islam di Kalimantan. yang diantaranya adalah Universitas Mulawarman, Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG'45) Samarinda, Universitas Widya Gama Mahakam (UWIGAMA) Samarinda, Universitas Balikpapan (UNIBA), dan Universitas Tri Dharma (UNTRI) Balikpapan dan Universitas Kutai Kartanegara. Selebihnya perguruan tinggi swasta dengan bentuk akademi, sekolah tinggi dan politeknik yang tersebar di seluruh daerah tingkat dengan total mencapai 61 perguruan tinggi.

Secara geografis, STAIN Samarinda terletak di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara historis, STAIN Samarinda memiliki akar sejarah yang kuat sebagai perguruan tinggi agama Islam di Kalimantan Timur. Pendiannya dimulai gagasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Timur pada awalnya dipelopori oleh beberapa tokoh yang tergabung dalam organisasi Islam pada tahun 1963 yang mendirikan Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Kalimantan Timur pada tanggal 18 Agustus 1963. Dalam perkembangannya kemudian mendirikan Fakultas Islam swasta. Pada tahun 1968 dibentuk berhasil tersebut Fakultas Tarbiyah yang secara resmi dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN di bawah binaan IAIN Sunan Ampel di Surabaya



Dalam perjalanannya, pada tahun 1988 pembinaan Fakultas Tarbiyah Samarinda dialihkan dari IAIN Sunan Ampel di Surabaya kepada IAIN Antasari di Banjarmasin. Dan selanjutnya pada tahun 1997 kebijakan secara nasional telah merubah status Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda. Hingga Tahun 2010, STAIN Samarinda memiliki 3 jurusan dan 8 program studi dengan program sarjana strata 1 (S1) sebagaimana berikut :

1. Jurusan Tarbiyah/PAI
2. Jurusan Tarbiyah/KI
3. Pendidikan Bahasa Arab/PBA
4. Pendidikan Bahasa Inggris/PBI
5. Jurusan Syariah/AS
6. Jurusan Syariah/MU
7. Jurusan Dakwa/MD
8. Jurusan Dakwah/KPI

STAIN Samarinda diharapkan untuk meningkatkan kualitas SDM lokal yang berdaya saing bangsa di level internasional dan daerah di level nasional dengan visi Menjadikan Perguruan Tinggi Islam Unggulan dan Terdepan dalam Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Seni dan Budaya Ke-Islaman. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya keislaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
2. Membangun tradisi akademik yang kuat dan mengakar.
3. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, skill dan sikap bermasyarakat yang profesional.
4. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis dan kreatif.



5. Mendidik mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan keagungan moral.
6. Mendidik mahasiswa untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

8. STAIN Salatiga

Pendirian STAIN Salatiga ditandai dengan berdirinya Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) "Nahdlatul Ulama" di Salatiga. yang kemudian berubah menjadi Fakultas Tarbiyah. Maksud perubahan tersebut adalah agar lembaga ini dapat dinegerikan bersamaan dengan persiapan berdirinya IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang. Dalam waktu yang bersamaan dengan proses pendirian IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang, Fakultas Tarbiyah Salatiga diusulkan untuk dinegerikan sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan disetujui pada 1969.

Ketika IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang berdiri, Fakultas Tarbiyah Salatiga mendapatkan status negeri, dan menjadi cabang IAIN Walisongo. Penegerian Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tersebut berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 tanggal 16 April 1970. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Sesuai dengan keputusan itu, STAIN tetap didudukkan sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam disiplin ilmu pengetahuan agama Islam.



Sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Tinggi, STAIN Salatiga masih tetap pula memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan institut maupun universitas negeri lainnya. Visi dari STAIN Salatiga adalah menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dalam mewujudkan keseimbangan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dengan visi tersebut, maka Misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan keluasan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan layanan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui kinerja internal dan eksternal.
4. Mengembangkan college base management dengan pelibatan stake holder dan masyarakat.
5. Mewujudkan tempat rujukan dalam keteladanan nilai-nilai Islam dan budaya bangsa.

9. STAI Balikpapan

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan pada awalnya bernama Institut Agama Islam Balikpapan IAIB yang berdiri tahun 1972 dan sempat berhenti beroperasi dari tahun 1980 hingga 1985. Namun, pada tahun 1989 kembali melaksanakan program S-1 untuk fakultas tarbiyah dan ushuluddin.

Keberadaan fakultas tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah untuk menjawab adanya kebutuhan tenaga pendidik di bidang pelajaran agama Islam. Selain itu, STAI Balikpapan mempunyai tujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang memiliki



kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman.

Mahasiswa yang kuliah di STAI Balikpapan diharapkan juga dapat mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu-ilmu ke-Islaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memiliki pengetahuan tentang Agama Islam secara komprehensif dan trampil mengajar Pendidikan Agama Islam

Hingga tahun 2011, STAI Balikpapan masih membuka jurusan ushuludin, dan juga jurusan PAI yang diminati oleh guru-guru agama yang belum sempat menyelesaikan kuliah S-1nya ataupun mahasiswa baru. STAI Balikpapan didukung para dosen yang rata-rata sarjana S-2, sekitar 80 persen. STAI Balikpapan dalam penyelenggaraannya mempunyai visi menghasilkan Sarjana Muslim yang mampu menjadi pendidik profesional, baik di lembaga formal maupun nonformal. Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan sarjana muslim bidang PAI yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi kependidikan.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan Agama Islam.
3. Menyediakan landasan-landasan kemampuan untuk pengembangan diri melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kerja sama dengan pihak lain.

10. STAIN Kediri

STAIN Kediri terletak ±128 km dari Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. STAIN Kediri berdiri diprakarsai oleh ulama dan didukung Bupati Kediri, Imam Koesoebagyo, pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1962 Panitia Persiapan Pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi di Kediri mendirikan



Sekolah Persiapan (SP) IAIN. Sekolah ini pada tahun 1964 mendirikan Fakultas Ushuluddin. Pendirian Fakultas Ushuluddin di Kediri didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI No. 33 tahun 1964 tertanggal 16 Juli 1964. Pada tahun 1997, Fakultas Ushuluddin Sunan Ampel Cabang Kediri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 1997 secara resmi berdiri sendiri dan ditetapkan sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri. Setelah menjadi STAIN perguruan tinggi ini tidak memiliki hubungan struktural lagi dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. Secara struktural STAIN Kediri berada di bawah Dirjen Perguruan Tinggi Islam Departemen Agama. Secara manajerial juga telah mandiri. Pengangkatan pegawai, penentuan pemimpin, dan anggaran telah memiliki kewenangan sendiri.

11. Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar yang lebih dikenal dengan sebutan UNISMUH Makassar berdiri pada tahun 1963. Namun, Universitas Muhammadiyah Makassar baru dinyatakan terdaftar sebagai perguruan tinggi swasta, sejak tanggal 1 Oktober 1965. Sebelum itu, Universitas Muhammadiyah Makassar hanya merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar hanya memiliki dua fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, yang menggunakan kurikulum yang sama dengan IKIP Makassar, dan Fakultas Tarbiyah yang menggunakan kurikulum yang sama dengan IAIN Alauddin Makassar.

Dalam perkembangannya, kedua fakultas ini dikembangkan dengan membuka cabang di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dimana Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan berada di Kabupaten Bone, Bulukumba, Sidrap, Enrekang, dan Parepare yang kemudian



berubah menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), kecuali cabang Parepare yang berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). Sedangkan Fakultas Tarbiyah terdapat di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Enrekang, Maros, dan Pangkep. Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki 7 Fakultas, 1 Program Pascasarjana, dan 29 Program Studi.

Fakultas-fakultas ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya dana abadi dan akses yang luas, baik dalam lingkup PTM se-Indonesia maupun akses jaringan kerja sama internal antar instansi pendidikan, birokrasi, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, Universitas Muhammadiyah Makassar juga menjadi pembina bagi seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 2 Universitas, 7 Akademik, dan 10 Sekolah Tinggi. Dalam mengemban amanah Persyarikatan, Visi dan Misi-nya, Universitas Muhammadiyah Makassar senantiasa melakukan aktivitas pengabdian sebagai upaya pemberian layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas Tridarma

Universitas Muhammadiyah Makassar terletak di bagian Selatan Kota Makassar. Sistem penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Khusus sistem pendidikan akademik, sementara ini terdiri atas jenjang Program Strata Satu (S1) dan Program Pascasarjana (S2). Kedua Program Akademik ini akan diarahkan, terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun, penyelenggaraannya dilaksanakan disetiap awal bulan September dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Setiap proses satu tahun akademik dibagi dalam dua semester, yakni semester ganjil



dan semester genap. Masing-masing di pembagian semester tersebut, dibebani beban belajar sebanyak 16 kali pertemuan dalam bentuk proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini, dapat berupa proses belajar di kelas (tatap muka), maupun dalam bentuk seminar, mid semester, praktikum, ujian akhir semester (final), dan kegiatan ilmiah lainnya.

Universitas Muhammadiyah Makassar dalam eksistensinya senantiasa terpacu pada visi dan misi yang telah disusun dan ditetapkan secara matang. Visi dari Universitas Muhammadiyah Makassar adalah menjadi perguruan tinggi islam terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri. sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran
3. Menumbuhkembangkan penelitian yang inovatif, unggul, dan berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat

12. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan gabungan dari 2 (dua) fakultas, Fakultas Syari'ah dan Tarbiyah. Kedua fakultas tersebut merupakan embrio Fakultas Agama yang dibuka pada periode transisi, yaitu ketika terjadi perubahan nama dari Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 27 Rajab 1367 H atau tanggal 10 Maret 1948 M. FIAI.

Pada tahun tersebut, UII telah memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi.



Kemudian pada tahun 1950 Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada golongan nasionalis, sehingga didirikan Universitas Gajah Mada dengan mengambil alih dari Fakultas Pendidikan Universitas Islam Indonesia yang dalam perkembangannya menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta.

Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada umat Islam, sehingga didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang embrionya diambil dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950.

Pada tahun 1961 UII membuka kembali fakultas agama, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah, kemudian kedua fakultas tersebut memperoleh status diakui pada program Sarjana Muda berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor:16 Tahun 1963, sedangkan status disamakan untuk program Sarjana baru diperoleh pada tahun 1990, sekaligus pemberian status tertinggi pertama bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia, berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: 84 Tahun 1990, tanggal 26 Mei 1990.

Perkembangan berikutnya, kedua Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah digabung menjadi satu fakultas yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam yang terjemahan bahasa Arabnya adalah Kulliyah al Dirasat al Islamiyah dan dalam bahasa Inggris adalah *Faculty of Islamic Studies*, berdasarkan Ketetapan Dewan Pengurus Badan Wakaf UII Nomor VI TAP/DP/1997 dan diberlakukan 1 April 1998, mulai kepengurusan fakultas periode 1998-2001. Penggabungan ini dimaksudkan agar pengelolaan studi keislaman (kurikuler) serta penentuan kualifikasi dosennya di lingkungan UII menjadi tugas dan tanggungjawab FIAI.



Adapun visi yang dimiliki FIAI UII adalah menjadi pusat rujukan pengembangan hukum Islam, pendidikan Islam dan ekonomi Islam yang berkualitas. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan juga misinya yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan pakar profesional hukum Islam, pendidikan Islam dan ekonomi Islam yang memiliki komitmen terhadap keunggulan kompetensi.
2. Mengembangkan, mengaktualisasikan dan mengkomunikasikan ilmu hukum Islam, pendidikan Islam dan ekonomi Islam melalui pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah.

13. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU didirikan pada tanggal 7 Januari 1951, merupakan perguruan tinggi pertama yang berdiri diluar pulau Jawa, yang dipelopori oleh tokoh pemuda muslim saat itu, yaitu Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariyani AS, Rivai Abdul Manaf Nasution, dan Sabaruddin Ahmad. UISU pada mulanya membuka kelas persiapan Akademi Islam Indonesia (setara dengan kelas III SMA bagian A) dan selanjutnya dengan dukungan Bapak Abd. Hakim (Gubernur Sumatera Utara saat itu) dan Bapak K.H. A. Wahid Hasyim (Menteri Agama saat itu) Akademi Islam Indonesia dirubah menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTAI) dan dimulailah peresmian kegiatan perkuliahan pertama pada 7 Januari 1952 pada Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan. Selanjutnya tanggal 7 Januari 1952 Miladiah bertepatan 9 Rabiul Awal 1371 Hijriah dijadikan sebagai hari jadi PTAI yang selanjutnya berubah menjadi Universitas Islam Sumatera Utara dan mendapatkan pengesahan dari Mendikbud RI No. 0677/U/1977 tanggal 31 Desember 1977.



Visi yang dimiliki adalah menjadi perguruan tinggi yang Islami, handal, teruji dan bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah Swt. Sedangkan misinya adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah islamiyah secara professional untuk membentuk sarjana muslim dan nasional yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut serta berperan dalam pembangunan ummat islam, agama, bangsa dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia

Saat ini UISU mengelola 9 Fakultas dan 26 Program Studi S-1, 3 Program Studi S-2, dan 1 Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi dan Kebijakan kerjasama UISU dengan UII Jogjakarta. Fakultas dan Program Studi yang dibina antara lain Hukum, Agama Islam, Ekonomi, Sastra Inggris, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pertanian, Kedokteran, Teknik dan Pascasarjana.

14. Universitas Sains dan Al-Qur'an Wonosobo

Yayasan Pendidikan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (YPIIQ) Jawa Tengah di Wonosobo merupakan perubahan nama dari Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ). YIIQ didirikan pada tahun 1987 berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tahun 1987. Yayasan ini merupakan pemrakarsa berdirinya 'Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jawa Tengah di Wonosobo'. Nama 'Jawa Tengah' dicantumkan sebagai manifestasi pemrakarsa dan menunjukkan bahwa IIQ adalah milik Jawa Tengah yang ditempatkan di Wonosobo.

YPIIQ kemudian mengembangkan program pendidikan tingginya menjadi sebuah universitas, dengan penambahan beberapa fakultas dan sejumlah prodi baru. Pada bulan Juni 2001 terbitlah Surat Keputusan Direktorat



Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 87/D/0/2001 tertanggal 10 Juli 2001, sebagai dasar penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo.

Nama "Universitas Sains Al-Qur'an" yang disingkat menjadi "UNSIQ" ditetapkan berdasarkan pemikiran rasional dan upaya spiritual. Secara rasional kebahasaan, kata "unsiq" dalam bahasa Arab diderivasi dari kata kerja "nasaqo" dan "ansaqo" yang berarti: menyusun, mengatur, merangkai, berbicara dengan bersajak, dan berpantun; atau dari kata dasar "an-nasaq" yang berarti: ketertiban, keteraturan, untaian, yang terangkai, dan yang tersusun rapi. Adapun fakultas-fakultas baru yang dibuka dalam wadah UNSIQ adalah: (1) Fakultas Sastra, (2) Fakultas Teknik Informatika, (3) Fakultas Teknik Industri, dan (4) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Ketiga fakultas yang terakhir di kemudian hari digabung menjadi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer.

UNSIQ berdiri berdasarkan pada cita-cita UNSIQ sebagai pendidikan tinggi model transformasi pesantren, maka visi UNSIQ dirumuskan sebagai berikut: Unggul dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran secara nyata, dengan memadukan antara mutiara pesantren dan pendidikan modern, serta mengembangkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual secara integral. Sedangkan Misi UNSIQ adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memadukan mutiara pesantren dan pendidikan modern yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal, dengan

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bebas dan merdeka dengan wawasan global yang sadar akan fitrah, fungsi dan perannya;



2. menciptakan proses pembelajaran yang dinamis, progresif dan kondusif dalam suasana diniyah, ilmiah, ukhuwah; dan
3. mengaktualisasikan mutiara pesantren dan keunggulan pendidikan modern sebagai apresiasi insan kamil dalam mengimplementasikan Islam sebagai rahmatan lilalamin.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, dirumuskan dan diderivasi tujuan yang ingin dicapai UNSIQ, yaitu:

1. terselenggaranya dinamika proses dalam menguasai, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dijiwai oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran;
2. menghasilkan cendekiawan, pakar dan ulama, yang berakhlak mulia, menjiwai nilai-nilai Islam, profesional dan kompeten, serta mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan menjawab tantangan masyarakat global; dan
3. menghasilkan lulusan pada strata pendidikan tinggi yang secara maksimal mampu membedah, menangkap dan mengimplementasikan pesan-pesan Al-Quran, serta memadukannya secara sinergis dengan teknologi modern yang dinamis, untuk kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat dan umat.

C. JENIS DATA HASIL SURVEY

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan melalui kegiatan survey pada beberapa PTAI adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategik. Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2. LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Renstra 2007-2011 UIN Alauddin



4. Rencana bisnis dan anggaran tahun 2009, UIN Alauddin
5. Rencana bisnis dan anggaran tahun 2011, UIN Alauddin
6. Profil UIN Alauddin
7. RKAKL UIN Alauddin 2009-2010
8. RKAKL UIN Alauddin 2009-2011
9. Rencana bisnis dan Anggaran Tahun 2010 IAIN Sunan Ampel
10. Profil IAIN Sunan Ampel
11. Rencana strategi bisnis IAIN Sunan Ampel
12. LAKIP IAIN Sunan Ampel
13. Studi Kelayakan STAIN Samarinda 2010-2035
14. Data Dosen dan Mahasiswa FIAI, UII
15. Profil UIN Sunan Gunung Djati
16. Renstra 2011/2012-2015/2016
17. Renstra 2007-2009 Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara
18. Beberapa data pendukung berupa capaian indikator kinerja Perguruan Tinggi dari setiap PTAI.

D. KENDALA PELAKSANAAN SURVEY

Kegiatan survey di lokasi studi menjumpai beberapa kendala dalam proses pengumpulan data/informasi, meskipun secara umum dapat dikatakan berjalan cukup lancar dan mendapatkan respon yang cukup baik dari para responden di masing-masing wilayah yang bersangkutan. Kendala yang dihadapi pada survey ini secara umum adalah sebagai berikut

- a. Tidak semua PTAI telah siap dengan data yang dibutuhkan untuk kajian. Jika pun ada, pihak instansi memerlukan waktu untuk melakukan kompilasi sehingga data/informasi tidak dapat langsung diperoleh pada saat survey dilaksanakan.



- b. Keragaman tingkat ke-detail-an data dari tiap PTAI yang disurvei maupun data yang diperoleh dari Kementerian Agama Pusat, selain itu tidak semua PTAI melakukan dokumentasi/pendataan dengan baik.
- c. Beberapa PTAI tidak dapat mengeluarkan data/informasi mengingat hal tersebut merupakan "rahasia" PTAI bersangkutan



BAB V

ANALISIS DATA

(STAKEHOLDER ANALYSIS)

A. DESKRIPSI DATA RESPONDEN

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan saat *survey* ke PTAI responden, deskripsi dokumen difokuskan terhadap beberapa sumber data sekunder seperti:

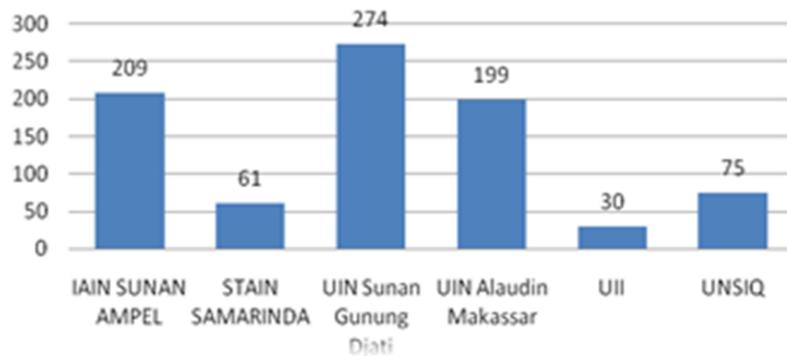
- Demografi PTAI
- Renstra Kementerian Agama untuk pengembangan PTAI
- Regulasi dan program pengembangan PTAI
- Data-data pendukung dari LAKIP PTAI terkait target dan capaian program pengembangan
- Data-data pendukung lainnya.

1. Deskripsi data PTAI Responden

Beberapa indikator terkait PTAI, seperti misalnya jumlah dosen, pendidikan dosen, akreditasi prodi PTAIN, akreditasi prodi PTAIS, akreditasi prodi PTAIN digambarkan dalam histogram di bawah ini.

a. Jumlah Dosen

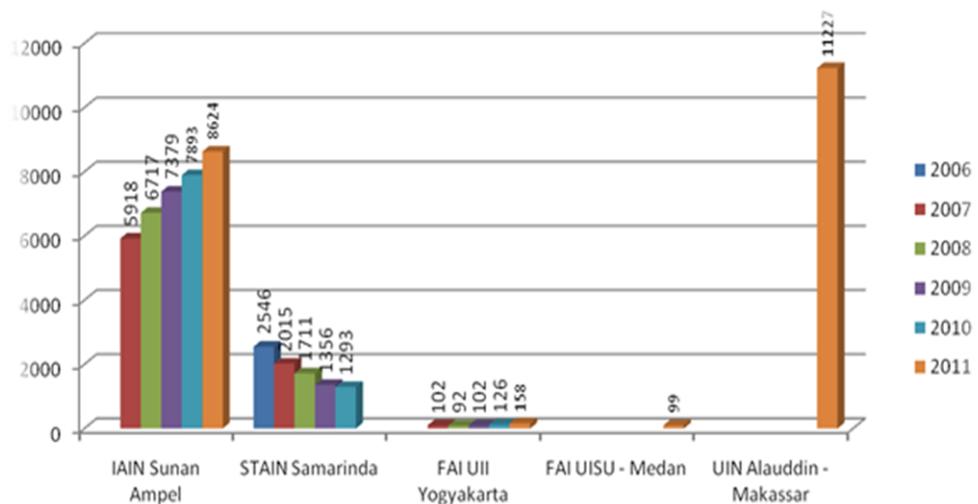
Beberapa data sekunder yang berhasil dikumpulkan menunjukkan jumlah SDM dosen di beberapa PTAI seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.1 di bawah ini. Dari Gambar 5.1 tersebut dapat dilihat bahwa dari sampel PTAI yang dilibatkan pada penelitian ini, UIN Sunan Gunung Djati memiliki jumlah SDM dosen tertinggi dibandingkan sampel lainnya. Peringkat kedua adalah IAIN Sunan Ampel yang memiliki jumlah dosen sebanyak 209. Sementara UII memiliki jumlah dosen sebanyak 30 orang untuk Fakultas Agama Islam saja.



Gambar 5.1. Perbandingan jumlah dosen pada PTAI sampel
Sumber: data sekunder dari beberapa PTAI, diolah (2011)

b. Jumlah Mahasiswa

Data perkembangan mahasiswa aktif di beberapa PTAI sampel menunjukkan *trend* yang berbeda untuk tahun 2006 s/d 2011. Data lengkap enam tahun hanya didapat dari STAIN Samarinda, IAIN Sunan Ampel FAI UII. Untuk IAIN Sunan Ampel, selama enam tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah mahasiswa sekitar 5% setiap tahunnya. Sebaliknya, STAIN Samarinda mengalami penurunan jumlah mahasiswa selama enam tahun terakhir. Untuk FAI UII terdapat kenaikan jumlah mahasiswa selama tiga tahun terakhir.

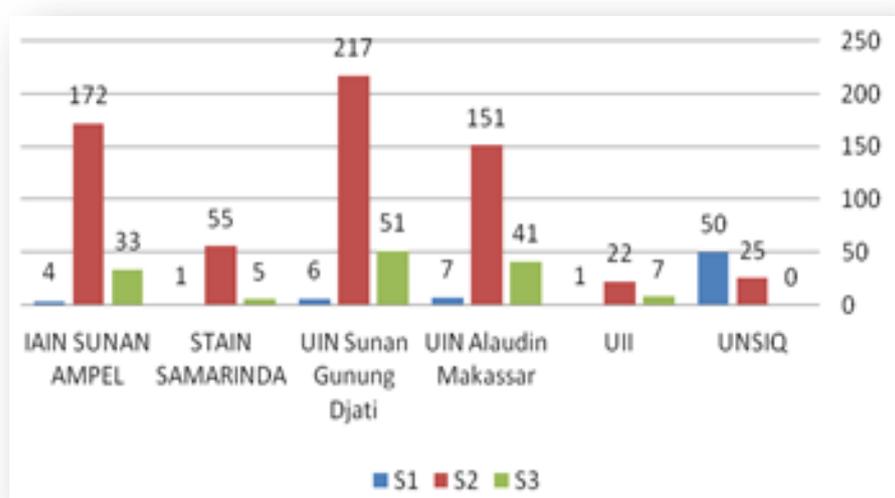


Gambar 5.2. Perkembangan mahasiswa aktif tahun 2006 hingga 2011
Sumber: data sekunder dari beberapa PTAI, diolah (2011)



c. Tingkat Pendidikan Dosen

Sementara itu, tingkat pendidikan dosen digambarkan pada Gambar 4.3 di bawah ini. Dapat kita lihat dari data yang terkumpul pada enam PTAI yaitu IAIN Sunan Ampel, STAIN Samarinda, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Alauddin Makassar, UII dan UNSIQ. Secara statistik, UIN Sunan Gunung Djati memiliki 51 dosen berpendidikan S3, 217 dosen berpendidikan S2 dan 6 dosen berpendidikan S1. Sedangkan IAIN Sunan Ampel memiliki dosen dengan perbandingan S1:S2:S3 sebesar 15.8% S3, 82.2% S2 dan 1.9% S1. Sementara UNSIQ masih memiliki 66.7% dosen dengan pendidikan akhir S1. Data-data tersebut menunjukkan bahwa di beberapa PTAI masih cukup rendah kualifikasi SDM dosen yang dimiliki. Keterbatasan akses beasiswa mungkin menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh dosen PTAI.



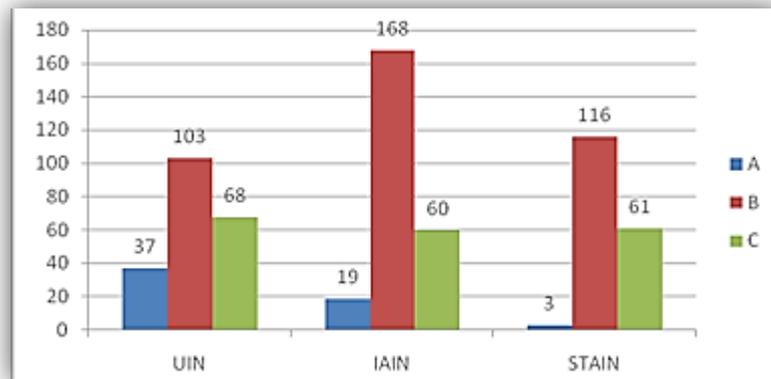
Gambar 5.3 Tingkat pendidikan dosen PTAI
Sumber: data sekunder dari beberapa PTAI, diolah (2011)

d. Akreditasi Program Studi

Pada Gambar 54 di bawah ini dapat dilihat bahwa UIN memiliki prodi terakreditasi terbanyak dibandingkan IAIN dan STAIN. Namun demikian,



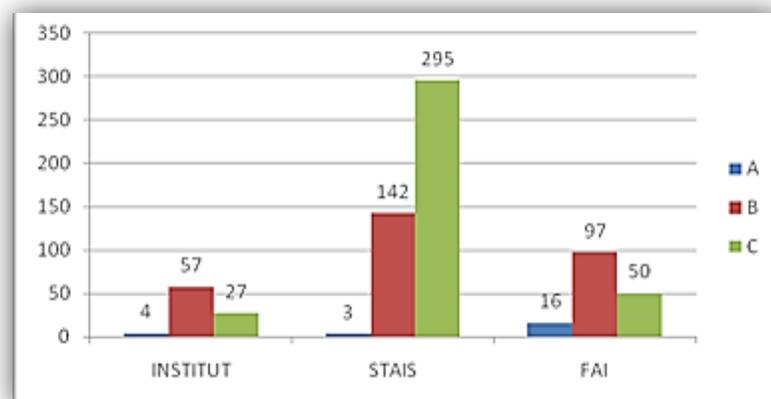
prodi yang terakreditasi C di UIN juga masih cukup tinggi yaitu sebanyak 68 dari keseluruhan prodi yang berjumlah 208 atau sebesar 32.7%. Sementara itu STAIN hanya memiliki prodi terakreditasi A sebesar 1.7% dari total 180 prodi.



Gambar 5.4 Akreditasi prodi PTAIN

Sumber: www.ranking-ptai.info

Sementara itu Gambar 5.5 menunjukkan jumlah prodi terakreditasi di institut, STAIS dan FAI di perguruan tinggi umum. Histogram menunjukkan masih rendahnya prodi yang terakreditasi A baik di institut, STAIS maupun FAI yaitu kurang dari 1% dari total prodi terakreditasi.

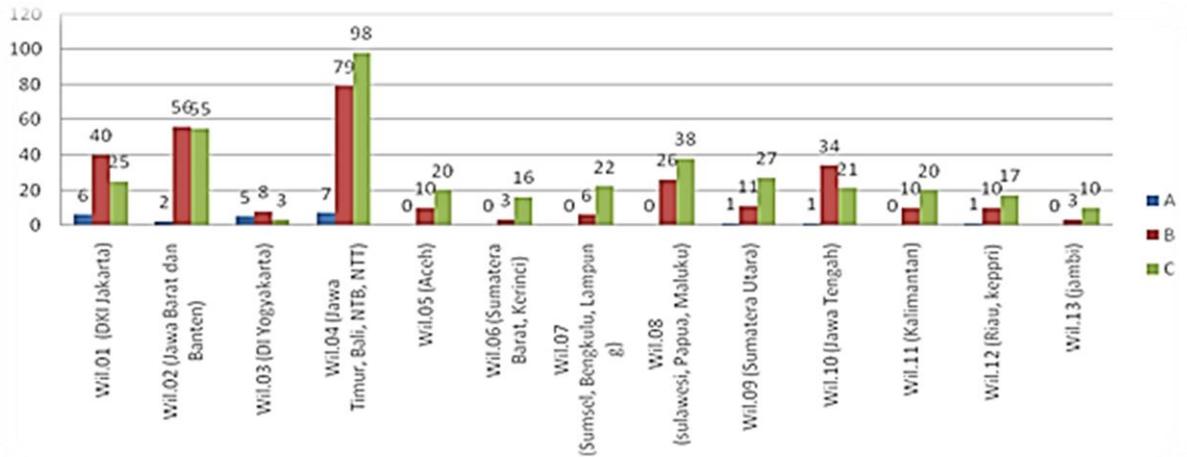


Gambar 5.5 Akreditasi prodi PT AIS

Sumber: www.ranking-ptai.info



Sementara itu, apabila dilihat dari sebaran wilayah PTAIS, akan terlihat perbedaan yang signifikan akreditasi prodi antara PTAIS di wilayah Jawa dan luar Jawa. Prodi dengan nilai akreditasi A dan mayoritas B berada di wilayah 01, 02, 03, 04 yang tersebar di wilayah Jawa (termasuk Bali dan NTB).



Gambar 5.6 Akreditasi PTAIS menurut wilayah
Sumber: www.ranking-ptai.info

2. Kegiatan Strategis Pengembangan PTAI

Sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelumnya, untuk pengembangan PTAI, telah disusun sebuah Rencana Strategis yang berisi berbagai program dan target untuk tahun 2010 – 2014. Beberapa program dan target bagi Pengembangan PTAI dapat dikelompokkan kedalam empat aspek dalam penelitian ini sebagaimana tercantum dibawah ini:

AKADEMIK & KELEMBAGAAN	SDM
<p><i>UIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian prodi umum - Penguatan kurikulum prodi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kerjasama penelitian - Pengembangan kerjasama penelitian dengan pemda, pemerintah pusat, lembaga swasta dan lembaga luar negeri - Peningkatan kemampuan bahasa asing - Mengembangkan UIN sebagai PT BHP dan BLU - <i>Twining degree</i> - Penggunaan bahasa asing dalam 	<p><i>UIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan diklat bagi pustakawan - Penyelenggaraan diklat bagi laboran pada semua jenjang - Pelatihan penyusunan laporan keuangan sistem SAKIP bagi tenaga administratif pada semua jenjang - Penyelenggaraan diklat bagi seluruh staf pada - Pemberian bantuan pendidikan bagi dosen yang studi lanjut



<p>pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan prodi bertaraf internasional - Pelayanan administrasi pendidikan berbasis ICT 	
<p><i>IAIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi kelembagaan - Pemenuhan standar ISO 9001 - Kerjasama dengan PT luar negeri - Pengembangan jaringan kerjasama dengan alumni dan lembaga-lembaga pengguna - Merintis prodi bertaraf internasional - Pengawasan terhadap kinerja dan pelayanan administratif dan akademik 	<p><i>IAIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan penelitian - Bantuan penerbitan jurnal ilmiah
<p><i>STAIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi kelembagaan bagi STAIN - Pemetaan spesialisasi dan keunggulan keilmuan yang dimiliki oleh setiap STAIN 	<p><i>STAIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas manajerial personel (kepala perpustakaan, Ketua Lemlit, Ketua LPM) - Peningkatan kualitas layanan staff administrasi dan akademik - Pelatihan penyusunan renstra untuk level pimpinan
<p style="text-align: center;">SARANA & PRASARANA</p> <p><i>UIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pusat-pusat penelitian unggulan - Pembuatan kurikulum integrative - Pengembangan perpustakaan/digital library - Menyediakan media publikasi karya ilmiah bagi para dosen(jurnal, e-jurnal) - Meningkatkan sarana-prasarana ICT dalam pembelajaran - Pemetaan kebutuhan sarana prasarana pendidikan - Pengadaan sarana prasarana berdasarkan master plan 	<p style="text-align: center;">ANGGARAN</p> <p><i>UIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan dana riset dan publikasi ilmiah
<p><i>IAIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan laboratorium yang sesuai dengan tuntutan keilmuan 	<p><i>IAIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan penelitian - Pemberian bantuan peningkatan mutu akademik
<p><i>STAIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan perpustakaan berbasis IT - Perumusan dan pengembangan standardisasi sarana prasarana penunjang akademik 	<p><i>STAIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kegiatan dan anggaran STAIN

Gambar 5.7. Pemetaan Kegiatan Strategik Kemenag 2010 – 2014 untuk PTAI
Sumber: Renstra Kemenag (2010)



3. LAKIP PTAI Responden

Dalam survey yang dilakukan, LAKIP hanya didapatkan dari dua PTAI yaitu IAIN Sunan Ampel dan UIN Alauddin Makassar. Fokus analisis LAKIP adalah pada target dan tingkat capaian masing-masing program. Secara lebih detail akan dijelaskan beberapa contoh program yang direncanakan di IAIN Sunan Ampel dan UIN Alauddin Makassar dengan tingkat capaian programnya.

a. IAIN Sunan Ampel, Surabaya

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, analisis dilakukan meliputi empat aspek yaitu yang terkait SDM, kelembagaan, sarana & prasarana dan anggaran. Seperti yang disebutkan dalam LAKIP IAIN Sunan Ampel 2009 ada 4 sasaran yaitu:

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
- Perbaikan tata kelola lembaga
- Meningkatnya jaringan kerjasama dengan lembaga lain

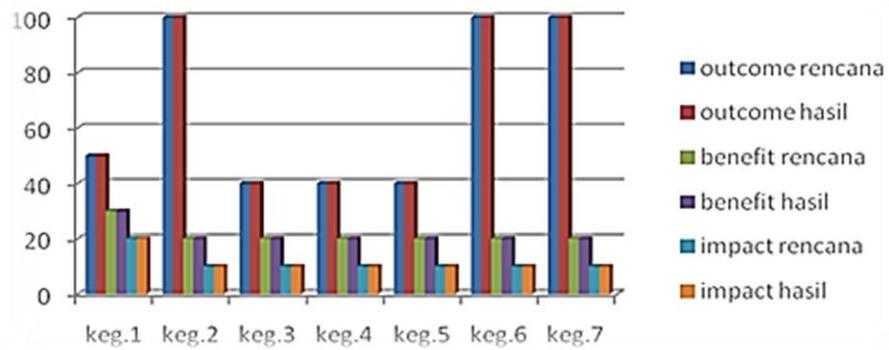
Sumber daya manusia

Beberapa program terkait pengembangan SDM di IAIN Sunan Ampel pada umumnya capaiannya sesuai dengan target. Gambaran target dan capaian program-program tersebut dapat dilihat pada histogram-histogram di bawah ini.

Pada Gambar 5.8 dapat dilihat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kualitas tenaga kependidikan diantaranya workshop peningkatan pelayanan kepegawaian, workshop *quality management system*, penyusunan program berbasis kinerja, dan lain-lain. Seperti

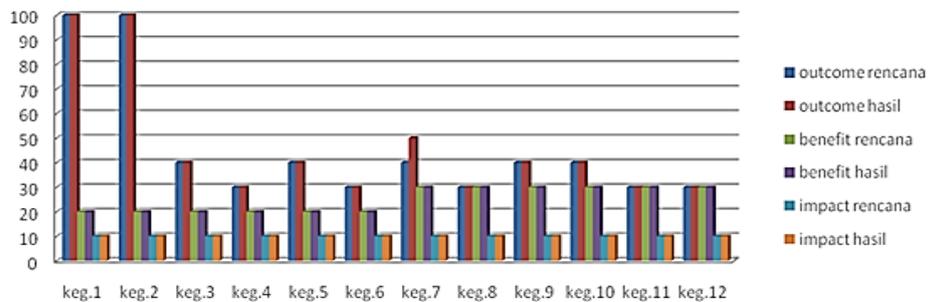


yang terlihat pada histogram tingkat capaian memenuhi target yang ditetapkan.



Gambar 5.8. Pengembangan kualitas tenaga kependidikan
Sumber: data LAKIP IAIN Sunan Ampel, diolah (2009)

Sementara itu pada Gambar 5.9 menunjukkan beberapa kegiatan yang dilakukan adalah bantuan studi/beasiswa S2, S3 bagi dosen di lingkungan IAIN Sunan Ampel, workshop pembelajaran, peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dan lain-lain.



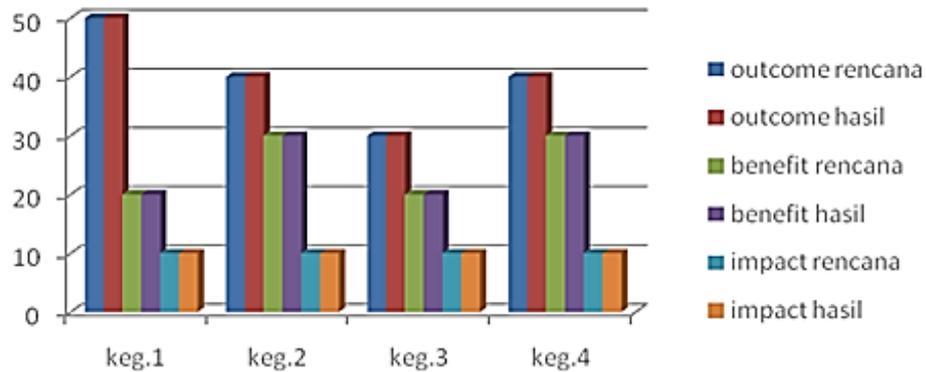
Gambar 5.9. Peningkatan kuantitas dan kualitas dosen
Sumber: data LAKIP IAIN Sunan Ampel, diolah (2009)

Histogram menggambarkan tingkat capaian yang sama dengan target atau 100% untuk semua kegiatan terkait pengembangan kualitas SDM dosen.

Pada Gambar 5.10 menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan IAIN Sunan Ampel terkait peningkatan kuantitas dan kualitas dosen dalam



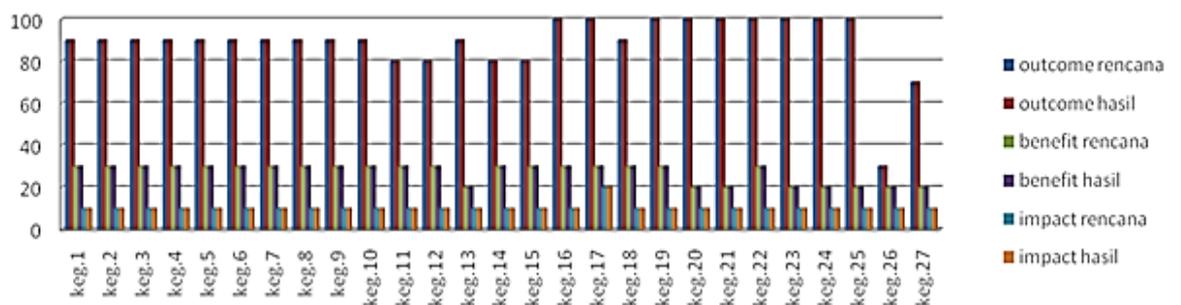
penelitian. Upaya-upaya tersebut diantaranya dalah melalui workshop manajemen penelitian, pendidikan bagi peneliti muda, workshop evaluasi penelitian dan workshop pengembangan lembaga penelitian. Kesemua kegiatan yang dilakukan tingkat capaiannya 100%.



Gambar 5.10. Peningkatan kuantitas dan kualitas dosen dalam penelitian
Sumber: data LAKIP IAIN Sunan Ampel, diolah (2009)

Sarana dan prasarana

Terkait dengan kuantitas sarana dan prasarana, Gambar 5.11 di bawah ini menunjukkan tingkat capaian masing-masing kegiatan. Sebanyak 27 kegiatan dilaksanakan pada tahun 2009 dimana semuanya mencapai target. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pengadaan berbagai peralatan laboratorium yang dibutuhkan (kegiatan 1 s/d 8), penambahan daya listrik, pembangunan rusunawa, gedung multimedia, dan lain-lain.

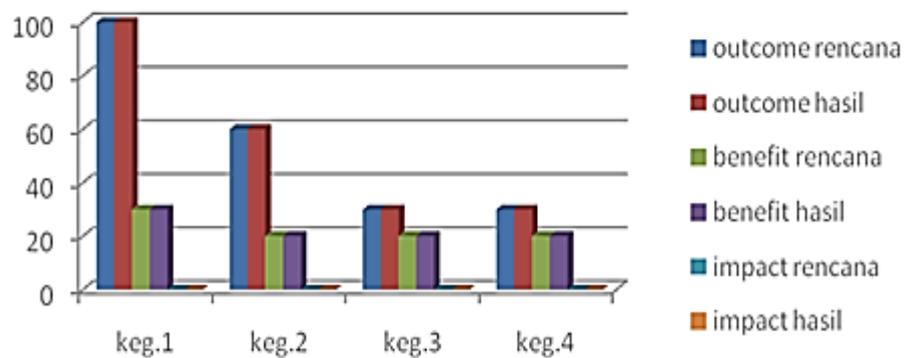


Gambar 5.11. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sumber: data LAKIP IAIN Sunan Ampel, diolah (2009)



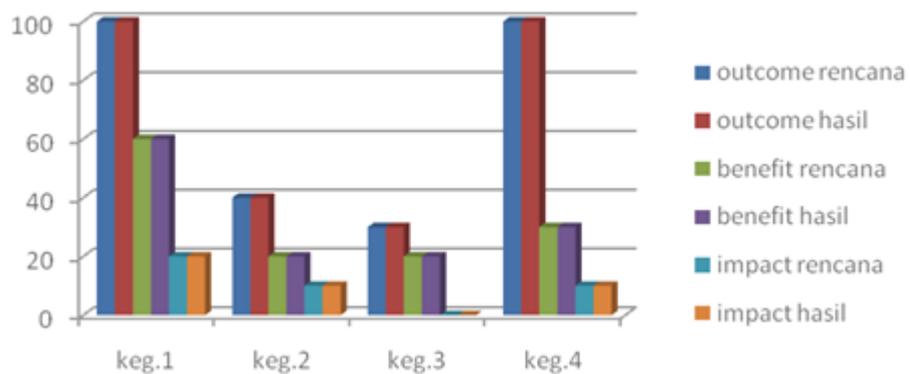
Kelembagaan

Terkait dengan peralihan PK-PNBP menjadi BLU di IAIN Sunan Ampel, beberapa kegiatan dilaksanakan seperti raker misalnya penyusunan dan pembahasan BLU, sosialisasi dan tata cara pengelolaannya dan lain-lain. Seperti yang terlihat pada Gambar 5.12 semua kegiatan mencapai target yang ditetapkan.



Gambar 5.12. Pengembangan kelembagaan
Sumber: data LAKIP IAIN Sunan Ampel, diolah (2009)

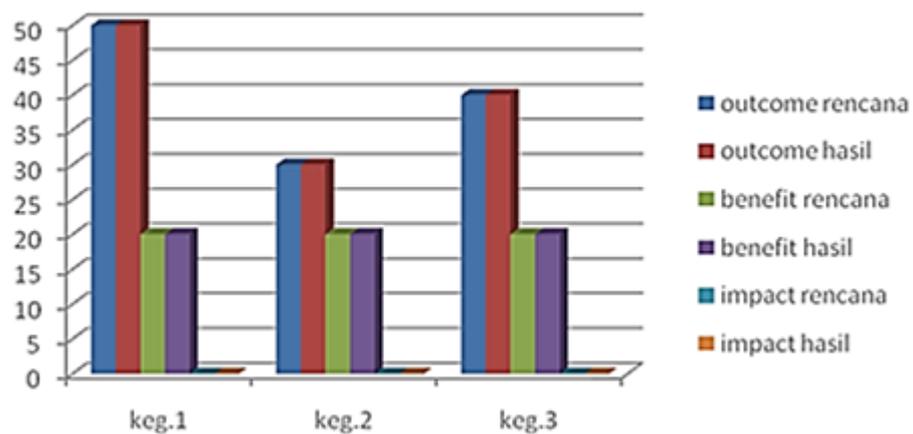
Gambar 5.13 menunjukkan beberapa kegiatan yang menunjukkan hubungan kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya pembuatan database tipologi pesantren di Jawa Timur, studi komparatif ke lembaga bahasa UGM dan lain-lain



Gambar 5.13. Kerjasama kelembagaan dalam negeri
Sumber: data LAKIP IAIN Sunan Ampel, diolah (2009)



Selain kerjasama dengan lembaga dalam negeri, IAIN Sunan Ampel menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar negeri. Beberapa kegiatan dilaksanakan untuk tujuan ini, seperti misalnya workshop perencanaan dan *revenue management* dengan The University of Melbourne, kunjungan kerja untuk menjajagi kerjasama dengan Cairo University dan Al-Azhar. Apabila dilihat dari histogram yang ditunjukkan pada Gambar 5.14 semua kegiatan berjalan sesuai target.



Gambar 5.14. Kerjasama kelembagaan luar negeri
Sumber: data LAKIP IAIN Sunan Ampel, diolah (2009)

Kelemahan

Dari analisis LAKIP IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009 yang menggambarkan target dan capaian program pengembangan PTAI berangkutan, hampir semua kegiatan yang sudah dijalankan mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa kelemahan terkait pengembangan di kedua PTAI tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

(i) Peningkatan Kualitas SDM

Dari RPJM 2006-2010, IAIN Sunan Ampel meletakkan faktor peningkatan SDM dalam prioritas utama sasaran kinerja. Hal ini didasarkan pada kesuksesan belajar mengajar 70 % bergantung pada kualitas dosen sebagai pengelola proses transformasi



keilmuan kepada mahasiswa sebagai subyek didik. Namun pada realitanya, sasaran kinerja seperti yang ditetapkan dalam RPJM agak bergeser yaitu pada tahun 2009 peningkatan kualitas dosen hanya mendapat porsi 25% dari total program kegiatan tahunan. Sasaran peningkatan SDM pada tahun itu diarahkan pada pemenuhan rekrutmen dosen dan tenaga administrasi yang memenuhi kualifikasi kebutuhan. Porsi 25% untuk peningkatan kualitas SDM dititikberatkan pada pelatihan penyusunan SAP, IT skill untuk dosen dan karyawan. Keberhasilan program peningkatan kualitas SDM dibuktikan dengan pelaksanaan e-learning di fakultas, blog dosen / karyawan dan juga penyusunan dan penyerahan SAP oleh dosen di fakultas masing-masing.

Sebagai ilustrasi, Tabel 5.1. berikut menunjukkan kenaikan bantuan beasiswa bagi dosen [data tahun 2008-2009 di IAIN Sunan Ampel].

Tabel 5.1. Kenaikan bantuan beasiswa sebagai bagian program penguatan SDM di IAIN Sunan Ampel [2008-2009]

Tahun	Penerima Bantuan Beasiswa Studi					
	Karyawan			Dosen		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
2008	6	7	1	0	6	15
2009	4	9	1	0	19	68
Jumlah	10	16	2	0	25	83

Sumber: LAKIP IAIN Sunan Ampel (2009)

Demikian halnya pada tahun 2010, peningkatan kualitas SDM diarahkan pada dosen dengan memberikan beasiswa S3 dan kesempatan mengikuti *short course* ke LN.

Selain penguatan SDM kepada dosen dan karyawan, IAIN Sunan Ampel juga memberikan beberapa program penguatan kepada



mahasiswa diantaranya pelatihan *Desktop Application Training program* (DAT program) dengan menggandeng E-BIZ Education Enterprise (perwakilan Microsoft di Indonesia). Hal ini sebagai bagian yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi lulusan IAIN Sunan Ampel dan sebagai sarana untuk membantu langkah IAIN Sunan Ampel menuju IAIN berbasis IT.

Selain memberikan program yang sifatnya peningkatan mutu mahasiswa dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik maka IAIN Sunan Ampel menyediakan bantuan beasiswa kepada 1805 mahasiswa yang menempuh studi S1, S2 dan S3. Pemberian beasiswa ini dilatarbelakangi lemahnya ekonomi orang tua mahasiswa. Dengan adanya pemberian beasiswa ini diharapkan dapat memacu semangat mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu dengan perolehan IPK yang memuaskan. Apabila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, pada tahun 2009 pemberian beasiswa meningkat 18%. Namun demikian, dari data kelulusan mahasiswa pada tahun 2009 jumlah mahasiswa yang diwisuda (S1, S2 & S3) sebanyak 1144 dari yang seharusnya 1400 mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian beasiswa belum memberi pengaruh terhadap penyelesaian studi tepat waktu apabila dilihat dari data hingga tahun 2009.

Untuk dosen, selain penguatan ditujukan pada pemberian beasiswa studi lanjut, data tahun 2008 dan 2009 menunjukkan program pemberian bantuan penelitian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.2 berikut ini.



Tabel 5.2. Bantuan Penelitian bagi Dosen IAIN Sunan Ampel
Tahun 2008-2009

Tahun	Penelitian Individu	Penelitian Kolektif
2008	-	10
2009	33	-

Sumber: LAKIP IAIN Sunan Ampel (2009)

Dapat disimpulkan bahwa jumlah bantuan penelitian di atas sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah dosen di IAIN Sunan Ampel. Pada saat interview dengan PR 1, Prof. Dr. Abd. A'la menyatakan bahwa pada tahun 2010 permasalahan berkaitan dengan bantuan penelitian juga tetap sama yaitu alokasi bantuan yang masih sangat rendah.

Seperti yang disebutkan dalam LAKIP IAIN Sunan Ampel pada tahun 2009 bahwa semua program terlaksana 100% apabila dilihat dari serapan anggaran namun *benefit* atau *impact* dari kegiatan tersebut tidak disampaikan.

(ii) Sarana Prasarana

Pada tahun 2009 berhasil dipenuhi masalah prasarana yang sempat tertunda di tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran, yaitu penambahan daya listrik. Dengan ditambahnya daya listrik ini kegiatan belajar mengajar dan juga pelayanan administrasi menjadi lancar.

Sedangkan tahun 2010 beberapa capaian dari aspek sarana prasarana adalah dibangunnya rusunawa (rumah susun mahasiswa) untuk pesantren mahasiswa, gedung multimedia dan *sport center*.



Adapun kendala pada aspek sarana prasarana adalah belum maksimalnya ruang pembelajaran berbasis IT, ruang laboratorium masih terbatas pada prodi-prodi tertentu dan ruang dosen yang belum lengkap dengan peralatan komputer.

(iii) Kelembagaan

Sebagai bentuk respon atas PP 23/2005 mengenai pengelolaan keuangan BLU, maka IAIN Sunan Ampel mengimplementasikannya dengan harapan mengurangi problem sebelumnya dimana ketersediaan DIPA yang tidak memadai untuk pengembangan institusi dari tahun ke tahun. Dengan peralihan ke BLU ini IAIN Sunan Ampel memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, fleksibel dengan prinsip efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai syarat peningkatan kualitas bagi masyarakat. Perbaikan sistem pengelolaan keuangan ini sejalan dengan Ketetapan Menkeu No. 511/2009 dimana menetapkan IAIN Sunan Ampel pada Departemen Agama sebagai instansi pemerintah yang merupakan pengelola keuangan BLU. Namun demikian hal yang dirasa cukup berat bagi IAIN Sunan Ampel adalah mengubah *mind-set* yang selama ini tertanam yaitu kegiatan yang berpatokan pada ketersediaan anggaran berubah menjadi kegiatan berbasis kinerja. Untuk mengatasi keadaan ini maka IAIN Sunan Ampel mengadakan sosialisasi PK-BLU kepada seluruh civitas akademika.

Meskipun telah dilakukan sosialisasi PK-BLU pada tahun 2009 sebanyak dua kali namun terdapat kendala terkait budaya kerja lama dari SDM, pola efektifitas dan efisiensi belum terwujud secara maksimal di tahun 2010. Hal ini diakibatkan salah satunya adalah



belum tersosialisasikannya PK-BLU dengan baik untuk level *bottom-up*.

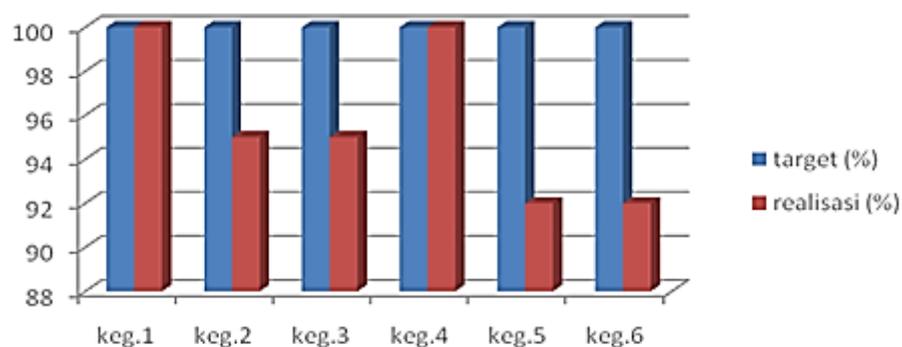
Pembinaan terhadap Kopertais juga dilakukan melalui perbaikan sistem pelayanan dan sejak tahun 2008 penerimaan PNBK Kopertais telah masuk dalam kesatuan sistem keuangan dalam satker IAIN Sunan Ampel.

b. UIN Alauddin, Makassar

Dari LAKIP UIN Alauddin Makassar tahun 2010, beberapa program dilaksanakan untuk mencapai Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Beberapa histogram di bawah ini akan mampu menggambarkan tingkat capaian dari masing-masing kegiatan beserta gambaran kegiatannya.

Kelembagaan dan akademik

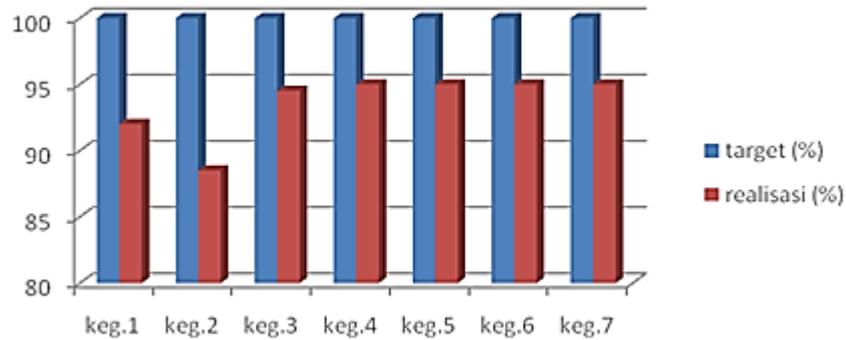
Pada Gambar 5.15 di bawah ini tergambar beberapa kegiatan terkait peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian meliputi penyelenggaraan seleksi proposal, pelaksanaan penelitian kelompok, pelaksanaan penelitian kolektif dan lain-lain. Disini kita melihat bahwa tidak semua kegiatan mencapai target yang ditetapkan.



Gambar 5.15. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian
Sumber: data LAKIP UIN Alauddin Makassar, diolah (2010)



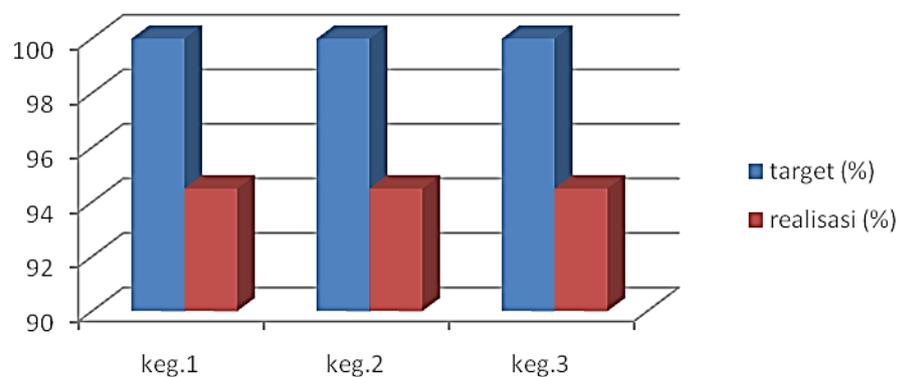
Begitu juga dengan publikasi penelitian yang menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan mencapai target yang ditetapkan seperti yang terlihat pada Gambar 5.16 berikut ini.



Gambar 5.16 Peningkatan publikasi penelitian
Sumber: data LAKIP UIN Alauddin Makassar, diolah (2010)

Sarana dan prasarana

Pada Gambar 5.17 berikut ini dapat dilihat beberapa capaian dari kegiatan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Tidak semua kegiatan terkait peningkatan fasilitas sarana dan prasarana mencapai 100% target. Misalnya kegiatan persiapan pembukaan program studi kedokteran dan rumah sakit pendidikan UIN Alauddin 94% dari target yang ditetapkan.

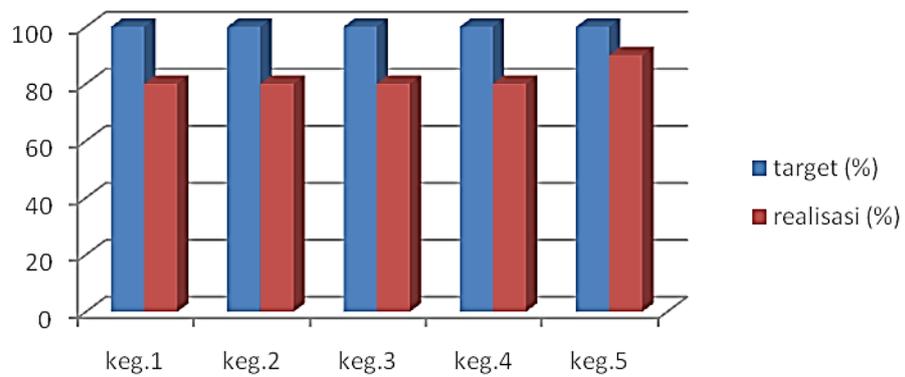


Gambar 5.17. Peningkatan fasilitas sarana & prasarana
Sumber: data LAKIP UIN Alauddin Makassar, diolah (2010)



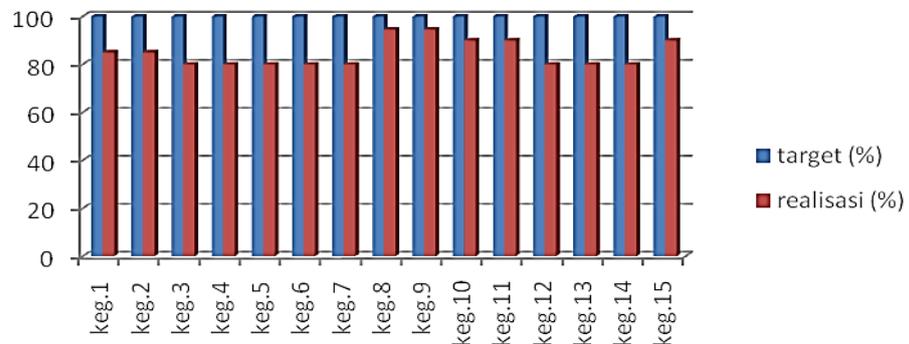
Keuangan dan anggaran

Terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan, beberapa kegiatan seperti misalnya penyelenggaraan audit internal dan pengelolaan administrasi dan manajemen BLU dilaksanakan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.18. Namun apabila kita lihat, hampir seluruh kegiatan hanya mencapai 80% dari target.



Gambar 4.18 Peningkatan manajemen dan pengelolaan keuangan
Sumber: data LAKIP UIN Alauddin Makassar, diolah (2010)

Pada Gambar 5.19 dapat dilihat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kerjasama dengan mitra luar negeri. Rata-rata kegiatan mencapai sekitar 85% dari target yang telah ditetapkan.



Gambar 5.19. Peningkatan kerjasama dengan mitra luar negeri
Sumber: data LAKIP UIN Alauddin Makassar, diolah (2010)



Kekuatan dan Kelemahan

Beberapa faktor yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari UIN Alauddin akan dijelaskan pada bagian ini. Faktor-faktor tersebut didapatkan dari LAKIP UIN Alauddin Makassar tahun 2009 dan 2010.

Tahun 2009

Beberapa aspek di bawah ini menjelaskan kekuatan yang berhasil dibangun di UIN Alauddin, diantaranya:

- SDM
Konversi ke UIN dengan dibukanya prodi-prodi ilmu umum meningkatkan jumlah mahasiswa
- Networking
Berupa pertukaran dosen, bantuan pendidikan bagi dosen yang menempuh studi lanjut
- Anggaran
Meningkatnya anggaran yang diberikan mengindikasikan meningkatnya kepercayaan pemerintah pusat dalam program
- Minimasi kurangpercayaan masyarakat terhadap UIN Alauddin dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan moral mahasiswa melalui pelaksanaan program *inner capacity*

Sementara itu, dari data LAKIP 2009 didapatkan beberapa poin yang menunjukkan kelemahan terkait permasalahan internal di UIN Alauddin, seperti misalnya:

- Keterbatasan SDM dalam pengetahuan, pengoperasian komputer dan IT untuk pengolahan data yang bersifat *computer-based*



- Pengalih-fungsian komputer sebagai alat pengolah data yang disalah fungsikan sebagai alat surat menyurat yang tidak terkait dengan kegiatan pengolahan data dan informasi
- Terbatasnya tenaga akuntansi yang menghambat proses pelaporan di tiap-tiap fakultas terkait penerapan pola keuangan BLU
- Terbatasnya biaya pemeliharaan fasilitas yang mempengaruhi kinerja

Tahun 2010 :

- SDM

Terkait SDM, ada tiga hal yang menjadi permasalahan internal di UIN Alauddin yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan program pendidikan tinggi

- Keterbatasan SDM baik jumlah maupun pengetahuan yang dimiliki khususnya bagi tenaga kependidikan, pengoperasian komputer dan teknologi informasi terkait pengolahan data untuk informasi manajemen pendidikan.
- Tenaga akuntansi yang terbatas sehingga menghambat proses pelaporan di tiap-tiap fakultas khususnya karena UIN Alauddin telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
- Perlunya disusun standar pelayanan minimum pada masing-masing unit kerja/spesifikasi tugas dan pelaksanaan koordinasi dan evaluasi.
- Perlu upaya-upaya untuk meningkatkan mutu SDM pengelola dan pelaksana bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada berbagai aspek dan tingkatannya.

2. Pelaksanaan kegiatan administrasi

- Masih kurangnya SDM yang terlatih dan terampil dalam bidang tertentu



- Kurang lancarnya laporan data maupun kegiatan dari tiap unit sehingga menyulitkan dalam penyusunan laporan akhir
- Pengendalian, pengawasan dan evaluasi program/kegiatan belum berjalan dengan baik terutama inventarisasi realisasi pelaksanaan kegiatan sehingga menyulitkan pelaporan dan penilaian pencapaian sasaran.

Terkait keberhasilan yang dicapai dalam tiga tahun terakhir (2008, 2009, 2010), UIN Alauddin mencapai beberapa keberhasilan, diantaranya:

- Peningkatan sarana dan prasarana khususnya pembangunan gedung perkuliahan yang memadai dimana hal ini merupakan dampak dari perubahan IAIN ke UIN
- Meningkatnya anggaran yang diberikan mengindikasikan meningkatnya kepercayaan pemerintah pusat dalam program
- Peningkatan penerimaan mahasiswa baru dari program studi ilmu umum
- Mengedepankan pendidikan akhlak dan moral mahasiswa melalui pelaksanaan program PIKIH

4. Isu Strategis Pengembangan PTAI berbasis deskripsi data

Terkait hasil analisis dokumen yang dilakukan khususnya dari LAKIP dua PTAIN di atas, terdapat beberapa *key points* yang harus diperhatikan bagi pengembangan PTAI kedepan yaitu:

a. Sumber daya manusia

- Penambahan kuantitas SDM khususnya dosen, apabila dilihat dari Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 misalnya di IAIN Sunan Ampel didapatkan rata-rata perbandingan dosen dan mahasiswa sebesar 1:41



- Perbaikan kualitas SDM secara terus menerus harus dilakukan untuk peningkatan kinerja baik melalui *workshop*, *short course* dan studi lanjut bagi dosen dan karyawan
- Alokasi dana penelitian dan pengabdian masyarakat bagi pendidikan tinggi yang masih minim
- Mendesaknya kebutuhan tenaga akuntan untuk mendukung implementasi PK-BLU di PTAI

b. Sarana dan prasarana

- Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar khususnya untuk ilmu-ilmu umum seperti misalnya laboratorium
- Anggaran pemeliharaan fasilitas yang masih minim

c. Kelembagaan

- Sosialisasi secara kontinyu mengenai PK-BLU untuk semua *stakeholders* bukan hanya pada level karyawan tetapi juga pimpinan tertinggi PTAI untuk mengubah *mind-set* lama dimana kegiatan hanya berbasis tersedianya anggaran
- Harus ada mekanisme kontrol yang baik terhadap *outcome* dari setiap kegiatan

B. ANALISIS KUALITATIF

Analisis kualitatif dalam penelitian ini didasari oleh data yang didapat dari proses *indepth interview* terhadap stakeholder yang terbagi atas :

1. Stakeholder dari PTAI, yang mencakup :

- Pimpinan 14 PTAI (Rektor/Ketua/Dekan, PR/Puket/PD)
- Perwakilan Dosen dari 14 PTAI (75 orang dosen)
- Perwakilan Mahasiswa dari 14 PTAI (75 orang mahasiswa)



2. Stakeholder dari kalangan KEMENAG pusat, yang meliputi :

- Dirjen Pendidikan Islam
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam
- Kepala Bagian Perencanaan Pendis
- Kasubdit Akademik
- Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Kasubdit Ketenagaan
- Kasubdit Sarana dan Prasarana

Dalam analisis kualitatif inipun, hasil akan dikelompokkan dalam empat aspek utama pengembangan PTAI yaitu kelembagaan dan akademik, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta keuangan dan anggaran. Secara rinci, rekapitulasi hasil wawancara dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Laporan Penelitian ini.

1. Akademik dan Kelembagaan

Secara akademik, kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan antara lain: penguatan materi *entrepreneurship* kepada mahasiswa; mengembangkan budaya tulis di lingkungan PTAI (misalnya, ada gerakan 1000 buku); merancang ulang ciri khas UIN, yaitu kemampuan integrasi studi Islam dengan ilmu-ilmu umum; mendorong agar setiap lulusan semua harus bisa baca tulis al-Qur'an; bagaimana memberikan wawasan keagamaan kepada dosen umum (misalnya, pendampingan dosen-dosen umum dengan wawasan keagamaan). Ada pelatihan-pelatihan untuk dosen-dosen umum; memberi kesempatan seminar internasional dan upaya-upaya untuk meningkatkan akreditasi program studi.



Sementara secara kelembagaan, kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan antara lain: transformasi kelembagaan dari IAIN ke UIN, yang diikuti penambahan fakultas, jurusan, dan prodi; membuka lembaga-lembaga non-struktural; penguatan lembaga-lembaga structural; implementasi penjaminan mutu; adopsi sistem manajemen keuangan berbasis BLU; kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan akademik; merancang *reward-punishment* dalam sistem pembelajaran (misalnya pemberian *teacher excellence* kepada dosen); membentuk deputi khusus yang menangani kerjasama dan kelembagaan; serta optimalisasi PPK-BLU.

a. Permasalahan yang ada

Permasalahan yang ada antara lain: aturan KEMENAG mengenai serdos masih belum jelas dan perlu disesuaikan; meskipun rencana pengembangan akademik, kelembagaan, sarana dan prasarana, keuangan, dan SDM telah disusun dengan rapi, namun implementasinya masih sporadis, belum fokus, *common sense approach more than planning* (dalam hal ini, pengembangan fisik tengah dilakukan dengan bantuan dana dari Pemerintah dan IDB). Di samping itu, implementasi PPK BLU berjalan lancar (misalnya, dewasa sudah diajukan, tetapi belum disetujui oleh Kemenag).

Di samping itu, arah pengembangan keilmuan perlu dirumuskan kembali; kurikulum perlu ditinjau ulang; perlu mengkaji prodi-prodi Agama yang sepi peminat; kualitas tridharma masih lemah. Di tengah-tengah pragmatisme pengelolaan PT yang sangat tinggi saat ini, maka sistem penjaminan mutu, pengembangan *atmosphere* akademik di PTAI merupakan isu penting (misalnya di STAIN Kediri, Pusat-pusat studi belum independen, Lembaga Penelitian masih menggantungkan pada APBN; Ruang dosen belum termanfaatkan dengan baik).



Permasalahan lainnya juga dirasakan di PTAI, misalnya isu *sustainability* program studi dan PTAI juga sangat mengemuka; masih terjadinya dualisme gelar lulusan mahasiswa (STAIN Kediri); perlunya reorientasi FAI, perbaikan kurikulum, kemandirian fakultas (FAI UISU). Persoalan perbedaan sekte (aliran) masih juga kental ikut menentukan kebijakan. Meskipun pemilihan rektor sudah selesai, namun perbedaan sekte(aliran) masih berlanjut sehingga asas profesionalisme akademik tercederai (UIN Makassar). Aturan-aturan KEMENAG dirasa belum tersosialisasi dengan baik. Prodi-prodi umum terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar (STAIN Salatiga) sementara kebijakan Kemenag untuk pengembangan PTAI terasa kurang mengedepankan cara *bottom-up* dari PTAI (STAIN Surakarta).

b. Isu mendesak yang perlu diselesaikan

Selain hal-hal tersebut di atas, hal-hal lain yang perlu segera diselesaikan antara lain adalah: perlu mengkaji prodi-prodi agama yang sepi peminat dan kualitas tri dharma (IAIN SU Medan). Arah pengembangan (reorientasi) keilmuan, termasuk kurikulum juga perlu ditinjau ulang dan dirumuskan kembali. Pengembangan kualitas dosen dan staf, termasuk calon mahasiswa baru (IAIN SU Medan dan UIN Bandung) juga diprioritaskan untuk di atasi. Di samping itu, belum ada *roadmap* tentang pengembangan PTAI (STAIN Kediri). Aturan mengenai serdos dan reorientasi FAI di bawah Kemenag, jumlah mahasiswa yang kurang (FAI UISU), SOP penyeleksian penerima beasiswa/bantuan studi yang tidak jelas juga menjadi masalah yang perlu diatasi. (contoh, di UIN Makassar, ada kebijakan beasiswa/bantuan di mana justru yang daftar secara pribadi-pribadi yang mendapat beasiswa/bantuan, sementara yang resmi justru tidak mendapatkannya). Ini semua kalo dibiarkan bisa merusak wibawa institusi (PTAI) (UIN Makassar).



Hal-hal lain yang juga perlu diselesaikan adalah aturan mengenai serdos, aturan mengenai gelar, penetapan standar penjaminan mutu (STAIN Samarinda), penetapan muatan kekhususan/distingsi bagi PTAI secara umum, khususnya bagi PTAI yang berlokasi cukup dekat seperti Yogya, Solo, salatiga, semarang, kudas, dan pekalongan, SOP pembukaan prodi baru dan prodi umum juga menjadi agenda penting yang perlu ditindaklanjuti (STAIN Salatiga dan IAIN Surakarta).

c. Rekomendasi

Berapa rekomendasi dalam rangka pengembangan PTAI antara lain adalah: perlu adanya kebijakan untuk peningkatan otonomi pengembangan PTAI (IAIN Cirebon); perlu ada pembinaan khusus terhadap Satker BLU; perlu mengembalikan fungsi Kemenag sebagai *policy maker*, fasilitator, bukan pelaksana kegiatan. Oleh sebab itu, dana-dana riset, peningkatan kualitas SDM harus diturunkan ke PTAI, bukan dikelola sendiri, riset-riset harus dikembangkan, didanai yang besar, dan jangan ragu investasi besar di bidang SDM, akses ke *funding*, seperti IDB harus terus dibuka untuk PTAI yang lain, agar semua PTAI berkembang.

Kemenag diharapkan fokus ke kualitas PTAI, menimbang kembali larangan IAIN menjadi UIN (IAIN SU Medan), Kemenag harus lebih sering koordinasi dengan pimpinan PTAI, Kemenag harus tahu betul BLU, dan membina, monitoring dan evaluasi harus sering dilakukan di lapangan dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan (IAIN SU Medan). Kemenag harus tegas merespon RUU PT. UIN tetap harus di bawah Kemenag, dan menolak pasal-pasal yang merugikan, jangan sampai umat Islam yang secara historis punya andil besar dalam proses pembentukan NKRI dirugikan.



Kebijakan harus diperbaiki dalam rangka pengembangan PTAI. Ini harus menjadi prioritas karena PTAI akan melahirkan manusia-manusia unggul yang dapat diandalkan untuk perbaikan nasib bangsa. Selain itu, belum ada kebijakan tentang peta pengembangan PTAI sehingga perlu ada peta pengembangan PTAI (STAIN Kediri). KEMENAG perlu selektif dalam pemberian izin penyelenggaraan PTAI/S. Diperlukan kriteria yang ketat dalam pemberian izin penyelenggaraan PTAI/S (FAI UII); disamping itu, diharapkan bantuan Kemenag untuk pengembangan akademik, kelembagaan, sarana prasarana, dan pengembangan SDM (FAI UISU). Kemenag juga harus memperhatikan FAI daerah-daerah (seperti di UISU); Kemenag harus tahu betul kondisi lapangan, monitoring dan evaluasi harus sering dilakukan di lapangan dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan; perlu ada *special treatment* bagi FAI UISU, UISU mengalami konflik perebutan yayasan, yang kami wawancarai adalah yayasan yang sah, legal menurut Kementerian Hukum dan HAM, dan yang diakui oleh Diknas (FAI UISU).

Perlu ada sesuatu yang perlu dihayati oleh Kemenag yg tidak boleh diperlakukan sama untuk semua PTAI. Kelas jauh atau mitra tidak selalu buruk. Juga perlu adareview tentang pemberian gelar yang terdengar asing di telinga. SOP pengurusan kepangkatan juga perlu ditinjau ulang (dalam pengurusan professor misalnya, PTAI/N melewati tiga tahap, tapi di Kemendiknas hanya dua tahap (UIN Makassar).

KEMENAG juga perlu lebih memperhatikan PTAI yang berada di luar Jawa (STAIN Samarinda, STAIN Balikpapan). Keberpihakan dalam berbagai hal seperti: ijin pembukaan prodi-prodi umum baru yang dibutuhkan oleh masyarakat (*wider mandate*), peningkatan status menjadi IAIN atau UIN, anggaran APBN yang memungkinkan



pengembangan akademik dan sarana prasarana dapat dilakukan secara *massive* untuk meningkatkan daya saing, termasuk membuat pusat-pusat keunggulan masing-masing PTAI/N (STAIN Salatiga).

Di samping itu, juga perlu ada kebijakan yang mendorong PTAIN (STAIN Salatiga) untuk dapat mengakses dana bantuan hibah luar negeri (STAIN Salatiga); diperlukan juga kebijakan tentang bagaimana sosialisasi dari KEMENAG kepada kementerian – kementerian lain tentang kualifikasi dan spesifikasi alumni PTAI sehingga alumni PTAI dapat lebih diterima dan berkiprah di masyarakat. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan umum tentang penyiapan SDM untuk pengelolaan dan manajemen PTAI (STAIN Surakarta).

2. Keuangan dan Anggaran

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan antara lain: peningkatan anggaran melalui kerja sama dengan pemda dan swasta, pengembangan tata kelola BLU, meningkatkan pendapatan (income), baik dari APBN maupun BLU dalam rangka peningkatan kualitas akademik, peningkatan anggaran melalui *cross-subsidies* dari alokasi kantor pusat (universitas), termasuk bantuan dari Kemenag untuk pengembangan PTAS perlu ditingkatkan. Di samping itu, juga ada kebijakan yang untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan, transparansi, *accountability*, kesiapan untuk diaudit, dan hasil audit WTP. Sementara itu, pada PTAI tertentu, anggaran mungkin diarahkan untuk pembangunan fisik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan lain juga telah dilakukan, antara lain: peningkatan anggaran untuk program 1000 buku, peningkatan anggaran untuk program penguatan akreditasi prodi, dan strategi-strategi agar dana perolehan hasil BLU dapat meningkat secara signifikan.



a. Permasalahan yang ada

Beberapa permasalahan keuangan yang dirasakan di lapangan, antara lain: aturan KEMENAG seringkali menghambat penyelenggaraan kegiatan (kontra produktif); biaya operasional belum ideal; sumber pendapatan hanya dari APBN dan SPP mahasiswa; PPK BLU belum beroperasi secara optimal; dana penelitian yang terbatas baik dari Kemenag maupun universitas; alih status menjadi UIN sangat menyedot anggaran. Selain itu, adanya ketidaksinkronan antara jumlah anggaran dengan pemenuhan kegiatan yang ada; bantuan pengembangan PTAI di luar Jawa dirasakan sangat terbatas sehingga perlu ditingkatkan.

b. Isu Mendesak yang perlu diselesaikan

Hal-hal yang perlu diselesaikan antara lain: aturan yang perlu diperjelas dalam penyelenggaraan program, tidak semua mengetahui cara kerja PPK BLU, *transparency*, *accountability*, dan sistem akuntansi. Permasalahan lainnya yang juga dirasakan antara lain: pusat-pusat studi di PTAI yang belum independen dan Lembaga Penelitian masih menggantungkan pada APBN (STAIN Kediri). Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus dari KEMENAG dan pemerintah untuk menaikkan APBN guna pengembangan akademik, pembangunan dan pengembangan kampus.

3. Sarana dan Prasarana

Di bidang Sarana-Prasarana, kebijakan pengembangan sarana dan prasarana antara lain meliputi: peningkatan sarana-prasarana kampus, perluasan tanah, pembangunan gedung perkuliahan, sarana-prasarana belajar mengajar (akses internet, laptop, system online administrasi akademik dan keuangan). Khusus bagi PTAI yang belum punya gedung



(STAI Balikpapan), maka kebutuhan untuk memiliki gedung sendiri sangat mutlak.

a. Permasalahan yang ada

Sedangkan permasalahan sarana-prasarana yang dihadapi oleh beberapa PTAI antara lain adalah: tidak sinkron antara pertumbuhan mahasiswa dengan sarana-prasarana yang ada (gedung perkuliahan semakin tidak memadai, koleksi buku yang terbatas, dll). Selain itu, permasalahan sarana-prasaran juga meliputi penataan dan perluasan ruang dan lahan bangunan-bangunan baru untuk perkuliahan. Dari semua ini, keterbatasan gedung perkuliahan menjadi masalah umum yang dialami PTAI, di samping fasilitas belajar-mengajar yang terbatas.

b. Isu Mendesak yang perlu diselesaikan

Problem sarana-prasarana yang mendesak diselesaikan antara lain: perbaikan gedung, penyelesaian proyek IDB, pembangunan baru, dan management Building.

4. Sumber daya Manusia

Kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh PTAI dalam pengembangan SDM antara lain adalah: pemberian beasiswa, pengembangan staf (degree dan non-degree), di dalam maupun di luar negeri, peningkatan dan penilaian kinerja, *reward and punishment*, karir yang jelas, penambahan jumlah staf, penguatan SDM, *reward* (bukan dalam bentuk materi, misalnya memberikan kesempatan bagi SDM yang bekerja keras namun kurang beruntung dalam seleksi untuk dibiayai mengikuti *short course*), dan pemilihan dan penempatan SDM.

Di samping itu, kebijakan lainnya antara lain adalah pemberian pelatihan kepada dosen, mahasiswa, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kinerja,



penambahan jumlah staf; bagaimana memberikan wawasan keagamaan, pendampingan dan pelatihan dosen-dosen umum dengan wawasan keagamaan, pelatihan dan studi lanjut para dosen ke jenjang yg lebih tinggi.

a. Permasalahan yang ada

Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain: peningkatan penyelenggaraan pelatihan, beasiswa, belum ada renstra SDM (SDM berkembang, tetapi tidak sesuai desain besarnya, masih mengikuti kemauan individu); pengelolaan SDM yang *centralized system*, kesulitan kenaikan pangkat, penguatan SDM melalui kesempatan studi lanjut, *short course*, dan beberapa SDM dosen masih bergelar S1 namun akan segera memasuki masa pension.

Di samping itu, belum punya dosen yang bergelar profesor dan doktor. Jumlah dosen tetap yang terbatas (kurang), kesulitan kenaikan pangkat, mendorong agar semua dosen harus sudah master dan lain-lain juga menjadi isu penting dalam pengembangan PTAI.

b. Isu Mendesak yang perlu diselesaikan

Hal-hal penting terkait dengan bidang SDM yang perlu diselesaikan segera antara lain adalah: penyelenggaraan pelatihan, pemberian beasiswa, memperjelas *career path*, khususnya untuk tenaga non-PNS, dan sistem penilaian kinerja (*reward and punishment*) yang belum jalan.

Selain itu, renstra SDM dan penegasan kualifikasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan, perbedaan sekte (aliran-aliran) masih yang kental ikut menentukan kebijakan SDM (*staffing*) juga sangat penting untuk dipecahkan. Hal ini juga termasuk pemenuhan rasio dosen dengan



mahasiswa yang kurang ideal yang juga perlu untuk ditindaklanjuti segera.

5. Analisis kualitatif Stakeholder KEMENAG pusat

Dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi agama Islam, visi Dirjend Pendis sangat jelas, yaitu: membangun manusia Muslim yang cerdas, berakhlakul-karimah, dan kompetitif. Ada 3 kata kunci di situ, yaitu: Manusia Muslim, Berakhlakul Karmah, dan Kompetitif. Ini singkat, padat, jelas, dan memberi petunjuk. Visi ini ditentukan oleh top leader di Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjend Pendis dengan memperhatikan aspirasi dari bawah. Dengan demikian, visi ini menjadi visi bersama yang harus dipedomani di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pendidikan Islam di lingkungan Pendis, termasuk di dalamnya Pendidikan Tinggi Agama Islam.

Visi ini disosialisasikan di forum Rakornas pada awal tahun kepada semua satker di bawah Dirjend Pendis, diikuti dengan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh direktorat, seperti Direktorat Madrasah dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis). Disamping itu, sosialisasi visi Pendis juga dilakukan secara terus menerus oleh unit-unit di lingkungan Pendis di setiap ada acara atau pertemuan, baik itu dalam bentuk rapat koordinasi maupun rapat-rapat yang lain.

Visi ini dengan mudah dapat dijumpai dalam dokumen Renstra Kemenag, Pendis, dan Diktis yang dapat diakses melalui Website: **www.kemenag.go.id**. Visi ini diharapkan dapat menjadi pedoman oleh semua satker di bawah Pendis dalam menyusun program dan kegiatan. Dalam konteks pengembangan PTAI, visi ini dijabarkan lebih lanjut oleh Diktis dalam bentuk program dan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan



pengabdian masyarakat. Hanya saja, monitoring terhadap implementasi visi dan misi ini diakui kurang, karena keterbatasan SDM.

Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam program-program dalam rangka pengembangan PTAI, seperti program pengadaan perpustakaan, laboratorium, gedung kuliah, ICT, dan pelatihan manajemen pengelolaan sarana prasarana PTAI. Inilah yang menjadi faktor pendukung tercapainya target – target sebagaimana tercantum di dalam Renstra Kemenag RI.

Adapun faktor penghambat terlaksananya program-program pengembangan PTAI adalah kapasitas SDM, baik yang ada di Kementerian Agama RI Pusat, maupun di PTAI itu sendiri. Di Kementerian Agama, kendala utama ada pada kapasitas SDM. Mereka kurang memiliki *skills* di bidangnya. Disamping itu, meskipun koordinasi antar bagian sudah jalan, tetapi belum intens, seperti terlihat di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Seringkali perencanaan kurang mempertimbangkan isu-isu strategis antar bagian, karena kurangnya koordinasi antar bagian. Ini dibuktikan dengan banyaknya perencanaan yang diubah di tengah jalan.

Di level PTAI, para pimpinan mereka banyak yang berlatar belakang pendidikan agama, sehingga kurang menguasai manajemen perguruan tinggi. Ini menjadi kendala tersendiri di dalam menjalankan prinsip-prinsip *good university governance*. *Level of understanding* mereka terhadap kebijakan pendidikan nasional kurang dapat diimplementasi di lapangan. Disamping *knowledge gap*, kita menemukan juga *cultural gap*. Ini menjadi hambatan bagi implementasi program pengembangan PTAI. Budaya kerja yang lamban, tidak responsif, menunggu perintah atasan masih menjadi kendala tersendiri.



Berikut ini akan diuraikan temuan Tim Riset Kebijakan dalam Rangka Pengembangan PTAI setelah melakukan Desk Evaluation dan Wawancara dengan Dirjend Pendis, Kabag Perencanaan Pendis, Kasubdis Akademik dan Kemahasiswaan Diktis, Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Diktis, Kasubdit Kerjasama Diktis Diktis, Kasubdit Sarana dan Prasarana Diktis :

a. Kelembagaan dan akademik

1. Visi dan Misi Kemenag dalam rangka pengembangan PTAI sangat jelas. Tertuang di dalam Dokumen Renstra 2010-2014, dapat dijelaskan dan dimengerti oleh para pejabat Pendis dan Diktis.
2. Visi dan Misi telah disosialisasikan di internal Kementerian Agama dan pimpinan PTAI dalam forum Raker, Rakornas, dan rapat-rapat koordinasi lainnya oleh para direktur.
3. Visi dan Misi telah diterjemahkan dalam bentuk regulasi dan program.
4. Proses perumusan kebijakan pengembangan PTAI dimulai dari penyusunan visi dan misi bersama di level Kementerian Agama, dituangkan dalam Renstra, dan diturunkan dalam bentuk program dan regulasi.
5. Pendis dan Diktis merumuskan Visi, Misi, Strategi, Program, dan Kegiatan dalam rangka pengembangan PTAI di tingkat pusat dengan melibatkan PTAI.
6. Dari tahun ke tahun, tingkat capaian meningkat seperti terlihat dalam dokumen LAKIP.
7. Masalah yang dihadapi adalah terbatasnya kapasitas SDM. Banyak yang tidak mengerti Higher Education Management. Kebanyakan berlatar belakang Agama, bukan manajemen pendidikan.



b. Sarana dan prasarana

1. Perencanaan akademik dan pemenuhan sarana prasarana pendukung akademik belum terintegrasi. Perencanaan masih parsial. Data kebutuhan sarana dan prasarana kurang lengkap. Usulan pengadaan sering terlambat.
2. Tidak ada skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana. Semua dipenuhi secara merata. Asas pemerataan lebih menonjol dari pada skala prioritas. Akibatnya, PTAI sendiri yang pro aktif mencari sumber dana untuk pengembangan sarana dan prasarana PTAI. Untuk mendukung transformasi kelembagaan dari IAIN menuju UIN, STAIN menuju IAIN, PTAI melangkah cepat dengan mengajukan ke funding, padahal regulasi mengenai transformasi, pemenuhan sarana dan prasaran melalui funding belum diatur oleh Kemenag. Semua masih berbasis pada usulan masing-masing PTAI.
3. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana PTAI belum tersedia, masih dalam proses penyusunan. Selama ini, keputusan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana PTAI didasarkan pada usulan PTAI langsung kepada Biro Perencanaan. Belum ada koordinasi yang baik antar bagian di internal Kemenag.

c. Sumber daya manusia

1. Jumlah SDM cukup, tetapi kapasitas kurang. Ini terlihat dalam proses penyusunan perencanaan.
2. Kebanyakan berlatar belakang pendidikan Agama, bukan manajemen pendidikan. Ada komitmen, tetapi kompetensi dan skills kurang memadai. Masalah ini telah diatasi dengan mengambil tenaga ahli dari PTAI untuk jabatan tertentu seperti Kabag di lingkungan Pendis dan Subdit, tetapi masih dirasa kurang jumlahnya, karena rasio orang dengan pekerjaan belum berimbang.



3. Kualitas SDM kurang memadai. Perlu diberi ketrampilan mengelola pendidikan tinggi. Terjebak dalam program dan kegiatan. Tugas utama pejabat Pendis dan Diktis adalah menyediakan kebijakan dalam rangka pengembangan PTAI, bukan pelaksana kegiatan. Disamping itu, peran utama mereka semestinya lebih kepada menjadi regulator dan fasilitator. Tetapi kenyataannya, mereka larut di dalam pelaksanaan kegiatan, implementator. Tumpang tindih ini masih terjadi, sehingga tugas utama sebagai penyedia kebijakan, fasilitator, dan regulator berjalan lamban.
4. SDM lamban merespon perkembangan PTAI. Tuntutan PTAI sangat banyak, tetapi produksi kebijakan lamban. Banyak masalah di lapangan yang belum ada regulasinya, sehingga PTAI berjalan sendiri-sendiri mencari bentuk yang cocok bagi PTAI nya sendiri.
5. SDM kurang menguasai data mengenai PTAI, sehingga tidak tahu isu-isu strategis PTAI. Ini menjadi kendala tersendiri di dalam menyusun rencana pengembangan PTAI. Respon terhadap usulan pengembangan lamban, kurang responsif.

d. Keuangan dan anggaran

1. Kebijakan anggaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sejak tahun 2006 sampai 2011, kebijakan anggaran sangat menguntungkan PTAI. Meskipun demikian, jumlah PTAI yang terlalu banyak—kurang lebih 576 PTAI, 52 diantaranya negeri—membuat anggaran yang mengalami peningkatan tersebut belum dapat meng-cover seluruh kebutuhan operasional PTAI. Kebijakan Kemenag dalam hal ini adalah mendorong PTAI mengadopsi sistem manajemen keuangan berbasis BLU sesuai PP 23 tahun 2005. Sistem ini memungkinkan PTAIN untuk mencari tambahan dana dari masyarakat melalui praktik bisnis yang sehat sesuai dengan core-



- business PTAIN. BLU memberikan ruang gerak dan fleksibilitas bagi pengelola PTAIN untuk dapat langsung memanfaatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan layanan akademiknya.
2. SPM sarana dan prasarana belum ada. Belum dirumuskan. Padahal tuntutan banyak.
 3. PTAI masih menggantungkan bantuan sarana prasarana dari Kemenag.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan PTAI

Selain analisis kualitatif terhadap empat aspek pengembangan PTAI yang telah diuraikan diatas, hasil in *indepth interview* dengan Stakeholder PTAI dan Kementerian Agama pusat juga mendapatkan sebuah penjelasan tentang faktor pendukung dan penghambat bagi Pengembangan PTAI sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a. Faktor mendukung pengembangan PTAI

Yang menjadi faktor pendukung pengembangan PTAI antara lain: kultur budaya (keislaman) di wilayah setempat (misalnya, budaya setempat [*local genius*] sangat mendukung perkembangan IAIN Cirebon), serapan lulusan yang kerja sangat tinggi, SDM dosen dan karyawan sangat potensial, letak geografis yang sangat mendukung (di UIN Bandung, misalnya, akses ke pemerintah pusat cukup dekat dan akses ke pemda yang terbuka lebar). Di samping itu, adanya *support* dari Kemenag, yang berupa peningkatan dana dan apresiasi masyarakat atas peran PTAI yang kuat (di STAIN Kediri, misalnya, peran KKN di masyarakat sangat strategis dan penting) juga menjadi pendukung pengembangan PTAI.



Hal-hal yang mendukung lainnya adalah: sistem penjaminan mutu, audit program dan monev dari yayasan yang dilakukan secara rutin (misalnya 1 tahun sekali dan monev dilakukan 2 tahun sekali), sejarah panjang suatu PTAI (misalnya di UISU), dukungan alumni, jumlah SDM yang cukup besar (di UIN Makassar misalnya, dari 600 dosen, 41 di antaranya professor dan 20 lagi calon professor), dan bantuan pemda (ada perluasan tanah dan beasiswa bagi dosen yang sekolah di luar negeri).

Demand masyarakat terhadap ilmu umum sangat tinggi, kualifikasi pendidikan dosen yang tinggi (sebagian besar PTAI dimiliki SDM dosen 100% telah S2), awareness dan semangat bekerja yang tinggi dari seluruh *staff* baik dari pegawai maupun dosen, budaya organisasi yang relatif baik, sinergi antara dosen dan karyawan, dan proses regenerasi pejabat yang lancer juga menjadi faktor pendukung dalam pengembangan PTAI.

b. Faktor penghambat pengembangan PTAI

Demand masyarakat terhadap PTAI/S berpotensi mencapai titik jenuh, SDM yang potensial belum dikelola dengan baik, biaya operasional untuk pengembangan terbatas, birokrasi yang membelenggu, aturan yg terlalu rigid, keterbatasan kemampuan SDM non-akademis karyawan, alih status yang belum terlaksana, ada kebijakan Kemenag yang susah dilaksanakan (karena kebijakan Kemenag cenderung masif sehingga ada STAIN yang merasa ngos-ngosan sebagaimana di STAIN Kediri) merupakan hal-hal yang menghambat pengembangan PTAI. Selain itu, Kemenag dirasakan belum memiliki peta atau data yang cukup tentang PTAI masing-masing sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak



selalu bisa dilaksanakan karena kondisi STAIN berbeda-beda, disamping ada juga kebijakan yang dianggap tidak sustain.

Minat mahasiswa untuk masuk jurusan keagamaan yang cenderung menurun, persaingan antar PTAI/S, peluang beasiswa untuk dosen yang masih minim, jumlah SDM kurang, biaya operasional untuk pengembangan yang terbatas, kultur lokal yang kurang kondusif (misalnya, di Sulawesi Selatan, dikatakan bahwa hanya banyak pembicara [safawiah], tapi kurang penulis [kitabah]), masalah transportasi (di STAIN Samarinda dan STAI Balikpapan, misalnya, mahasiswa mayoritas berasal dari luar), dan peminat masyarakat terhadap keilmuan Islam semakin menurun menjadi faktor yang menghambat pengembangan PTAI.

Faktor-faktor yang menghambat pengembangan PTAI lainnya adalah, antara lain: rasio dosen dengan mahasiswa yang masih kurang, sementara *demand* masyarakat terhadap ilmu sangat tinggi), peminat masyarakat terhadap keilmuan Islam semakin menurun, dan gedung untuk perkuliahan masih berbagi dengan aktivitas lain.

Di samping itu, yang menjadi penghambat lainnya, antara lain, adalah: anggaran untuk pembangunan kampus dan perluasan lahan yang masih sangat terbatas, *awareness* yang masih kurang dari pihak otoritas pengambilan keputusan di level lementerian untuk memberikan perlakuan khusus PTAI untuk berkembang terutama jika dikaitkan dengan kondisi persaingannya (misalnya, dengan PTS swasta terbesar di sebuah wilayah untuk pendidikan warganya, namun kurang akses dan "link" ke pusat pemerintahan karena masih sedikit alumninya yang berkiperh secara luas di level nasional), banyaknya PTAI / PTAIN di



sekitar wilayah sehingga ada kesan “rebutan” input (di Jawa Tengah dan DIY, misalnya, dalam radius tidak lebih dari 120 KM, STAIN Salatiga harus bersaing dengan UIN Yogya, IAIN Solo, IAIN Walisongo, STAIN Kudus, STAIN Pekalongan, dan banyak PTAIS lainnya).

Demikian juga, jumlah dan kualifikasi SDM, lahan yang terbatas, keterbatasan infrastruktur ICT, anggaran dan sistem keuangan yang tidak menunjukkan keberpihakan pada peningkatan kinerja akademik juga menjadi penghambat lainnya.

C. ANALISIS KUANTITATIF

Pada bagian ini dipaparkan hasil penilaian responden yang berasal dari perguruan tinggi yang dianggap merepresentasikan PTAI di Indonesia. Kuesioner penilaian diisi oleh wakil Dosen dan Mahasiswa pada masing-masing wakil PTAI, dimana Dosen dan Mahasiswa adalah *stakeholders* yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan.

Hasil analisis dari kuesioner ini adalah untuk melengkapi temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pemangku kebijakan di pusat dan daerah, maupun studi dokumen. Dengan demikian hasil analisis sub bagian ini menjadi komplemen dan turut meyakinkan temuan-temuan yang dihasilkan pada bagian lain penelitian ini.

1. Kuesioner

Kuesioner yang diberikan kepada responden merupakan kuesioner penilaian yang bersifat persepsional atas suatu aspek. Pertanyaan dirancang untuk mengupas empat aspek yaitu Kelembagaan dan Akademik, Anggaran, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Keempat aspek dimaksud adalah aspek-aspek yang sama dengan yang ditanyakan



atau diungkap melalui wawancara dengan para pimpinan di Kemenag maupun perguruan tinggi. Keempat aspek tersebut kemudian dikembangkan menjadi sub-sub pertanyaan sesuai dengan karakteristik masing-masingnya.

Melalui kuesioner ini para responden yang berasal dari dosen dan mahasiswa diminta untuk menyatakan penilaian persepsional mereka atas suatu aspek menggunakan dua macam ukuran; yaitu: Tingkat Kepentingan (A) dan Tingkat Kepuasan (B), dimana masing-masingnya menyatakan:

- (A) Seberapa **PENTING** suatu aspek kebijakan terhadap pengembangan Perguruan Tinggi Islam.
- (B) Seberapa besar tingkat **KEPUASAN** terhadap suatu aspek kebijakan, program dan atau kegiatan pada institusi Bapak/Ibu/Sdr.

Untuk menuangkan jawaban, responden diberikan panduan tingkat *rating* yang harus dibubuhkan. Level *rating* yang diberikan adalah antara 1 hingga 5 dengan perincian sebagai berikut:

TINGKAT KEPENTINGAN	TINGKAT KEPUASAN
➤ Skor 5 (Sangat Penting)	➤ Skor 5 (Sangat Memuaskan)
➤ Skor 4 (Penting)	➤ Skor 4 (Memuaskan)
➤ Skor 3 (Netral/Ragu)	➤ Skor 3 (Netral/Ragu)
➤ Skor 2 (Tidak Penting)	➤ Skor 2 (Tidak Memuaskan)
➤ Skor 1 (Sangat Tidak Penting)	➤ Skor 1 (Sangat Tidak Memuaskan)

Pertanyaan yang diberikan berjumlah total 35 pertanyaan dengan perincian 17 pertanyaan aspek Kelembagaan, 2 pertanyaan aspek Anggaran, 11 pertanyaan aspek Sarana Prasarana, dan 5 pertanyaan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Poin-poin pertanyaan dirancang sejalan dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden wawancara kepada para pemangku kebijakan baik di Kementerian Agama maupun di PTAI masing-masing. Diharapkan jawaban yang diberikan oleh para responden



dosen dan mahasiswa dapat mendukung dan meyakinkan temuan penelitian melalui wawancara dan studi dokumen.

Tabel 5.3. Pertanyaan Kuesioner

No	Pernyataan	(A) Tingkat Kepentingan	(B) Tingkat Kepuasan
Kelembagaan & Akademik			
1	Visi misi organisasi PTAI		
2	Visi misi PTAI dirumuskan dengan jelas		
3	Visi misi PTAI disosialisasikan dengan tepat		
4	Visi-misi PTAI diterjemahkan ke dalam program secara tepat		
5	Program pengembangan PTAI terlaksana secara baik		
6	PTAI berkontribusi bagi pembangunan nasional		
7	PTAI berkontribusi bagi pembangunan daerah		
8	PTAI berkontribusi bagi pembangunan masyarakat		
9	Dukungan kementerian lain (di luar Depag) semisal Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset dan Teknologi dalam pengembangan PTAI		
10	Dukungan lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) dalam pengembangan PTAI		
11	Dukungan pihak swasta dalam pengembangan PTAI		
12	Kondisi ekonomi dan politik bagi pengembangan PTAI		
13	Kondisi sosial dan budaya bagi pengembangan PTAI		
14	Dukungan masyarakat umum dalam pengembangan PTAI		
15	Adopsi nilai-nilai lokal dalam pengembangan PTAI		
16	Antisipasi PTAI berupa program dan kegiatan dalam mengantisipasi isu-isu global (IPTEK)		
17	Kejelasan aturan perumusan kebijakan internal PTAI		
Anggaran			
1	Keseimbangan alokasi anggaran pada bidang-bidang Kelembagaan, Akademik, SDM, dan Sarana Prasarana		
2	Transparansi pengelolaan keuangan		
Sarana Prasarana			
1	Kejelasan regulasi dan program yang terkait pengembangan sarana dan prasarana di PTAI Anda		
2	Sarana dan prasarana penunjang yang berupa : gedung – gedung Fakultas, Pusat pusat,		



No	Pernyataan	(A) Tingkat Kepentingan	(B) Tingkat Kepuasan
	Laboratorium, Fasilitas Umum, Peralatan penunjang pembelajaran, Peralatan Laboratorium, dan Infrastruktur.		
3	Pemeliharaan secara berkelanjutan terhadap sarana dan prasarana.		
4	OPTIMALisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi kegiatan penelitian.		
5	OPTIMALisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi Kegiatan Pengabdian Masyarakat		
6	OPTIMALisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi Kolaborasi dan Kerjasama bagi civitas akademika		
7	Penggunaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu lulusan		
8	Kondisi sarana prasarana untuk peningkatan daya tarik calon mahasiswa		
9	Sarana prasarana dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan daya saing		
10	Sarana prasarana mampu menciptakan efek suasana akademis yang lebih baik		
11	Sarana prasarana mampu memberikan manfaat berupa peningkatan "Value" atau "Nilai" Perguruan Tinggi dimata masyarakat.		
Sumber Daya Manusia			
1	Dukungan pengembangan SDM melalui regulasi dan program kegiatan		
2	Dukungan pengembangan SDM melalui anggaran yang memadai		
3	Dukungan pengembangan SDM melalui ketersediaan sarana prasarana		
4	Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM		
5	Penghargaan terhadap SDM yang berprestasi		
*Kuesioner selengkapnya terlampir			

2. Karakteristik Responden

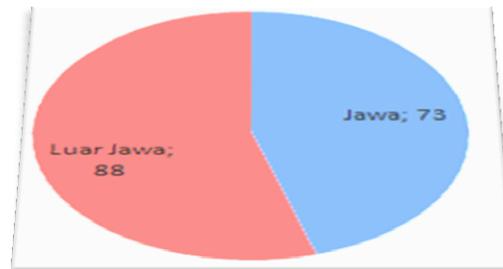
Responden kuesioner diambil di seluruh Indonesia dengan mengambil lokasi di beberapa PTAI dan dan Fakultas Agama Islam (FAI) di Perguruan Tinggi Umum yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Diambil 8 perguruan tinggi di dalam Pulau Jawa dan 6 perguruan tinggi di Luar Pulau Jawa, seperti diilustrasikan pada Bab sebelumnya.



Pada tiap-tiap lokasi perguruan tinggi disebarakan secara acak sejumlah 10 kuesioner, dimana 5 kuesioner untuk mahasiswa dan 5 kuesioner untuk dosen atau karyawan. Namun demikian untuk cadangan, pada beberapa lokasi diberikan lebih dari 5 kuesioner masing-masingnya. Total kuesioner yang disebarakan adalah 161, dimana 88 kuesioner untuk perguruan tinggi di Luar Jawa dan 73 untuk perguruan tinggi di Jawa. Secara rinci PTAI yang dijadikan responden disertai petugas pengumpul data adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4. Institusi Responden dan Petugas Pengumpul Data

No	Institusi	Daerah		Interviewer
		Jawa	Luar Jawa	
1	UIN Alauddin - Makassar		√	Dr. Ibnu Qizam, M.Si. Kifayah Amar, Ph.D.
2	IAIN Sumatera Utara		√	Drs. Jarot Wahyudi, S.H., M.A. Taufiq Aji, M.T.
3	STAIN Samarinda		√	Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc. Yandra Rahadian P., M.T.
4	FAI Univ. Muhammadiyah Makassar		√	Dr. Ibnu Qizam, M.Si. Kifayah Amar, Ph.D.
5	FAI Univ. Islam Sumatera Utara Medan		√	Drs. Jarot Wahyudi, S.H., M.A. Taufiq Aji, M.T.
6	STAI Balikpapan		√	Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc. Yandra Rahadian P., M.T.
7	UIN Sunan Gunung Djati - Bandung	√		Drs. Jarot Wahyudi, S.H., M.A.
8	IAIN Sunan Ampel	√		Kifayah Amar, Ph.D.
9	IAIN Surakarta	√		Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc.
10	STAIN Salatiga	√		Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc.
11	IAIN Syekh Nurjati - Cirebon	√		Yandra Rahadian P., M.T.
12	STAIN Kediri	√		Dr. Ibnu Qizam, M.Si.
13	UNSIQ Wonosobo	√		Taufiq Aji, M.T.
14	FAI Univ. Islam Indonesia - Yogyakarta	√		Yandra Rahadian P., M.T.



Gambar 5.20. Proporsi Jumlah Responden Jawa dan Luar Jawa

3. Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data, responden dikunjungi oleh Tim Peneliti yang berjumlah 6 orang dimana masing-masing institusi dikunjungi oleh satu atau dua orang peneliti. Pada tiap-tiap lokasi, peneliti mengumpulkan atau mengunjungi mahasiswa dan dosen di dalam kampus dimana mahasiswa yang dipilih adalah acak. Sedapat mungkin dipilih mahasiswa semester 3 ke atas, dengan harapan mereka telah mempunyai informasi memadai tentang apa yang terjadi di PTAI masing-masing. Untuk responden dosen, maka dipilih secara acak di lokasi pengambilan sampel.

Untuk memastikan kelancaran pengambilan data maka disusun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan atau memilih acak dosen dan mahasiswa
2. Menyampaikan maksud dan tujuan pengumpulan data dan penelitian
3. Menyampaikan pentingnya kejujuran dan kesungguhan pengisian kuesioner dan pentingnya hasil penelitian bagi yang bersangkutan
4. Membagikan kuesioner
5. Memberikan informasi cara pengisian kuesioner
6. Memberi waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner
7. Memeriksa kelengkapan isian kuesioner
8. Menyimpan dokumen untuk kemudian direkap



Pada tiap-tiap lokasi perguruan tinggi disebarakan secara acak sejumlah 10 kuesioner, dimana 5 kuesioner untuk mahasiswa dan 5 kuesioner untuk dosen atau karyawan. Namun demikian untuk cadangan, pada beberapa lokasi diberikan lebih dari 5 kuesioner masing-masingnya. Total kuesioner yang disebarakan adalah 161, dimana 88 kuesioner untuk perguruan tinggi di Luar Jawa dan 73 untuk perguruan tinggi di Jawa. Sebanyak 78 kuesioner diisi oleh Dosen, 2 kuesioner oleh Karyawan, dan 81 kuesioner diisi oleh para mahasiswa.

Tabel 5.5. Rekap profil responden penisi kuesioner

No	PTAI Responden	Jumlah Responden	Kelengkapan Data		Responden		
			L	TL	Dosen	Karyawan	Mhs
1	Univ. Islam Sumatera Utara	16	7	9	8	-	8
2	IAIN Medan	15	11	4	7	2	6
3	UIN Bandung	10	5	5	5	-	5
4	IAIN Cirebon	15	13	2	8	-	7
5	UNSIQ Wonosobo	12	9	3	5	-	7
6	UII Jogja	11	8	3	5	-	6
7	IAIN Surakarta	10	9	1	5	-	5
8	STAIN Salatiga	10	9	1	5	-	5
9	STAIN Kediri	10	7	3	5	-	5
10	IAIN Surabaya	10	8	2	5	-	5
11	STAI Balikpapan	10	8	2	5	-	5
12	STAIN Samarinda	11	7	4	5	-	6
13	Univ. Muh. Makassar	10	7	3	5	-	5
14	UIN Makassar	11	7	4	5	-	6
Jumlah		161	115	46	78	2	81

Dari hasil penyebaran 161 kuesioner, diperoleh kuesioner yang lengkap sebanyak 115 dan sisanya sebanyak 46 kuesioner dinyatakan tidak lengkap isianannya. Beberapa ketidaklengkapan isian kuesioner ini disebabkan pada saat pengisian kuesioner, responden tidak terpantau oleh petugas dan pengisian dilakukan di lokasi berbeda dengan petugas karena alasan



kesibukan responden. Bagi kuesioner yang tidak lengkap, maka tidak ikut diproses karena dapat mengakibatkan bias analisis. Berikut disajikan tabel rekap kelengkapan data dan siapa responden yang dituju.

4. Hasil Pengolahan data

Hasil pengumpulan data kemudian diolah dengan menggunakan dua macam pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan menentukan gap antara Tingkat Kepuasan dan Tingkat Kepentingan. Gap ini menentukan seberapa besar kepuasan atau ketidakpuasan yang dialami oleh responden. Nilai gap diperoleh dengan cara mengurangkan nilai rata-rata skor Tingkat Kepentingan dengan nilai rata-rata skor Tingkat Kepuasan. Nilai gap positif mengindikasikan bahwa terdapat ketidakpuasan sebesar nilai gap tersebut, sedangkan nilai gap negatif mengindikasikan hal yang sebaliknya.

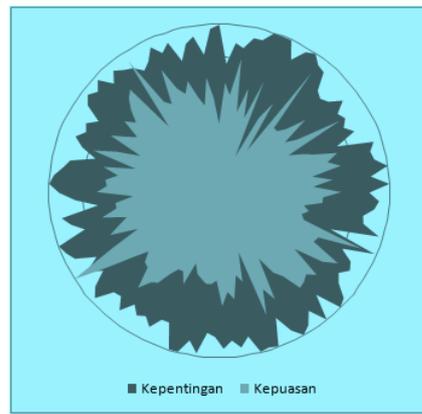
Cara kedua adalah dengan mengetahui nilai rating Kepentingan-Kepuasan atau dikenal sebagai Importance-Satisfaction Rating (IS-Rating). Pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa pemangku kebijakan akan berusaha memuaskan *stakeholders* dalam hal ini adalah sasaran kebijakan, kegiatan atau program insitusi dengan memastikan peningkatan layanan pada aspek dimana tingkat kepuasan rendah sedangkan persepsi tingkat kepentingan layanan adalah tinggi. Keterangan selengkapnya mengenai kedua pendekatan ini dijelaskan pada masing-masing bagian berikut.

a. Pendekatan Analisis Gap (*Gap Analysis*)

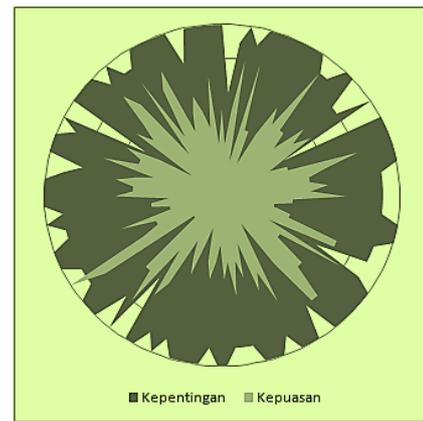
Pertama-tama dihitung rata-rata gap atas seluruh penilaian yang dimiliki oleh masing-masing responden sejumlah 115 data. Seluruh skor pada masing-masing aspek yang berjumlah total 35 pertanyaan dijumlahkan kemudian dibagi dengan 35, didapatkan rata-rata skor. Perhitungan rata-rata skor ini dilakukan baik untuk Tingkat Kepentingan maupun



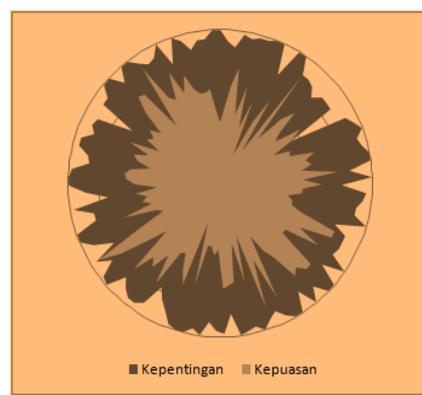
Kepuasan. Hasil hitungan kemudian digambarkan dalam bentuk grafik radar. Semakin mulus bentuk grafik radar menunjukkan bahwa variasi jawaban responden cenderung seragam. Hasil plot grafik menunjukkan adanya nilai gap yang bervariasi antar responden. Bagian yang terang menunjukkan Tingkat Kepuasan sedangkan bagian yang lebih gelap menunjukkan Tingkat Kepentingan. Dapat disimpulkan secara sekilas bahwa radar yang tampak lebih cerah adalah unsur yang lebih memuaskan bagi para responden dibandingkan radar yang terkesan gelap.



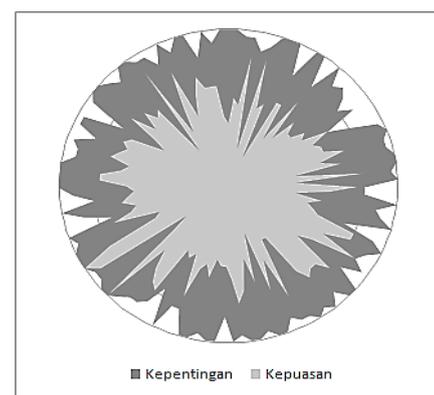
Kelembagaan & Akademik



Anggaran



Sarana Prasarana



SDM

Gambar 5.21. Gap Kepuasan-Kepentingan Masing-masing Responden



Sekilas tampak bahwa aspek Anggaran berwarna cenderung lebih gelap dan radar Kelembagaan & Akademik terlihat lebih cerah dibanding lainnya. Untuk menajamkan hipotesa awal tersebut maka dihitung rata-rata dan gap masing-masing aspek, dengan cara:

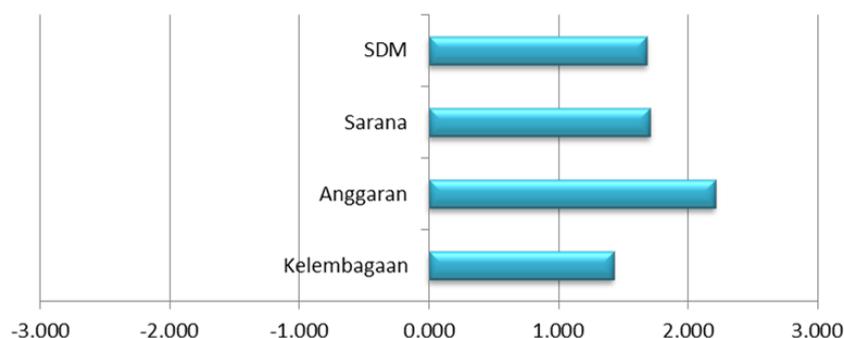
1. Hitung jumlah seluruh skor pada masing-masing aspek.
2. Rata-rata masing aspek didapat dengan membagi jumlah seluruh skor dengan perkalian antara jumlah responden dengan jumlah pertanyaan.
3. Hal tersebut dilakukan baik untuk Tingkat Kepentingan maupun Kepuasan, untuk mendapatkan nilai gap.

Didapatkan hasil sebagai berikut:

Aspek	Rata-rata Skor		Gap
	Kepentingan	Kepuasan	
Kelembagaan dan Akademik	4,540	3,118	1,421
Keuangan dan Anggaran	4,709	2,500	2,209
Sarana dan prasarana	4,653	2,946	1,707
Sumber daya manusia	4,696	3,014	1,682

Dimana aspek Anggaran mempunyai nilai gap tertinggi disusul Sarana Prasarana, SDM dan Kelembagaan dan Akademik. Nilai-nilai gap masing-masing yang tidak terpaut jauh. Artinya nilai gap sebesar rata-rata 1,597 tersebar secara merata pada masing-masing aspek tanpa terkecuali. Tidak terlihat satu aspek yang dianggap sudah memuaskan bagi responden.

Untuk memperoleh nilai gap secara total, masing-masing nilai rata-rata skor Tingkat Kepentingan dan Kepuasan tersebut dikalikan kembali dengan masing-masing jumlah sub-aspek pada tiap aspek kemudian jumlah totalnya dibagi dengan total jumlah sub aspek.



Gambar 5.22. Nilai Gap Tingkat Kepentingan vs Kepuasan

$$\begin{aligned} \text{Rerata Kepentingan} &= \frac{4,540 \times 17 + 4,709 \times 2 + 4,653 \times 11 + 4,696 \times 5}{17 + 2 + 11 + 5} \\ &= 4,607 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk Tingkat Kepuasan dihitung dengan cara serupa sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rerata Kepuasan} &= \frac{3,118 \times 17 + 2,500 \times 2 + 1,707 \times 11 + 1,682 \times 5}{17 + 2 + 11 + 5} \\ &= 3,014 \end{aligned}$$

Secara rata-rata, total Tingkat Kepentingan adalah sebesar 4,607 sedangkan total Tingkat Kepuasan adalah 3,014 dengan selisih sebesar 1,597.

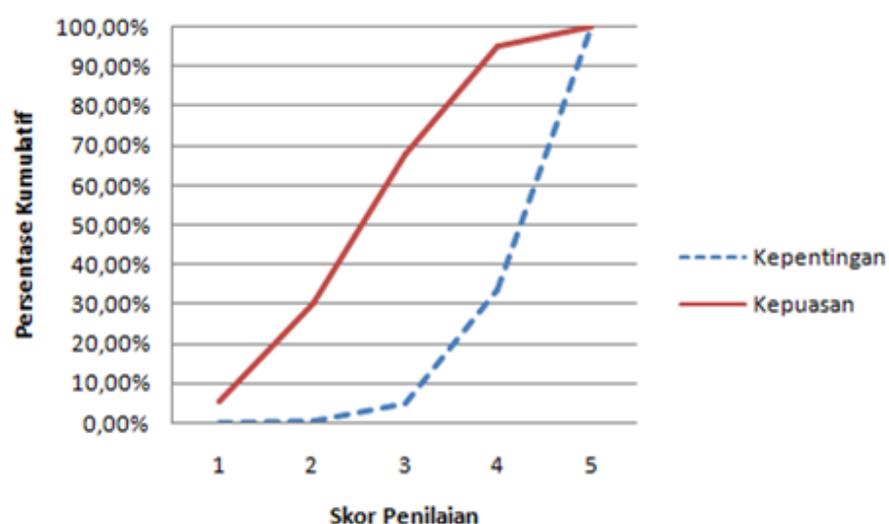
Angka tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya responden merasa bahwa hal-hal yang tertuang pada aspek kelembagaan, sarana-prasarana, anggaran, dan SDM adalah sesuatu yang terletak antara Penting-Sangat Penting; bahkan dapat dikatakan cenderung Sangat-Penting karena nilainya mendekati angka 5 (Sangat-Penting). Sedangkan untuk tingkat kepuasan, rata-rata responden menyatakan pada posisi netral. Posisi antara merasa bahwa keempat aspek tersebut Tidak Memuaskan hingga Memuaskan. Responden tampak merasa ragu-ragu atau tidak mengerti apakah dirinya merasa Puas atau Tidak Puas.



Hasil demikian secara umum dapat dikatakan bahwa pada aspek-aspek kebijakan dinilai Penting bahkan cenderung Sangat Penting, reponden merasa tidak mendapatkan layanan yang memuaskan meskipun tidak dapat dikatakan tidak puas karena penilaian responden terletak pada level netral. Meskipun secara statistik menunjukkan rata-rata netral, namun demikian kita perlu melihat kembali sesungguhnya sebaran pilihan responden pada tiap-tiap level skor. Hal ini semata-mata karena prinsip kehati-hatian terhadap respon ketidakpuasan responden.

Skor	Persentase		Persentase Kumulatif	
	Kepentingan	Kepuasan	Kepentingan	Kepuasan
1	0,10%	5,61%	0,10%	5,61%
2	0,52%	24,40%	0,62%	30,01%
3	4,27%	37,69%	4,89%	67,70%
4	28,77%	27,58%	33,66%	95,28%
5	66,34%	4,72%	100,00%	100,00%
Total	100%	100%		

Hasil hitungan tersebut apabila ditampilkan dalam grafik kumulatif adalah tampak sebagai gambar berikut:

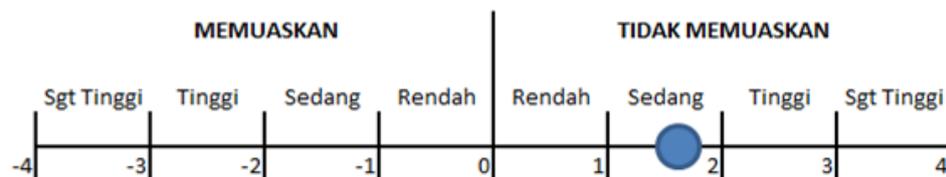


Gambar 5.23. Persentase Kumulatif Pemberian Skor oleh Responden



Secara kumulatif ketidakpuasan disampaikan oleh 30,01% responden dimana 5,61% menyatakan Sangat Tidak Puas sementara 24,40% menyatakan Tidak Puas. Nilai persentase sedemikian tentu harus mendapatkan perhatian tersendiri.

Untuk memaknai nilai gap sebesar 1,597 pada hitungan di atas, nilai gap tersebut kemudian diletakkan pada sebuah garis bilangan pada *range* minus empat (-4) hingga empat (4). Nilai range ini merupakan selisih dari skor tertinggi dan terendah. Nilai 0 menandakan bahwa tidak terdapat gap antara Kepuasan dan Kepentingan; nilai (-4) menandakan bahwa penilaian responden berada pada level Sangat Memuaskan, sedangkan 4 menandakan bahwa responden merasa Sangat Tidak Puas dengan keadaan saat ini. Untuk masing-masing titik pada garis bilangan diberikan taraf Rendah (0-1), Sedang (1-2), Tinggi (2-3), dan Sangat Tinggi (3-4).

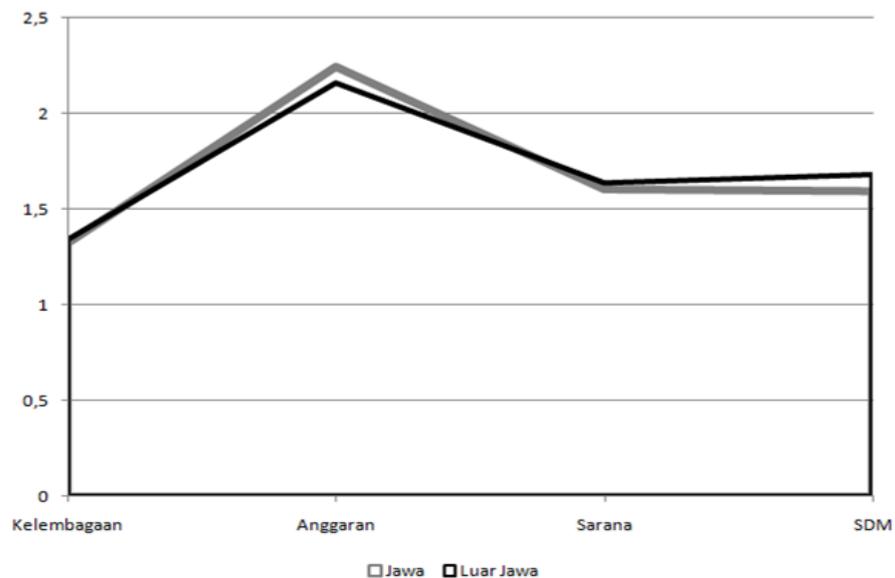


Gambar 5.24. Gap Tingkat Kepuasan dan Tingkat Kepentingan

Nilai gap 1,597 terletak pada taraf Tidak Memuaskan kategori Sedang. Namun demikian nilainya yang berada di atas titik tengah nilai Sedang, mengindikasikan bahwa nilai tersebut terletak antara nilai Sedang dan Tinggi meskipun lebih ke Sedang. Perlu diketahui bahwa secara ideal, manakala performansi telah sesuai dengan harapan tingkat kepentingan suatu aspek maka nilai gapnya adalah nol (0).



Untuk lebih meyakinkan paparan di atas, maka kemudian analisis dipisahkan antara responden PTAI di Pulau Jawa dan Luar Jawa berbeda. Didapatkan hasil yang dapat dikatakan sama antara responden yang berada di Pulau dan Luar Jawa, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di bawah.

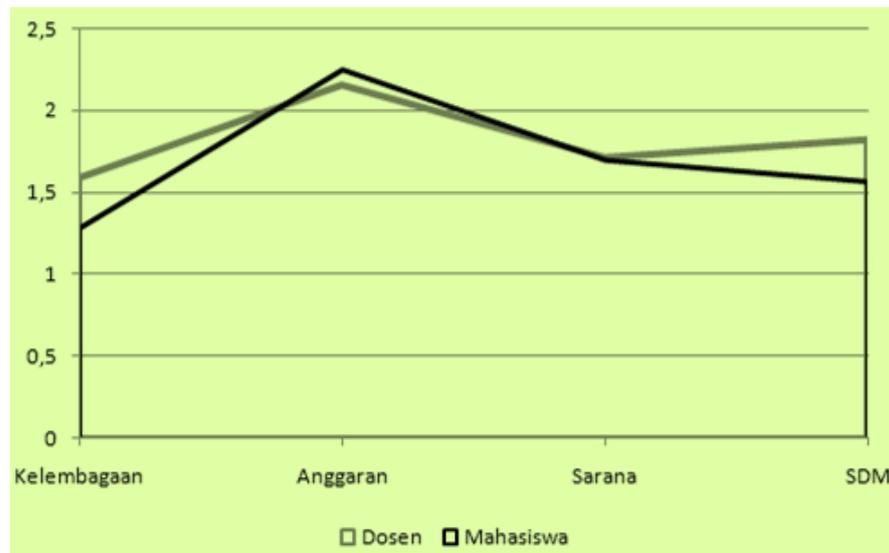


Gambar 5.25. Gap Tingkat Kepuasan dan Tingkat Kepentingan di Jawa dan Luar Jawa

Kemudian analisis dilanjutkan dengan melihat apakah terdapat perbedaan antara penilaian oleh dosen dan mahasiswa. Tampak bahwa hasilnya kurang lebih sama dengan sedikit perbedaan pada aspek Kelembagaan dan SDM, dimana pada kedua aspek tersebut dosen menunjukkan tingkat gap yang lebih tinggi pada aspek tersebut. Secara rata-rata gap yang dinyatakan oleh Dosen adalah 1,70 sedangkan gap yang dinyatakan oleh mahasiswa adalah sebesar 1,51. Apa yang dinyatakan oleh para Dosen lebih tinggi dari nilai rata-rata gap, semakin mendekati level gap yang tinggi.



Pertanyaan selanjutnya adalah unsur-unsur manakah yang memberikan sumbangan gap tertinggi. Untuk tujuan tersebut, maka nilai gap diperinci menjadi menjadi unsur pembentuk masing-masing aspek sesuai dengan daftar pertanyaan kepada responden. Diperoleh rincian masing-masing sebagai tabel-tabel berikut, dimana dari tiap tabel dipilih 3 unsur dengan gap tertinggi.



Gambar 5.26. Gap Tingkat Kepuasan dan Tingkat Kepentingan Dosen dan Mahasiswa

Tabel 5.6. Prioritas Perhatian bagi Aspek Kelembagaan dan Akademik Berdasarkan Gap

No	Item Kelembagaan & Akademik	Gap
9	Dukungan kementerian lain (di luar Depag) semisal Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset dan Teknologi dalam pengembangan PTAI	1,896
10	Dukungan lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) dalam pengembangan PTAI	1,791
17	Kejelasan aturan perumusan kebijakan internal PTAI	1,730
12	Kondisi ekonomi dan politik bagi pengembangan PTAI	1,591
16	Antisipasi PTAI berupa program dan kegiatan dalam mengantisipasi isu-isu global (IPTEK)	1,530
3	Visi misi PTAI disosialisasikan dengan tepat	1,470
1	Visi misi organisasi PTAI	1,443
11	Dukungan pihak swasta dalam pengembangan PTAI	1,435



No	Item Kelembagaan & Akademik	Gap
13	Kondisi sosial dan budaya bagi pengembangan PTAI	1,400
5	Program pengembangan PTAI terlaksana secara baik	1,365
2	Visi misi PTAI dirumuskan dengan jelas	1,357
4	Visi-misi PTAI diterjemahkan ke dalam program secara tepat	1,304
14	Dukungan masyarakat umum dalam pengembangan PTAI	1,278
6	PTAI berkontribusi bagi pembangunan nasional	1,235
7	PTAI berkontribusi bagi pembangunan daerah	1,130
15	Adopsi nilai-nilai lokal dalam pengembangan PTAI	1,113
8	PTAI berkontribusi bagi pembangunan masyarakat	1,096

Tabel 5.7. Prioritas Perhatian bagi Anggaran Berdasarkan Gap

No	Item Anggaran	Gap
2	Transparansi pengelolaan keuangan	2,339
1	Keseimbangan alokasi anggaran pada bidang-bidang Kelembagaan, Akademik, SDM, dan Sarana Prasarana	2,078

Tabel 5.8. Prioritas Perhatian bagi Aspek Sarana Prasarana Berdasarkan Gap

No	Item Sarana Prasarana	Gap
2	Sarana dan prasarana penunjang yang berupa: gedung – gedung Fakultas, Pusat pusat, Laboratorium, Fasilitas Umum, Peralatan penunjang pembelajaran, Peralatan Laboratorium, dan Infrastruktur.	2,157
3	Pemeliharaan secara berkelanjutan terhadap sarana dan prasarana.	1,965
7	Penggunaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu lulusan	1,843
1	Kejelasan regulasi dan program yang terkait pengembangan sarana dan prasarana di PTAI Anda	1,774
4	OPTAImalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi kegiatan penelitian.	1,730
8	Kondisi sarana prasarana untuk peningkatan daya tarik calon mahasiswa	1,687
10	Sarana prasarana mampu menciptakan efek suasana akademis yang lebih baik	1,678
9	Sarana prasarana dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan daya saing	1,661
11	Sarana prasarana mampu memberikan manfaat berupa peningkatan "Value" atau "Nilai" Perguruan Tinggi dimata masyarakat.	1,470
5	OPTAImalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi Kegiatan Pengabdian Masyarakat	1,435
6	OPTAImalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi Kolaborasi dan Kerjasama bagi civitas akademika	1,374



Tabel 5.9. Prioritas Perhatian bagi Aspek SDM Berdasarkan Gap

No	Item SDM	Gap
5	Penghargaan terhadap SDM yang berprestasi	1,870
2	Dukungan pengembangan SDM melalui anggaran yang memadai	1,817
3	Dukungan pengembangan SDM melalui ketersediaan sarana prasarana	1,678
4	Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM	1,565
1	Dukungan pengembangan SDM melalui regulasi dan program kegiatan	1,478

Untuk lebih meyakinkan hasil di atas, maka dilakukan pendekatan kedua yang dengan menggunakan Importance-Satisfaction Rating (I-S Rating).

b. Pendekatan *Importance-Satisfaction (I-S Rating)*

Pendekatan IS-Rating didasarkan pada konsep bahwa pemangku kebijakan akan berusaha memuaskan *stakeholders* dalam hal ini adalah sasaran kebijakan, kegiatan atau program insitusi dengan memastikan peningkatan layanan pada aspek dimana tingkat kepuasan rendah sedangkan persepsi tingkat kepentingan layanan adalah tinggi. Idealnya aspek-aspek dimana responden merasa Penting adalah aspek yang responden merasa Puas.

Untuk itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu posisi penilaian responden terhadap Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan. Berdasarkan *range* tingkat kepentingan 1-5 sebagaimana tabel Level Rating yang disampaikan di atas, maka level dimana suatu aspek adalah Penting diwakili oleh nilai “4” dan “5” sebagai tingkat Kepentingan positif. Sedangkan untuk tingkat kepuasan, level kepuasan positif juga diberikan oleh nilai “4” dan “5”.



Berdasarkan konsep di atas, maka cara menghitung IS-Rating adalah dengan menghitung persentase responden yang memilih tingkat kepentingan Penting (4) dan Sangat Penting (5). Langkah kedua adalah menghitung persentase responden yang memilih tingkat kepuasan Memuaskan (4) dan Sangat Memuaskan (5). Selanjutnya IS-Rating dihitung sebagai:

$$IS_{Rating} = \%Kepentingan \times (1 - \%Kepuasan)$$

Nilai IS-Rating tertinggi adalah 1,00; dimana hal ini menunjukkan bahwa 100% responden menyatakan bahwa keseluruhan aspek merupakan hal penting namun merasa tidak puas dengan kenyataan yang ada. Sedangkan nilai terendah adalah 0,00 dimana nilai ini dapat diperoleh oleh karena salah satu dari dua sebab:

1. Jika 100% responden merasa puas dengan keadaan saat ini.
2. Jika 0% responden menyatakan bahwa suatu aspek adalah aspek penting, dengan kata lain responden menyatakan bahwa semua aspek adalah tidak penting.

Hasil di atas kemudian diinterpretasi dengan menggunakan tiga pilihan rekomendasi, sesuai dengan hasil perolehan IS-Rating, sebagai berikut:

- Mutlak memerlukan perhatian ($IS \geq 0,20$)
- Tingkatkan perhatian ($0,10 \leq IS < 0,20$)
- Pertahankan perlakuan ($IS < 0,10$)

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

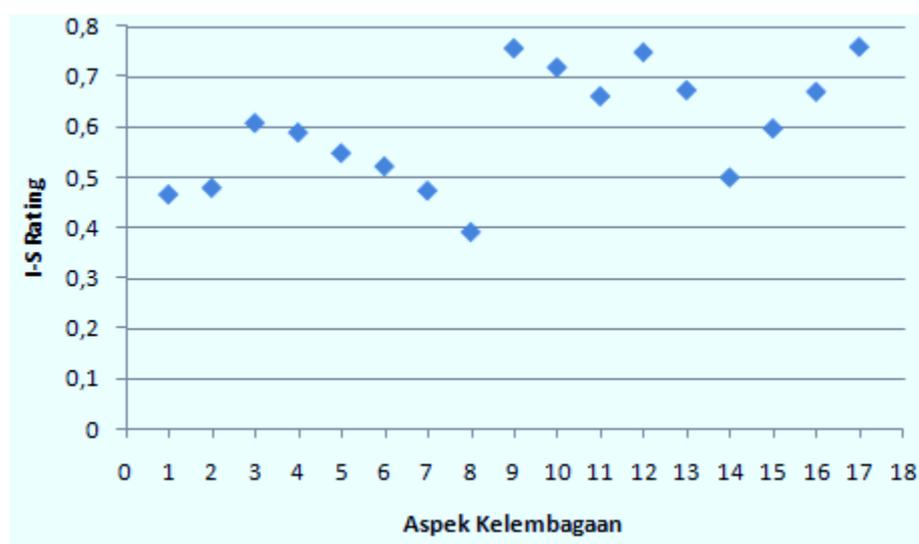
No	Aspek	I-S Rating
1	Kelembagaan & Akademik	0,60
2	Anggaran	0,77
3	Sarana Prasarana	0,68
4	SDM	0,67
5	Total	0,64



Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua aspek berada pada level $IS \geq 0,20$, bahkan jauh di atasnya. Dengan demikian rekomendasi yang disarankan adalah bahwa seluruh aspek mutlak mendapatkan perhatian khusus. Dari keempat aspek, prioritas perhatian berturut-turut adalah pada aspek Anggaran, Sarana Prasarana, SDM, dan terakhir adalah Kelembagaan dan Akademik.

Lebih jauh hasil perolehan IS-Rating kemudian diperinci untuk melihat prioritas masing-masing aspek kebijakan.

Aspek Kelembagaan dan Akademik



Gambar 5.27. Rating Aspek Kelembagaan

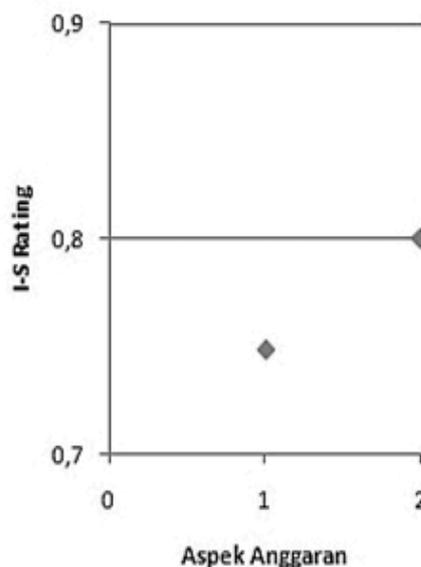
Tabel 5.10. Prioritas Perhatian bagi Aspek Kelembagaan dan Akademik Berdasarkan IS Rating

No	Item Kelembagaan & Akademik	IS Rating
17	Kejelasan aturan perumusan kebijakan internal PTAI	0,757
9	Dukungan kementerian lain (di luar Depag) semisal Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset dan Teknologi dalam pengembangan PTAI	0,754
12	Kondisi ekonomi dan politik bagi pengembangan PTAI	0,746



No	Item Kelembagaan & Akademik	IS Rating
10	Dukungan lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) dalam pengembangan PTAI	0,717
13	Kondisi sosial dan budaya bagi pengembangan PTAI	0,672
16	Antisipasi PTAI berupa program dan kegiatan dalam mengantisipasi isu-isu global (IPTEK)	0,668
11	Dukungan pihak swasta dalam pengembangan PTAI	0,660
3	Visi misi PTAI disosialisasikan dengan tepat	0,607
15	Adopsi nilai-nilai lokal dalam pengembangan PTAI	0,596
4	Visi-misi PTAI diterjemahkan ke dalam program secara tepat	0,588
5	Program pengembangan PTAI terlaksana secara baik	0,547
6	PTAI berkontribusi bagi pembangunan nasional	0,521
14	Dukungan masyarakat umum dalam pengembangan PTAI	0,499
2	Visi misi PTAI dirumuskan dengan jelas	0,478
7	PTAI berkontribusi bagi pembangunan daerah	0,473
1	Visi misi organisasi PTAI	0,465
8	PTAI berkontribusi bagi pembangunan masyarakat	0,391

Aspek Keuangan dan Anggaran



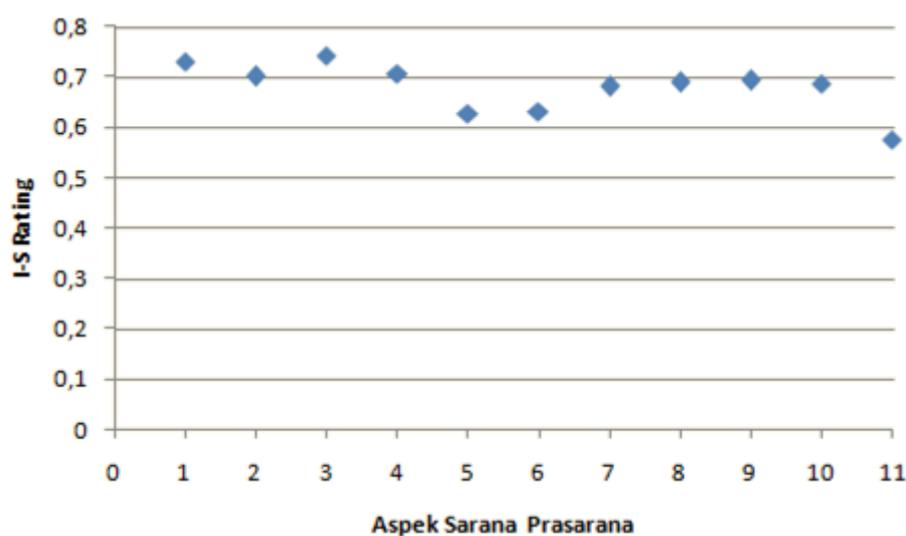
Gambar 5.28 Rating Aspek Anggaran



Tabel 5.11 Prioritas Perhatian bagi Aspek Anggaran Berdasarkan IS Rating

No	Item Anggaran	IS Rating
2	Transparansi pengelolaan keuangan	0,800
1	Keseimbangan alokasi anggaran pada bidang-bidang Kelembagaan, Akademik, SDM, dan Sarana Prasarana	0,749

Aspek Sarana Prasarana



Gambar 5.28. I-S Rating Aspek Sarana Prasarana

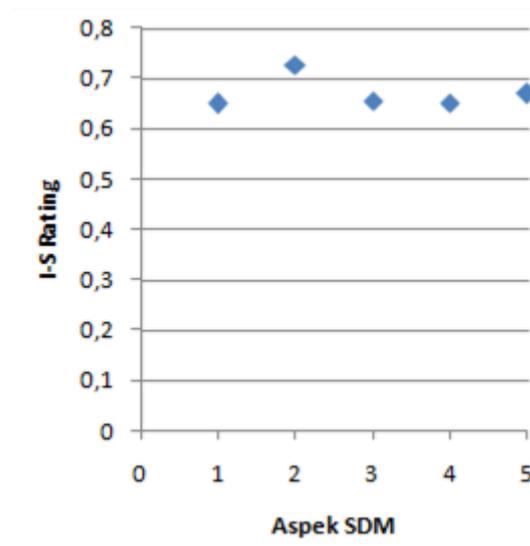
Tabel 5.12. Prioritas Perhatian bagi Aspek Sarana Prasarana Berdasarkan IS Rating

No	Item Sarana Prasarana	IS Rating
3	Pemeliharaan secara berkelanjutan terhadap sarana dan prasarana.	0,743
1	Kejelasan regulasi dan program yang terkait pengembangan sarana dan prasarana di PTAI Anda	0,730
4	OPTIMALISASI pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi kegiatan penelitian.	0,707
2	Sarana dan prasarana penunjang yang berupa: gedung – gedung Fakultas, Pusat pusat, Laboratorium, Fasilitas Umum, Peralatan penunjang pembelajaran, Peralatan Laboratorium, dan Infrastruktur.	0,701
9	Sarana prasarana dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan daya saing	0,692
8	Kondisi sarana prasarana untuk peningkatan daya tarik calon mahasiswa	0,688
10	Sarana prasarana mampu menciptakan efek suasana akademis yang lebih baik	0,686
7	Penggunaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu lulusan	0,681



No	Item Sarana Prasarana	IS Rating
6	OPTAImalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi Kolaborasi dan Kerjasama bagi civitas akademika	0,632
5	OPTAImalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi Kegiatan Pengabdian Masyarakat	0,627
11	Sarana prasarana mampu memberikan manfaat berupa peningkatan "Value" atau "Nilai" Perguruan Tinggi dimata masyarakat.	0,577

Aspek Sumber Daya Manusia



Gambar 5.29. Rating Aspek SDM

Tabel 5.13. Prioritas Perhatian bagi Aspek SDM Berdasarkan IS Rating

No	Item SDM	IS Rating
5	Penghargaan terhadap SDM yang berprestasi	0,774
2	Dukungan pengembangan SDM melalui anggaran yang memadai	0,739
3	Dukungan pengembangan SDM melalui ketersediaan sarana prasarana	0,713
4	Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM	0,713
1	Dukungan pengembangan SDM melalui regulasi dan program kegiatan	0,670



5. Analisis

Pada bagian ini dipaparkan pembahasan sesuai hasil analisis di atas. Pembahasan difokuskan pada bagian prioritas perhatian masing-masing aspek, dengan cara mengkonfrontasikan hasil prioritas berdasarkan nilai gap tertinggi dengan prioritas berdasarkan IS-Rating.

a. Aspek Kelembagaan dan Akademik

Rank	Berdasarkan Analisis Gap		Berdasarkan IS-Rating	
	No	Unsur	Unsur	No
1	9	Dukungan kementerian lain (di luar Depag) semisal Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset dan Teknologi dalam pengembangan PTAI	Kejelasan aturan perumusan kebijakan internal PTAI	17
2	10	Dukungan lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) dalam pengembangan PTAI	Dukungan kementerian lain (di luar Depag) semisal Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset dan Teknologi dalam pengembangan PTAI	9
3	17	Kejelasan aturan perumusan kebijakan internal PTAI	Kondisi ekonomi dan politik bagi pengembangan PTAI	12
Ranking: 9 > 17 > 10 > 12				

Berdasarkan ranking, dapat disimpulkan bahwa responden merasa bahwa bentuk-bentuk dukungan dari lembaga negara di luar Kemenag untuk tujuan pengembangan PTAI merupakan hal yang urgen.

Hal berikutnya adalah bahwa responden merasa terdapat ketidakjelasan aturan-aturan perumusan kebijakan internal PTAI. Tentu saja kejelasan rumusan kebijakan internal PTAI merupakan mata rantai dari rumusan kebijakan yang berada di atasnya dalam hal ini kejelasan rumusan kebijakan yang berada di level Kementerian Agama.



b. Aspek Anggaran

Rank	Berdasarkan Analisis Gap		Berdasarkan IS-Rating	
	No	Unsur	Unsur	No
1	2	Transparansi pengelolaan keuangan	Transparansi pengelolaan keuangan	2
2	1	Keseimbangan alokasi anggaran pada bidang-bidang Kelembagaan, Akademik, SDM, dan Sarana Prasarana	Keseimbangan alokasi anggaran pada bidang-bidang Kelembagaan, Akademik, SDM, dan Sarana Prasarana	1

Ranking: 2 > 1

Berdasarkan ranking di atas, nampaknya responden belum merasa puas dengan kondisi transparansi pengelolaan keuangan.

c. Aspek Sarana Prasarana

Rank	Berdasarkan Analisis Gap		Berdasarkan IS-Rating	
	No	Unsur	Unsur	No
1	2	Sarana dan prasarana penunjang yang berupa: gedung – gedung Fakultas, Pusat pusat, Laboratorium, Fasilitas Umum, Peralatan penunjang pembelajaran, Peralatan Laboratorium, dan Infrastruktur.	Pemeliharaan secara berkelanjutan terhadap sarana dan prasarana.	3
2	3	Pemeliharaan secara berkelanjutan terhadap sarana dan prasarana.	Kejelasan regulasi dan program yang terkait pengembangan sarana dan prasarana di PTAI Anda	1
3	7	Penggunaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu lulusan	OPTAImalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh institusi, bagi kegiatan penelitian.	4

Ranking: 3 > 2 > 1 > 4 > 7

Pemeliharaan sarana prasarana secara berkelanjutan merupakan mendapatkan ranking tertinggi untuk direspon, disusul dengan adanya sarana prasarana yang memadai, dan adanya kejelasan regulasi pengembangan sarana prasarana. Apabila dikaitkan dengan anggaran, tentunya hal tersebut membutuhkan kejelasan regulasi pengalokasian



anggaran. Dalam hal ini diperlukan suatu standard pengelolaan dan alokasi anggaran.

d. Aspek SDM

Untuk aspek SDM, baik menggunakan analisis gap maupun IS-Rating diperoleh ranking yang sama. Diawali dengan penghargaan terhadap prestasi, dukungan pengembangan SDM dalam hal anggaran dan penyediaan sarana prasarana. Dalam era penuh kompetisi ini, tentunya penciptaan prestasi merupakan ujung tombak perkembangan institusi dalam menjalankan *core-business*-nya. Suatu prestasi tentu saja tidak datang begitu saja, namun memerlukan langkah-langkah strategis dan waktu berproses. Berkaitan dengan hal ini, maka diperlukan roadmap yang jelas bagaimana penataan SDM supaya mampu menghasilkan prestasi.

Rank	Berdasarkan Analisis Gap		Berdasarkan IS-Rating	
	No	Unsur	Unsur	No
1	5	Penghargaan terhadap SDM yang berprestasi	Penghargaan terhadap SDM yang berprestasi	5
2	2	Dukungan pengembangan SDM melalui anggaran yang memadai	Dukungan pengembangan SDM melalui anggaran yang memadai	2
3	3	Dukungan pengembangan SDM melalui ketersediaan sarana prasarana	Dukungan pengembangan SDM melalui ketersediaan sarana prasarana	3
Ranking: 5 > 2 > 3				



BAB VI

USULAN REGULASI DAN PROGRAM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PTAI

A. ASPEK KELEMBAGAAN DAN AKADEMIK

1. Pengembangan Kelembagaan PTAI secara nasional
2. Mempertegas Pembidangan keilmuan di lingkungan di PTAI
3. Kriteria dan syarat peningkatan status kelembagaan bagi PTAI secara jelas dan tertulis. PTAI mana saja yang dapat dikembangkan menjadi IAIN dan UIN serta diferensiasi keunggulan setiap PTAI.
4. Kebijakan untuk revitalisasi Prodi studi islam dan pengembangan Prodi umum di lingkungan PTAI.
5. KEMENAG harus memiliki strategi yang jelas untuk Pencapaian standard akreditasi prodi dan kualitas akademik yang baik

B. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

1. Perlu memiliki standard minimal Sarana Prasarana dan fasilitas PTAI yang memungkinkan setiap PTAI memiliki daya saing yang cukup di tingkat Nasional.
2. Harus memiliki peta sarana prasarana PTAI/N. Mana yang perlu didanai oleh IDB, mana yang perlu di prioritaskan, dan lain – lain.
3. Kebijakan Manajemen Aset.
4. Sistem Manajemen Pengadaan / Procurement atau pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan akademik.

C. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

1. Perlu memiliki standard minimal Sarana Prasarana dan fasilitas PTAI yang memungkinkan setiap PTAI memiliki daya saing yang cukup di tingkat Nasional.
2. Harus memiliki peta sarana prasarana PTAI/N. Mana yang perlu didanai oleh IDB, mana yang perlu di prioritaskan, dan lain – lain.
3. Kebijakan Manajemen Aset.



4. Sistem Manajemen Pengadaan / Procurement atau pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan akademik.

D. ASPEK KEUANGAN DAN ANGGARAN

1. Kebijakan yang jelas agar semua PTAIN mengacu pada sistem PPK-BLU
2. Kebijakan melakukan sinkronisasi perencanaan akademik dan keuangan
3. Perlu memiliki kebijakan untuk standarisasi tarif dan pedoman operasional bagi PTAIN yang kompetitif.
4. Mendorong PTAIN yang sudah BLU memiliki sistem akuntansi *accrual basis* yang mandiri.
5. Kebijakan APBN bagi PTAIN yang akomodatif terhadap *Unit cost* per mahasiswa yang berlaku umum untuk PT yang berkualitas di tingkat nasional.
6. Perlu memiliki kebijakan alokasi anggaran secara proporsional sesuai dengan *core business* nya. Sebagai contoh, Tri dharma perguruan tinggi merupakan *core business* yang harus mendapatkan perhatian utama dari sisi anggaran sehingga porsi untuk hal tersebut harus di prioritaskan dibandingkan dengan aspek aspek lain yang *less priority*.

PERLU DIURAIKAN...?



BAB VII

PENUTUP : KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan Kemenag dalam rangka pengembangan PTAI, memperhatikan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, dan mempelajari jawaban kuisisioner yang telah diisi oleh para pemangku kepentingan, Tim peneliti menemukan masalah-masalah yang dapat diangkat menjadi isu strategis sebagai berikut, dan rekomendasi untuk pengembangan PTAI di masa yang akan datang:

No	Temuan Riset	Usulan Kebijakan
I	Bidang Kelembagaan dan Akademik	
I.1	Kebijakan mengenai pengembangan kelembagaan PTAI belum jelas, khususnya yang terkait dengan PTAIN mana yang dapat berubah status kelembagaannya menjadi UIN dan IAIN. Perubahan status kelembagaan dari IAIN ke UIN, dan STAIN ke IAIN menjadi keinginan masing-masing PTAIN, bukan atas dasar kebijakan Kemenag. Kemenag belum memiliki Peta PTAIN dari aspek kelembagaan dan akademik. PTAI membuka program yang sama, padahal jumlahnya kini mencapai 576 PTAI se Indonesia.	Perlu dibuat Peta Nasional Pengembangan PTAIN berdasarkan potensi daerah masing-masing. UIN atau IAIN mana unggul di bidang apa. Misalnya UIN Malang unggul di bidang kajian Pendidikan Islam, UIN Jogya unggul di bidang Keuangan Islam, UIN Jakarta unggul di bidang Sains, UIN Bandung unggul di bidang kajian Sosial Humaniora, UIN Riau unggul di bidang kajian Hadis, UIN Makasar unggul di bidang Al-Qur'an misalnya. Pemetaan ini penting sebagai dasar Kementerian Agama di dalam menentukan alokasi sumberdaya: SDM dan Dana, mengingat keduanya ditentukan langsung oleh Kementerian Agama RI. Lebih penting lagi, Peta ini akan bermanfaat bagi calon mahasiswa yang akan mengambil program sesuai dengan minat mereka. Bila akan mendalami Al-Qur'an, maka mereka bisa memilih UIN Makasar. Disamping itu, Peta ini juga akan bermanfaat bagi



No	Temuan Riset	Usulan Kebijakan
		<p>pengembangan riset. Bila ada peneliti akan mengembangkan riset di bidang keuangan Islam misalnya, maka mereka dapat memilih untuk melakukan riset di Yogyakarta. Dan seterusnya. Bila Kemenag tidak memiliki Peta ini, maka yang terjadi seperti sekarang ini, UIN menjadi seperti Super Market, menawarkan berbagai program yang sama dengan yang ditawarkan oleh UIN lainnya, begitu pula IAIN, menjadi mini market studi Islam. Kini, saatnya kita memiliki kebijakan center of excellent di masing-masing PTAIN sesuai kekuatan dan potensinya masing-masing, sehingga akan membuat sebuah PTAIN distinct from others. Diferensiasi ini akan menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa, peneliti dan masyarakat luas pengguna jasa PTAIN.</p>
II	Bidang Sarana dan Prasarana	
II.1	<p>Aset PTAI ada yang sudah memenuhi standar, tetapi banyak yang belum. Memang sudah ada bangunan gedung kelas, perpustakaan, lab, kantor, dan ruang pertemuan, tetapi kondisinya masih di bawah standard.</p>	<p>Perlu ada kebijakan standarisasi sarana prasarana PTAI, karena PTAI melayani publik. Ada layanan sarana prasarana minimal yang perlu diatur oleh Kemenag agar pembelajaran di lingkungan PTAI dapat berjalan sesuai standard nasional. Standarisasi ini juga diperlukan untuk menjamin kualitas proses dan out put.</p>
II.2.	<p>Di lapangan ditemukan banyak aset PTAI yang <i>idle</i>, kurang optimal pemanfaatannya. Karena PTAI belum memiliki sistem manajemen aset. Selama ini, SABMN hanya digunakan untuk mencatat dan membukukan aset, inventarisasi saja. Tetapi belum digunakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal. Padahal investasi di bidang aset/</p>	<p>Perlu ada kebijakan mengenai manajemen aset dan <i>procurement management</i>.</p>



No	Temuan Riset	Usulan Kebijakan
	<p>belanja modal sangat besar. Trend mereka masih senang pengadaan, belum pemeliharaan dan pemanfaatan.</p>	
III	Bidang Keuangan	
III.1	<p>3 tahun terakhir ini, alokasi anggaran untuk operasional PTAI semakin meningkat. Tetapi belum ada kebijakan mengenai proporsi penggunaan anggaran. Misalkan akademik sekian % dari total anggaran, fisik sekian %, manajemen sekian %. Tidak adanya kebijakan ini membuat satker PTAI tidak memiliki guideline di dalam merencanakan anggaran operasional mereka. Banyak PTAI yang menggunakan anggaran untuk belanja modal, sementara kegiatan akademik yang menjadi core-business nya diberi alokasi kecil. Dengan ungkapan lain, perencanaan akademik PTAI dan finansial tidak <i>inline</i>. Akibatnya terjadi gap di satker PTAI, banyak program akademik yang tidak jalan karena tidak tersedia anggaran. Kegiatan seperti <i>penelitian dosen, publikasi akademik, pengadaan referensi, langganan jurnal, seminar, diskusi, workshop, perbaikan kurikulum dan silabi</i> belum mendapatkan porsi yang cukup. Di banyak PTAI, bahkan tidak teranggarkan sama sekali. PTAI hanya melakukan pembelajaran di kelas saja. Ini menyebabkan program TRI DHARMA PTAI yang menjadi misi utama PTAI tidak jalan seimbang. Yang</p>	<p>Perlu ada kebijakan yang tegas dan tertulis terkait proporsi penggunaan anggaran. Ini akan menjadi pedoman bagi masing-masing Satker PTAI di dalam penyusunan rencana anggaran PTAI. Disamping itu, kebijakan ini juga akan dijadikan acuan di dalam pembahasan anggaran dengan Dirjend Anggaran. Karena seringkali PTAI mengajukan banyak program akademik tetapi dicoret oleh pejabat dirjend anggaran karena ketidak mengertian mereka akan visi dan misi utama PTAI.</p>



No	Temuan Riset	Usulan Kebijakan
III.2	<p>jalan hanya Pendidikan dan pengajaran. Ini pun belum optimal. Belum lagi persoalan penghargaan kepada dosen luar biasa yang tarifnya amat sangat kecil. Inilah yang menyebabkan terjadinya, Perencanaan pendanaan PTAI belum memadai ideal keuangan belum mesinkron dengan kebijakan akademik.</p> <p>Kemenag sudah menganjurkan PTAI mengadopsi PP 23 tahun 2005 mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Tetapi Kemenag belum memiliki pola pembinaan Satker BLU, khususnya PTAIN yang sudah mendapat status BLU. Implikasi menjadi Satker BLU cukup banyak yang semuanya memerlukan pembinaan dari Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Di lapangan ditemukan, PTAIN yang sudah mendapat status BLU belum semuanya melengkapi perangkat yang diamanatkan PP 23 tahun 2005. Sebagai contoh, perbaikan tata kelola, pengangkatan dewas, sistem remunerasi, pola tarif, pengadaan barang dan jasa, SPM, Sistem Akutansi, manajemen aset, sistem penjaminan mutu, dan Satuan Audit Internal. Ini menyebabkan kinerja akademik dan keuangan PTAIN sebagai lembaga publik belum optimal, dengan ungkapan lain, layanan publik yang diberikan belum memenuhi harapan publik.</p>	<p>Kemenag perlu memiliki kebijakan mengenai pola pembinaan Satker PTAIN ber BLU sesuai amanat PP 23 tahun 2005. Kebijakan ini diperlukan agar Satker PTAIN ber BLU dapat menjalankan fungsinya sebagai agen yang menjalankan visi dan misi Kementerian Agama. Satker BLU mendapatkan fleksibilitas di dalam mengelola keuangan tetapi harus dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada publik. Kemenag dapat membuat kontrak kinerja kepada PTAIN ber BLU dan membuat target-target capaian apabila tidak dapat memenuhi target, maka status BLU nya dapat dicabut. Bahkan Kemenag dapat memaksa Satker BLU menerapkan pola pengelolaan manajemen Perguruan Tinggi ala korporasi, business like, tentunya yang sesuai dengan karakter akademik perguruan tinggi. Sayangnya, kalau fleksibilitas yang diberikan oleh PP 23 tahun 2005 tidak dimanfaatkan oleh PTAIN, padahal de facto, di lapangan, PTAIN memerlukan fleksibilitas tersebut.</p>



No	Temuan Riset	Usulan Kebijakan
IV	Sumber Daya Manusia	
IV.1	<p>Kemenag sudah memiliki kebijakan di bidang pengembangan SDM PTAI. Diantara kebijakan tersebut adalah meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM PTAI. Kebijakan ini diwujudkan dengan pemberian bantuan dan beasiswa untuk para peneliti dan dosen, agar mereka dapat menghasilkan penelitian yang memenuhi standard akademik internasional. Dosen juga didorong untuk melanjutkan studi sampai ke jengang tertinggi, Doktor baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi kebijakan ini belum diikuti dengan Rencana Strategik Pengembangan SDM PTAI (RENSTRA SDM). Akibatnya, program ini memang dapat berjalan, tetapi terkesan belum <i>well-planned</i>.</p>	<p>Kemenag perlu memiliki kebijakan di bidang pengembangan SDM dengan perencanaan yang baik. Saatnya Kemenag dan PTAI memiliki SHRD (<i>Strategic Human Resource Management</i>) dan SHRD (<i>Strategic Human Resource Management</i>). Perencanaan SDM ini diperlukan untuk mengatasi gap yang selama ini terjadi. Kemenag memiliki SDM dengan jumlah yang cukup, tetapi kualitasnya belum memadai. Perencanaan SDM yang baik akan bermanfaat bagi pengembangan PTAI di masa yang akan datang. Dengan SDM yang terencana dengan baik, pengelolaan PTAI akan lebih efektif dan efisien.</p>
IV.2	<p>Belum ada peta SDM seperti PTAI mana memiliki potensi apa, mau mengembangkan apa, sudah punya SDM berapa butuh berapa orang dengan keahlian apa di masa yang akan datang. Rekrutmen SDM pun belum terencana dengan baik. PTAIN belum memiliki sistem penilaian kinerja SDM.</p>	<p>Perlu ada kebijakan dari Kemenag agar PTAI memiliki sistem penilaian kinerja sendiri. Kebijakan ini akan memaksa PTAI mempunyai sistem penilaian kinerja SDM mereka. Sistem ini diperlukan untuk menetapkan <i>rewards and punishment</i>.</p>
IV.3	<p>SDM belum pernah diaudit. PTAI tidak tahu potensi SDM nya sendiri. Akibatnya, SDM yang punya keahlian sama menumpuk di sebuah PTAI.</p>	<p>Perlu ada kebijakan audit SDM. Ini bermanfaat untuk mengetahui peta SDM PTAI. SDM apa yang dimiliki, potensinya apa, kekurangannya apa. Ini bermanfaat untuk menjadi dasar program staff development, training</p>



No	Temuan Riset	Usulan Kebijakan
		dan retraining.

Demikian Laporan Penelitian “EVALUASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM” ini kami sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Pengembangan PTAI di tanah air dan akhirnya Tim peneliti menyampaikan banyak terimakasih atas bantuan semua pihak yang memungkinkan penelitian ini dapat dilaksanakan serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Jakarta, Desember 2011

Hormat kami,

Tim Peneliti :

1. Drs. Jarot Wahyudi, S.H, M.A. (Ketua)
2. DR. Ibnu Qizam, M.Si, Akt
3. Ir. Arya Wirabhuana, M.Sc
4. Kifayah Amar, M.Sc, Ph.D
5. Taufiq Aji, S.T, M.T.
6. Yandra Rahardian Perdana, S.T, M.T.